Gerakan Demokrasi Dan Pendidikan Politik:

Refleksi Atas Peran Pemuda Dari Masa Ke Masa

Dr. Achmad Busrotun Nufus, M.Pd.
Dr. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A.
Frista Arisa, M.H.
Novitasari, M.Pd.
Ni'matu Sholikhah, S.Pd., M.Pd.
Khoirunnisa Ayu

Dipindai dengan CamScanner

GERAKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN POLITIK:

REFLEKSI ATAS PERAN PEMUDA DARI MASA KE MASA

Dipindai dengan CamScanner

Gerakan Demokrasi Dan Pendidikan Politik:

Refleksi Atas Peran Pemuda Dari Masa Ke Masa

Dr. Achmad Busrotun Nufus, M.Pd.
Dr. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A.
Frista Arisa, M.H.
Novitasari, M.Pd.
Ni'matu Sholikhah, S.Pd., M.Pd.
Khoirunnisa Ayu

BENING PUSTAKA

Dipindai dengan CamScanner

GERAKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN POLITIK: REFLEKSI ATAS PERAN PEMUDA DARI MASA KE MASA

© 2025, Dr. Achmad Busrotun Nufus, M.Pd., Dr. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A., Frista Arisa, M.H., Novitasari, M.Pd., Ni'matu Sholikhah, S.Pd., M.Pd., Khoirunnisa Ayu.

Tata Letak : Diksi
Desain Sampul : Melodia
Penyunting : Metta

Diterbitkan oleh
Bening Pustaka
Puri Permata Sorobayan No.1 Argomulyo Sedayu Bantul
0895807411411
Anggota IKAPI
No. 143/DIY/2021
beningpustaka@gmail.com

ISBN 978-623-435-244-3

viii + 133 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

Cetakan pertama, Desember 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Penerbit.

Dipindai dengan CamScanner

GERAKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN POLITIK:

REFLEKSI ATAS PERAN PEMUDA DARI MASA KE MASA

Gerakan Demokrasi Dan Pendidikan Politik:

Refleksi Atas Peran Pemuda Dari Masa Ke Masa

Dr. Achmad Busrotun Nufus, M.Pd.
Dr. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A.
Frista Arisa, M.H.
Novitasari, M.Pd.
Ni'matu Sholikhah, S.Pd., M.Pd.
Khoirunnisa Ayu

BENING PUSTAKA

GERAKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN POLITIK: REFLEKSI ATAS PERAN PEMUDA DARI MASA KE MASA

© 2025, Dr. Achmad Busrotun Nufus, M.Pd., Dr. Siti Maizul Habibah, S.Pd., M.A., Frista Arisa, M.H., Novitasari, M.Pd., Ni'matu Sholikhah, S.Pd., M.Pd., Khoirunnisa Ayu.

Tata Letak : Diksi
Desain Sampul : Melodia
Penyunting : Metta

Diterbitkan oleh
Bening Pustaka
Puri Permata Sorobayan No.1 Argomulyo Sedayu Bantul
0895807411411
Anggota IKAPI
No. 143/DIY/2021
beningpustaka@gmail.com

ISBN

viii + 133 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

Cetakan pertama, Januari 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari Penerbit.

Pengantar Penulis

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul "Gerakan Demokrasi dan Pendidikan Politik: Refleksi Atas Peran Pemuda dari Masa ke Masa" ini dapat tersusun hingga menjadi suatu karya yang diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Buku ini lahir dari kegelisahan terhadap perkembangan demokrasi serta dinamika keikutsertaan generasi muda dalam gerakan politik bangsa. Melalui refleksi sejarah dan studi pendidikan politik, penulis berusaha menghadirkan uraian yang komprehensif tentang peran pemuda dari masa ke masa, posisi strategis pemuda dalam partisipasi politik, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi di era modern. Setiap bab dalam buku ini menyoroti aktor politik beserta peranannya, pentingnya pendidikan politik, perkembangan pemuda Indonesia, aspek partisipasi politik, serta hubungan antara demokrasi dan demonstrasi hingga refleksi aksi mahasiswa di berbagai era, termasuk gerakan kontemporer di tahun 2025.

Penulis menyadari bahwa pendidikan politik dan semangat demokrasi harus terus diperkuat sebagai fondasi bangsa yang berkarakter. Melalui kajian sejarah gerakan mahasiswa, penguatan pendidikan politik, serta analisis partisipasi pemuda, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi dan inspirasi bagi mahasiswa, tenaga pendidik, aktivis, serta siapa pun yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.

Penulis membuka ruang kritik dan saran untuk kesempurnaan karya ini. Semoga buku ini dapat memberi pencerahan, membangun semangat partisipasi aktif, serta memperkokoh karakter pemuda sebagai agen perubahan bangsa.

Daftar Isi

Pengantar Penulis V

Gerakan Demokrasi dan Pendidikan Politik: Refleksi atas Peran Pemuda dari Masa ke Masa 1

A. Pendahuluan 1
B. Generasi Muda dalam Partisipasi Politik 6
C. Peran Pendidikan Politik 16
D. Pengertian Pendidikan 20
E. Fungsi dan Tujuan Pendidikan 22
F. Pengertian Politik 26
G. Unsur-Unsur dan Fungsi Politik 31
H. Pendidikan Politik 34
I. Tujuan Pendidikan Politik 37
J. Peranan Pendidikan Politik dalam Kehidupan Demokratis dan Penguatan Karakter Bangsa 38
K. Tantangan dan Peluang Pendidikan Politik di Indonesia 43
L. Generasi Muda 46
M. Partisipasi Politik 77
N. Demokrasi dan Demonstrasi 88
O. Hubungan Demokrasi dengan Demonstrasi 99
P. Sejarah Demonstrasi Mahasiswa di Indonesia: Gerakan 1966 dan 1998 102
Q. Gerakan dan Demonstrasi Tahun 1966 104
R. Peran Mahasiswa dalam Era Reformasi dan Tantangan Demokrasi Pasca 1998 110
S. Demonstrasi Terbaru di Indonesia Tahun 2025: Gerakan #Indonesiagelap 111
T. Tanggapan Pemerintah dan Aparat Keamanan Terhadap Demonstrasi 2025 di Indonesia 113
U. Cara Menyampaikan Pendapat yang Baik dan Benar di Muka Umum 115
V. Peran dan Tanggung Jawab Koordinator Lapangan (Korlap)

dalam Pelaksanaan Demonstrasi 118
Daftar Pustaka 121
Profil Penulis 130

GERAKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN POLITIK: REFLEKSI ATAS PERAN PEMUDA DARI MASA KE MASA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik karena politik merupakan instrumen utama dalam mengambil keputusan yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Sukardan, J. D. B., 2020). Melalui politik, arah pembangunan ditentukan, sumber daya diatur, serta prioritas kebijakan ditetapkan. Oleh karena itu, politik menjadi elemen yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Namun, meskipun memiliki peran sentral, politik tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari sistem negara yang kuat, stabil, dan terstruktur agar tujuan politik yang diharapkan dapat tercapai. Politik dan negara ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan; keduanya saling membutuhkan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Pierson. P, 1996).

Pada praktiknya, kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang di dalamnya. Hampir semua sektor strategis seperti ekonomi, hukum, hak asasi manusia (HAM), sosial, dan budaya memiliki keterkaitan erat dengan kondisi politik. Ketika sistem politik berjalan dengan baik transparan, adil, serta menjunjung nilai demokrasi dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Stabilitas politik menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, hukum yang tegas dan berkeadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara (Wahid. M. A, 2018). Sebaliknya, jika sistem politik berjalan secara carut-marut dan penuh konflik kepentingan, maka efek negatifnya akan merembet ke berbagai sektor tersebut. Ketimpangan ekonomi, pelanggaran hukum, bahkan gejolak sosial sering kali berakar dari kondisi politik yang tidak sehat.

Faktanya bisa kita amati bawa sistem politik yang baik tidak bisa terwujud dalam sekejap. Sistem politik yang baik harus dibangun melalui proses panjang yang melibatkan kesadaran, komitmen, dan kesiapan seluruh elemen bangsa. Tidak ada politik yang matang tanpa pondasi moral dan intelektual yang kuat dari para pelakunya (*political actors*). Oleh karena itu, pembangunan politik memerlukan strategi dan persiapan yang matang. Salah satu faktor penting dalam proses ini adalah keberadaan aktor politik yang berkualitas. Aktor politik memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan, menjadi perantara antara kepentingan rakyat dan negara, serta menjaga agar roda pemerintahan berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Berbicara mengenai aktor politik bukan hanya mereka yang duduk di lembaga pemerintahan atau parlemen. Namun siapapun yang memiliki kepedulian terhadap bangsa, memahami isu-isu publik, serta berpartisipasi aktif dalam proses politik dapat disebut sebagai aktor politik. Termasuk di dalamnya partai politik, aktivis masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, maupun warga negara biasa yang menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, politik adalah urusan semua warga negara, bukan hanya segelintir elit. Kualitas politik suatu negara akan sangat tergantung pada seberapa aktif dan bijak masyarakatnya dalam memainkan peran politik tersebut.

Aktor politik dapat dibedakan berdasarkan peran, fungsi, dan kedudukannya dalam sistem politik suatu negara. Masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjaga keseimbangan dan efektivitas sistem pemerintahan.

1. Jenis-Jenis Aktor Politik dan Perannya

a. Aktor Politik Formal

Aktor formal adalah individu atau kelompok yang secara resmi memiliki kedudukan dalam struktur pemerintahan dan lembaga negara. Mereka menjalankan fungsi politik melalui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Contoh aktor politik formal diantaranya yakni Roskin, M. G., Cord, R. L., Jones, W. S., & Medeiros, J. A. (2015).;

1. Presiden dan wakil presiden: Berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mengarahkan kebijakan nasional, memimpin pelaksanaan undang-undang, dan menjadi simbol persatuan bangsa.
2. Lembaga legislatif: Anggota parlemen atau DPR yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menampung aspirasi rakyat.
3. Lembaga yudikatif: Hakim dan lembaga peradilan yang memastikan keadilan ditegakkan, serta mengawal agar pelaksanaan kekuasaan tidak disalahgunakan.

Aktor-aktor formal inilah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menentukan arah kebijakan politik dan pembangunan negara.

b. Aktor Politik Nonformal

Selain lembaga resmi, terdapat aktor nonformal yang juga berperan besar dalam dinamika politik. Mereka beroperasi di luar struktur pemerintahan, tetapi pengaruhnya terhadap opini publik dan arah kebijakan sering kali signifikan. Contoh dari aktor politik non formal diantaranya yakni Rahayu, A. A., & Alfirdaus, L. K. (2024). Weiss, T. G., Seyle, D. C., & Coolidge, K. (2013). The rise of non-state actors in global governance. Willetts, P. (2001). ;

4. Partai politik: Berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan sarana rekrutmen politik. Partai politik menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah.
5. Organisasi masyarakat dan LSM: Menjadi kekuatan sosial yang mengawasi, mengkritisi, dan mengadvokasi kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
6. Media massa dan jurnalis: Berperan sebagai pengawas independen dengan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan serta membentuk opini publik melalui informasi yang disajikan.
7. Akademisi dan intelektual: Menyumbangkan gagasan dan analisis rasional untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik dan demokrasi.

c. Aktor Politik Individual (Warga Negara)

Setiap warga negara pada dasarnya juga merupakan aktor politik. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama keberlangsungan politik yang sehat. Bentuknya bisa berupa penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam diskusi publik, atau pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran politik masyarakat menentukan apakah sistem politik akan tumbuh sehat atau justru rapuh (de Graaf, L. J., & Michels, A. M. B. (2009), Mavrikos-Adamou, T. (2010)).

Dari ketiga jenis aktor politik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah sistem politik bergantung pada sinergi antara aktor formal, nonformal, dan individual. Kualitas kebijakan publik, stabilitas pemerintahan, hingga tingkat kesejahteraan rakyat bergantung pada seberapa baik para aktor politik ini memainkan perannya dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Lalu selanjutnya siapa saja yang bisa berpartisipasi dan menjadi aktor politik?

Maka untuk menjawab pertanyaan tentang siapa saja yang bisa berpartisipasi dan menjadi aktor politik, tentu kita menyadari bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun ekonomi. Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal. Partisipasi politik bukan semata-mata hak istimewa kelompok tertentu, melainkan kewajiban moral seluruh warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan bangsanya.

Baik generasi tua dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, maupun generasi muda dengan semangat dan ide-ide progresifnya, keduanya memiliki kontribusi berharga dalam memperkuat tatanan politik yang inklusif dan dinamis.

Jaminan hukum untuk turut serta berpartisipasi dan menjadi aktor politik telah diakui secara internasional, salah satunya melalui Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Suntian, 2023). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk terlibat

langsung maupun tidak langsung dalam pemerintahan negaranya, serta memiliki hak yang sama untuk mengakses jabatan publik. Prinsip ini menunjukkan bahwa politik bukan ruang tertutup, melainkan arena terbuka yang dapat diisi oleh siapa pun yang memiliki niat dan kemampuan untuk berkontribusi bagi kepentingan bersama. Artinya bahwa pengakuan dari hukum nasional dan internasional menjadi dasar penting bagi penguatan partisipasi politik masyarakat di berbagai tingkatan.

Lebih jauh lagi jaminan tersebut tidak hanya bersifat formal di atas kertas, tetapi juga menuntut adanya upaya nyata dari negara dalam menciptakan ruang partisipasi yang setara. Pemerintah harus memastikan bahwa partisipasi politik tidak dihambat oleh diskriminasi, tekanan, atau keterbatasan akses informasi. Demikian pula, masyarakat perlu didorong untuk aktif berperan, memahami hak dan kewajiban politiknya, serta menggunakan hak suara dengan bijak sebagai bentuk tanggung jawab demokratis. Jadi generasi muda memiliki potensi besar sebagai pembawa perubahan. Mereka mampu menghadirkan perspektif baru, solusi kreatif, dan energi sosial yang dapat memperbarui sistem politik agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Oleh karena itu, partisipasi politik harus dipahami sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk membangun keberlanjutan bangsa. Negara dan masyarakat internasional telah memberikan payung hukum dan dukungan terhadap hak berpolitik, namun implementasinya membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas generasi muda. Dengan kolaborasi yang kuat, peluang untuk melahirkan aktor-aktor politik yang berintegritas, visioner, dan berpihak pada rakyat akan semakin besar.

B. GENERASI MUDA DALAM PARTISIPASI POLITIK

Peran generasi muda dalam memperkuat partisipasi politik dan demokrasi sangatlah krusial. Menurut Fajari & Triadi (2023) generasi muda merupakan kelompok dengan jumlah populasi besar, energi yang tinggi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Mereka membawa semangat baru dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keadilan sosial. Dalam konteks politik, generasi muda tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu mengawal kebijakan publik agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui keterlibatan aktif di berbagai bidang seperti organisasi kepemudaan, komunitas sosial, maupun partai politik mereka dapat menjadi agen pembaruan yang menanamkan nilai-nilai integritas dan idealisme di tengah sistem politik yang terkadang penuh pragmatisme.

Keterlibatan generasi muda juga berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara rakyat dan pemerintah. Dengan kemampuan memahami teknologi dan komunikasi modern, mereka mampu menciptakan ruang dialog politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan inklusif. Misalnya, penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi politik, kampanye kesadaran publik, atau wadah kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas semacam ini memperluas jangkauan politik ke tingkat akar rumput, menguatkan prinsip transparansi, dan mendorong lahirnya budaya politik yang lebih kritis namun tetap konstruktif.

Namun, untuk memastikan partisipasi generasi muda tidak bersifat parsial atau musiman, perlu adanya pendidikan politik yang berkelanjutan. Pendidikan politik bukan hanya sekadar mengenalkan hak dan kewajiban warga negara, melainkan juga membentuk karakter dan etika politik yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik, generasi muda diharapkan memahami proses demokrasi secara substantif tidak hanya sebatas prosedural serta mampu menyalurkan aspirasi dengan cara yang santun dan berlandaskan argumentasi rasional. Institusi pendidikan, keluarga, dan organisasi kemasyarakatan

memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran tersebut agar partisipasi politik muda tidak terjebak dalam euforia sesaat, tetapi menjadi fondasi perbaikan sistem politik jangka panjang.

Selain itu, kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan juga harus diperluas. Kebijakan afirmatif, seperti keterwakilan pemuda dalam partai politik, lembaga legislatif, maupun forum konsultatif publik, dapat menjadi langkah strategis untuk memberikan ruang bagi mereka berkontribusi langsung. Semakin banyak generasi muda yang menempati posisi strategis, semakin besar peluang untuk membawa perspektif baru dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada masa depan.

Kesimpulannya bahwa generasi muda bukan hanya penerus estafet kekuasaan, melainkan motor penggerak utama dalam memperkuat demokrasi. Mereka harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam menciptakan kultur politik yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Masa depan demokrasi suatu negara sejatinya terletak pada sejauh mana generasi mudanya mau dan mampu mengambil peran dalam menjaga serta memperbaiki sistem politik yang ada.

2. Tantangan Generasi Muda dalam berpolitik

Dalam proses memperkuat partisipasi politik, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik yang berasal dari faktor internal dalam diri mereka sendiri maupun dari faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan sosial dan politik. Tantangan ini perlu dikenali agar partisipasi politik yang diharapkan tidak berhenti pada tahap idealisme, tetapi dapat terwujud dalam tindakan nyata dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi generasi muda adalah minimnya kesadaran dan pemahaman politik yang mendalam. Banyak anak muda yang masih menganggap politik sekadar urusan kekuasaan, perebutan jabatan, atau hal yang jauh dari kepentingan pribadi mereka. Padahal, hampir seluruh aspek kehidupan – seperti pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial – ditentukan oleh keputusan politik. Rendahnya literasi politik ini seringkali disebabkan

oleh kurangnya pendidikan politik formal dan informal yang efektif dalam membentuk wawasan dan kesadaran kritis terhadap isu-isu publik.

Selain kurangnya pemahaman, sikap apatis terhadap politik juga menjadi tantangan serius. Sebagian pemuda memilih menjauh dari kegiatan politik karena kecewa terhadap praktik politik yang sering kali diwarnai korupsi, konflik kepentingan, dan kurang transparan. Pandangan negatif terhadap dunia politik membuat mereka enggan terlibat, sehingga ruang pembaruan politik justru dikuasai oleh kelompok lama yang sulit berubah. Padahal, tanpa peran aktif pemuda, proses regenerasi politik yang sehat akan terhambat.

Faktor eksternal juga berperan besar dalam membentuk kendala partisipasi politik generasi muda. Struktur politik yang masih didominasi oleh elit dan hierarki tertutup sering kali membuat generasi muda kesulitan menembus arena pengambilan keputusan. Minimnya akses terhadap sumber daya politik, seperti modal sosial, ekonomi, maupun jaringan kekuasaan, menyebabkan partisipasi mereka cenderung terbatas pada level opini, bukan pada posisi pengaruh. Di sisi lain, media sosial yang menjadi wadah utama ekspresi politik generasi muda juga memiliki sisi ganda: di satu sisi memperluas ruang partisipasi, namun di sisi lain rentan terhadap disinformasi dan polarisasi opini yang dapat melemahkan kualitas diskusi politik itu sendiri.

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan struktural dari negara dan partai politik untuk melibatkan pemuda secara substansial. Banyak partai hanya menjadikan generasi muda sebagai simbol atau alat mobilisasi ketika masa kampanye, tanpa benar-benar memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dan strategi politik. Ketimpangan ini menjadikan semangat pemuda sering padam sebelum berkembang.

Solusi untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, generasi muda perlu memperkuat kapasitas diri melalui langkah-langkah diantaranya yakni Nelson, M. (2023);

a. peningkatan literasi politik

b. pelatihan kepemimpinan, dan
c. keterlibatan aktif dalam organisasi sosial maupun politik yang berorientasi pada nilai-nilai etis dan konstruktif.

Pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil (*civil society*) juga harus menyediakan ruang dan mekanisme yang inklusif bagi pemuda untuk menyalurkan ide serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian maka tantangan tersebut bukan lagi menjadi penghalang, melainkan batu pijakan untuk menciptakan generasi politik yang lebih cerdas, berintegritas, dan visioner.

Peran politik generasi muda merupakan hak bagi mereka. Sebagaimana *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap negara. Dalam penjelasannya, ICCPR membedakan hak-hak tersebut ke dalam dua kategori, yaitu Sarah, J. (2002);

1. Non-derogable rights

Menurut Matompo (2014) hak-hak non-derogable merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk saat negara berada dalam situasi darurat. Contohnya adalah hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang. Hak-hak tersebut bersifat tetap dan tidak dapat dicabut karena berkaitan langsung dengan martabat kemanusiaan.

2. Derogable rights

Hak-hak derogable merupakan hak yang dalam kondisi tertentu dapat dibatasi oleh negara dengan alasan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, atau moralitas publik (Saputra & Syahuri, 2024). Termasuk dalam kategori ini adalah kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat.

Meskipun bersifat dapat dibatasi, kebebasan politik tetap diakui dan dijamin oleh ICCPR sebagai bagian penting dari kehidupan demokratis. Artinya, keterlibatan warga negara dalam politik baik secara langsung maupun tidak langsung adalah hak asasi yang dilindungi sepanjang

dilakukan dengan tanggung jawab serta menghormati hak orang lain.

Generasi muda memiliki ruang yang sama untuk mengekspresikan dan menggunakan hak politiknya. Mereka tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga untuk dipilih serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Fenomena meningkatnya jumlah anak muda yang terjun ke dunia politik, baik melalui lembaga legislatif, organisasi partai, maupun gerakan masyarakat sipil, merupakan indikator positif berkembangnya demokrasi partisipatif. Keaktifan generasi muda dalam dunia politik menandakan bahwa mereka tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan telah menjadi pelaku utama yang memberikan warna baru dalam sistem politik nasional.

Keterlibatan generasi muda ini juga berimplikasi pada peningkatan kualitas kebijakan publik. Hal ini karena generasi muda dikenal memiliki ide-ide kreatif, inovatif, dan berani berpikir di luar kebiasaan. Mereka sering kali membawa perspektif segar dalam memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi bangsa. Kreativitas tersebut menjadi modal penting untuk memperbaharui pola pikir politik yang cenderung stagnan dan birokratis. Dengan keberanian dan keterbukaan mereka terhadap perubahan, generasi muda berpotensi menjadi daya dorong utama bagi transformasi politik ke arah yang lebih progresif dan berkeadilan.

Lebih jauh lagi, kemampuan generasi muda untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi juga memberikan keuntungan tersendiri dalam memperluas partisipasi politik. Melalui media digital dan platform sosial, mereka mampu menciptakan ruang diskusi politik yang dinamis dan interaktif, memperluas jangkauan advokasi, serta mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kebangsaan dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Jadi, kebebasan politik yang dijamin oleh ICCPR bukan hanya memberikan hak formal bagi pemuda untuk terlibat, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk menjadi penggerak perubahan sosial-politik melalui pemanfaatan kreativitas, inovasi, dan teknologi modern.

Apabila generasi muda terus diberi ruang dan dukungan untuk mengembangkan potensi politiknya, maka masa depan demokrasi akan berada di tangan kelompok yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap keadilan, keterbukaan, dan kemanusiaan.

Jika kita menilik sejarah perjuangan bangsa Indonesia, jelas terlihat bahwa peran pemuda selalu menjadi faktor penentu dalam perubahan politik dan arah perjalanan negara. Sejak awal perjuangan merebut kemerdekaan, pemuda tidak hanya menjadi pelengkap kekuatan bangsa, tetapi justru menjadi motor penggerak yang berani mengambil risiko. Perbedaan sikap antara golongan muda dan golongan tua menjelang Proklamasi Kemerdekaan pada 1945 menjadi bukti nyata keberanian dan ketegasan pemuda dalam memperjuangkan kedaulatan tanpa kompromi terhadap pengaruh luar, dalam hal ini propaganda Jepang. Peristiwa Rengasdengklok, di mana Soekarno dan Hatta "diculik" untuk mempercepat Proklamasi, menunjukkan bahwa generasi muda tidak pasif menunggu arahan, melainkan berani memaksa diambilnya keputusan politik yang tepat demi kepentingan bangsa.

Tidak berhenti di situ saja, jejak heroisme politik pemuda juga terpatri pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatukan tekad kebangsaan dan menjadi landasan ideologis menuju kemerdekaan. Peran aktif mereka dalam berbagai organisasi pergerakan nasional, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Serikat Islam, membuktikan bahwa pemuda sejak awal telah menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik. Sejarah pun mencatat, pada 1998, mahasiswa dan pemuda kembali tampil di garis depan menuntut perubahan hingga lahirnya Reformasi. Aksi mereka tidak hanya mengakhiri kekuasaan Orde Baru yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade, tetapi juga membuka era baru demokrasi yang lebih terbuka, di mana kebebasan berpendapat dan partisipasi politik rakyat dilindungi secara lebih kuat.

Namun, ironi muncul pada era Reformasi yang seharusnya menjadi ruang emas bagi keterlibatan pemuda. Meskipun kebebasan politik semakin dijamin, partisipasi generasi muda dalam politik

formal seringkali dianggap belum optimal. Banyak politikus muda masih dipandang sebelah mata dan dinilai belum mampu menandingi pengalaman generasi terdahulu. Persepsi ini kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari stigma kurangnya kematangan dalam menghadapi kompleksitas politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan jaringan politik, hingga dominasi elit lama yang enggan memberi ruang bagi regenerasi kepemimpinan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki pemuda dengan realitas politik yang mereka hadapi. Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa di setiap momentum krusial bangsa, pemuda selalu tampil sebagai agen perubahan yang efektif. Tantangannya kini adalah bagaimana mengubah persepsi publik dan struktur politik agar generasi muda dapat mengambil peran strategis dalam sistem demokrasi tanpa dibebani stigma ketidakmampuan. Sebab, jika ruang politik terus terbuka dan dukungan diberikan, generasi muda memiliki peluang besar untuk mengulang sejarah: menjadi penggerak utama perubahan sosial-politik demi terwujudnya tata kelola negara yang lebih visioner, adil, dan berpihak pada rakyat.

Guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap politikus muda, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan citra individu, tetapi juga pada pembentukan sistem politik yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif bagi generasi muda. Strategi ini penting agar partisipasi pemuda dalam politik tidak berhenti di ranah simbolik, melainkan berkembang menjadi kekuatan nyata yang memberikan kontribusi substantif terhadap pembangunan bangsa. Langkah-langkah tersebut diantaraya yakni Zulfa, A. N., Sari, E. P. P., & Trisiana, A. (2019). Dalton, R. J. (2020) Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). ;

1. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas intelektual dan moral politik generasi muda. Politik tidak hanya menuntut keberanian dan semangat, tetapi juga pengetahuan mendalam tentang tata kelola pemerintahan, hukum, ekonomi, dan sosial. Pemuda harus memiliki pemahaman yang kuat tentang

etika politik agar dapat menjadi panutan dalam memperjuangkan kepentingan publik dengan integritas. Pendidikan politik yang terstruktur, pelatihan kepemimpinan, serta pengalaman langsung dalam organisasi masyarakat atau pemerintahan akan membekali mereka kemampuan teknokratis sekaligus karakter yang bijak.

2. Langkah kedua adalah memanfaatkan teknologi digital untuk membangun citra dan komunikasi politik yang transparan. Generasi muda memiliki keunggulan alami dalam penguasaan teknologi dan media sosial. Potensi ini dapat digunakan untuk menciptakan model komunikasi politik yang jujur, terbuka, dan interaktif dengan masyarakat. Melalui media digital, politikus muda dapat menyampaikan gagasan, menjelaskan program kerja, serta membuka ruang dialog dua arah yang membangun kepercayaan publik. Transparansi dan konsistensi dalam komunikasi politik akan membantu membangun reputasi positif di mata masyarakat.
3. Langkah ketiga adalah pentingnya kolaborasi lintas generasi. Politik seharusnya tidak dipandang sebagai arena persaingan antara yang muda dan yang tua, melainkan sebagai ruang kolaboratif untuk saling melengkapi. Pemuda dengan ide-idenya yang kreatif dan progresif dapat berperan sebagai katalis perubahan, sementara generasi senior dengan pengalaman politik yang panjang dapat menjadi pembimbing. Sinergi lintas generasi semacam ini akan memperkuat legitimasi politikus muda sekaligus mempercepat proses regenerasi kepemimpinan nasional yang sehat.
4. Langkah keempat adalah konsistensi dalam tindakan dan rekam jejak publik. Salah satu faktor yang menumbuhkan skeptisisme masyarakat terhadap politikus muda adalah keraguan mengenai komitmen mereka terhadap nilai-nilai idealisme begitu berhadapan dengan praktik kekuasaan. Oleh karena itu, generasi muda harus mampu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan,

menolak politik uang, serta berani bersikap dalam hal moralitas kebangsaan. Pembuktian ini tidak harus dilakukan melalui jabatan formal; karya nyata di masyarakat, advokasi sosial, dan keterlibatan dalam kebijakan publik juga merupakan bentuk kontribusi politik yang valid.

5. Langkah kelima, perlu adanya dukungan institusional dari negara dan partai politik. Pemerintah dapat menyediakan mekanisme partisipasi politik yang lebih inklusif bagi anak muda, seperti kuota keterwakilan pemuda dalam parlemen dan kebijakan afirmatif di bidang politik. Partai politik pun harus berperan sebagai sekolah kepemimpinan, bukan sekadar alat perebut kekuasaan. Dengan membuka ruang kaderisasi yang transparan bagi generasi muda, kepercayaan publik terhadap wajah baru politik akan tumbuh secara alami.

Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka politikus muda dapat menjadi simbol harapan baru bagi bangsa. Mereka bukan hanya pewaris tanggung jawab politik generasi terdahulu, melainkan juga pembawa nilai-nilai baru yang memperkaya demokrasi: kejujuran, keterbukaan, kreativitas, dan keberanian moral. Semua itu pada akhirnya akan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa perubahan sejati dapat lahir dari generasi muda yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

3. Dukungan Teknologi dalam Partisipasi Politik

Peran teknologi digital dalam memperkuat partisipasi politik generasi muda menjadi salah satu fenomena penting dalam perkembangan demokrasi modern (Hidayah et al, 2024). Di era digital, batasan ruang dan waktu dalam berpolitik kian melebur. Platform daring seperti media sosial, forum diskusi, serta portal berita digital telah membuka akses informasi politik yang luas bagi siapa pun, terutama generasi muda. Melalui ruang digital inilah, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor aktif yang mampu menciptakan narasi, menyebarkan ide, serta memengaruhi

opini publik terhadap isu-isu kebangsaan dan global.

Menurut Shakira & Najicha pada tahun 2023, teknologi digital memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses politik secara lebih terbuka, transparan, dan kreatif. Melalui media sosial, mereka dapat melakukan sosialisasi gagasan, menggalang dukungan publik, bahkan mengorganisir gerakan sosial yang mendorong perubahan kebijakan. Contohnya, kampanye politik kini tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga melalui tagar, petisi online, dan konten edukatif yang dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi instrumen baru bagi generasi muda untuk mewujudkan partisipasi politik yang lebih luas dan dinamis.

Selain sebagai sarana komunikasi, teknologi digital juga meningkatkan literasi politik dan kesadaran kritis di kalangan anak muda. Akses terhadap informasi politik, baik nasional maupun internasional, membuat mereka lebih mudah memahami dinamika pemerintahan, kebijakan publik, serta isu-isu sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, peningkatan akses informasi ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas pemahaman. Tantangan utama yang muncul adalah maraknya disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik di dunia maya. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan menggunakan media secara bertanggung jawab menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki generasi muda agar teknologi benar-benar dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya.

Teknologi digital juga dapat menjadi sarana regenerasi kepemimpinan. Melalui berbagai inisiatif daring seperti pelatihan politik virtual, forum kebijakan digital, atau wadah kolaborasi lintas daerah, generasi muda dapat mengembangkan kapasitas kepemimpinan serta memperluas jejaring politiknya tanpa harus terikat pada struktur formal yang kaku. Dengan dukungan teknologi, kepemimpinan politik masa depan dapat tumbuh dari bawah (*grassroots leadership*), di mana ide, kreativitas, dan kolaborasi menjadi fondasi utama perubahan sosial.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam politik harus dibarengi dengan penegakan etika digital. Generasi muda perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya tetap memiliki batas moral dan hukum (Ridha et al, 2025). Penyebaran hoaks, politik identitas, serta sikap intoleran justru dapat merusak esensi politik digital sebagai sarana pemberdayaan dan partisipasi demokratis. Oleh karenanya, keberhasilan politik digital bukan hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh karakter dan kesadaran pengguna dalam memaknai teknologi sebagai alat perjuangan intelektual dan sosial.

Pada akhirnya, teknologi digital memberi peluang luar biasa bagi generasi muda untuk menjadi motor penggerak politik yang cerdas dan progresif. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, mereka dapat memperkuat transparansi pemerintahan, memperluas ruang partisipasi publik, serta menanamkan nilai-nilai demokrasi yang adaptif terhadap zaman. Generasi muda yang melek digital bukan hanya menjadi penonton perubahan, tetapi pelaku utama dalam membangun masa depan politik yang lebih terbuka, kritis, dan berkeadilan.

C. PERAN PENDIDIKAN POLITIK

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran, etika, dan karakter politik. Dalam konteks demokrasi modern yang menuntut keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, menurut Mulia (2024) pendidikan politik diperlukan agar partisipasi politik tidak hanya bersifat emosional dan reaktif, melainkan rasional, beretika, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Melalui pendidikan politik seseorang dapat memahami bahwa politik tidak semata soal kekuasaan, melainkan juga tentang tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan bangsa.

Pendidikan politik yang baik harus dimulai sejak dini dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Di lingkungan pendidikan formal, misalnya, sekolah dan universitas dapat mengintegrasikan nilai-nilai politik dan kewarganegaraan dalam pembelajaran yang kontekstual, bukan hanya melalui teori tetapi

juga melalui praktik diskusi publik, debat, simulasi parlemen, hingga kegiatan organisasi siswa. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana latihan bagi generasi muda untuk mengenal mekanisme demokrasi, menghormati perbedaan pendapat, serta belajar menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang damai dan beradab. Jadi, pendidikan politik bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan kepribadian sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, empati, dan solidaritas.

Di luar lembaga pendidikan formal, peran komunitas dan lembaga sosial juga sangat penting untuk memperluas cakupan pendidikan politik. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas berbasis digital dapat berperan sebagai wadah pembelajaran politik yang dinamis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui kampanye digital tentang etika bermedia sosial, pelatihan kepemimpinan publik, atau forum diskusi kewarganegaraan. Kegiatan semacam ini tidak hanya memperkuat kesadaran politik, tetapi juga membentuk budaya dialog yang sehat di masyarakat.

Pendidikan politik juga harus menanamkan nilai-nilai etika politik yang menjadi dasar bagi perilaku individu di ruang publik. Etika politik meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum. Generasi muda yang memahami dan mempraktikkan nilai-nilai ini akan lebih siap menghadapi tantangan politik tanpa terjebak pada pragmatisme dan kepentingan jangka pendek. Dalam jangka panjang, penerapan etika politik ini akan membantu memperbaiki budaya politik bangsa yang selama ini sering diwarnai oleh korupsi, politik uang, dan manipulasi kekuasaan (Bakry et al, 2024).

Pendidikan politik berperan dalam membangun identitas kebangsaan yang kuat di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi (Nurhasanah et al, 2024). Di era digital, generasi muda sering kali terpapar berbagai pandangan politik global yang bisa memengaruhi perspektif nasionalisme mereka. Dengan pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, generasi muda akan lebih

memahami jati dirinya sebagai warga negara Indonesia, menghargai perbedaan, dan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan bangsa.

Apabila berbicara tentang pendidikan politikpenting untuk memahami bahwa proses ini tidak hanya terjadi di ruang kelas atau dalam forum resmi, melainkan juga berlangsung dalam setiap lini kehidupan sosial. Menurut Bashori (2018) Pendidikan politik sejatinya merupakan bagian dari pembentukan kesadaran kewarganegaraan yang dapat dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Di dalam keluarga, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat terhadap perbedaan pendapat, serta kepedulian terhadap sesama diajarkan secara sederhana, namun memiliki dampak besar dalam membentuk karakter politik seseorang di masa depan. Keluarga menjadi lingkungan pendidikan politik awal yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika sosial fondasi penting bagi seseorang sebelum terjun dalam dunia politik yang penuh dinamika.

Lingkup berikutnya adalah lingkungan masyarakat, di mana pendidikan politik berkembang melalui interaksi sosial dan partisipasi dalam kegiatan publik. Melalui keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, kegiatan gotong royong, atau forum diskusi warga, individu belajar memahami arti tanggung jawab kolektif, kepemimpinan, serta mekanisme pengambilan keputusan bersama. Di sini, pendidikan politik hadir secara lebih praktis mendidik masyarakat agar mampu menyampaikan aspirasi dengan bijak, mengawasi kebijakan publik, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hukum. Masyarakat menjadi sekolah politik yang hidup, tempat di mana warga negara belajar menjadi aktor sosial yang aktif, kritis, dan konstruktif.

Selanjutnya di institusi pendidikan baik formal seperti sekolah dan universitas, maupun non-formal seperti pelatihan kepemimpinan dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman politik secara ilmiah dan sistematis. Sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Kartono (1996:64), pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan yang disengaja dan terencana untuk membentuk individu agar mampu bertanggung jawab secara moral

dan etis dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Artinya, pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap yang berlandaskan nilai etika dan keadilan sosial. Sementara itu, Rusadi Kantaprawira (1998:54) menegaskan bahwa pendidikan politik bertujuan meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka mampu berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pandangan ini menekankan pentingnya keterlibatan warga sebagai inti dari sistem demokrasi: rakyat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek yang aktif menentukan arah bangsa.

Kesadaran politik generasi muda merupakan kunci keberlangsungan dan kualitas demokrasi suatu bangsa. Tanpa pemuda yang memiliki pemahaman mendalam tentang politik dan tanggung jawab kewarganegaraan, demokrasi akan kehilangan daya hidupnya (Cahyati, B.S et al, 2024). Generasi muda bukan sekadar penerus, tetapi juga pembaharu yang menentukan arah politik masa depan. Oleh karena itu, membangun kesadaran politik di kalangan pemuda berarti menanamkan kesadaran moral, kritis, dan nasionalistik yang mampu menjaga kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan arus informasi, generasi muda dihadapkan pada banyak pilihan serta tantangan dalam memahami politik. Informasi yang cepat dan masif bisa menjadi sarana pembelajaran, namun juga dapat menimbulkan kebingungan apabila tidak disertai kemampuan berpikir kritis. Karena itu, kesadaran politik bukan hanya soal mengetahui isu-isu politik, melainkan juga kemampuan memilah informasi, memahami konteks kebijakan, serta menilai baik buruknya suatu tindakan politik secara objektif. Generasi muda yang sadar politik akan lebih bijak dalam mengekspresikan aspirasi, lebih rasional dalam mengambil sikap, dan lebih berani menegakkan nilai-nilai keadilan serta kebenaran.

Pendidikan politik yang komprehensif akan membantu generasi muda memahami bahwa setiap tindakan politik memiliki konsekuensi moral dan sosial. Dengan bekal pengetahuan, akhlak, dan etika politik

yang benar, mereka tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan yang menyesatkan. Lebih dari sekadar ikut serta, mereka akan menjadi pionir perubahan yang mendorong transparansi, keadilan, dan pemerintahan yang bersih. Pemuda yang sadar politik tidak hanya berpartisipasi saat momentum pemilihan umum atau demonstrasi, tetapi juga turut serta dalam proses pembangunan bangsa secara berkelanjutan melalui kegiatan sosial, advokasi kebijakan, atau inovasi yang berpihak pada masyarakat.

Maka dari itu, kesadaran politik generasi muda harus diletakkan sebagai fondasi pembangunan demokrasi Indonesia di masa depan. Demokrasi tidak akan berkembang hanya dengan lembaga dan aturan, tetapi juga membutuhkan manusia-manusia yang memahami makna kebebasan, tanggung jawab, dan keadilan. Semakin tinggi tingkat kesadaran politik pemuda, semakin kuat pula kualitas demokrasi yang dimiliki bangsa ini.

D. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pendidikan pada umumnya dipahami sebagai suatu proses pembimbingan dan pembelajaran yang diberikan oleh seseorang kepada individu lain untuk membantu pengembangan aspek intelektual, keterampilan, dan moral. Meskipun kerap diasosiasikan dengan proses belajar pada anak-anak, sejatinya pendidikan tidak terbatas hanya pada kelompok usia tertentu. Al Asadullah & Nurhalin (2021) menyatakan bahwa pendidikan dapat diberikan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, dengan tujuan utama untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan kecerdasan emosional, serta membentuk karakter yang berintegritas. Artinya, pendidikan bersifat universal dan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan manusia sepanjang hayat.

Secara etimologis, kata "pendidikan" memiliki akar yang dalam sejarah linguistik. Dalam bahasa Latin, istilah ini berasal dari kata *educare* atau *educere* (Nasarudin, N et al, 2024) yang berarti "mengeluarkan" atau "membawa keluar" potensi yang ada di dalam diri seseorang. Makna ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya

proses memasukkan informasi ke dalam pikiran, tetapi lebih sebagai upaya memfasilitasi individu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan alaminya. Dalam bahasa Inggris, istilah *to educate* dimaknai sebagai tindakan untuk memperbaiki moral dan melatih intelektual. Jadi, esensi pendidikan adalah proses yang bersifat membebaskan, memberdayakan, dan membentuk kepribadian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses atau cara mendidik yang mencakup pemberian latihan dan pembelajaran mengenai akhlak serta kecerdasan pikiran (Qodratillah, 2011:96). Proses ini tidak hanya berlangsung secara formal di sekolah, tetapi juga secara nonformal di lingkungan keluarga, masyarakat, dan berbagai institusi pembelajaran lainnya. Mendidik berarti membimbing, melatih, sekaligus mempengaruhi peserta didik agar mereka mampu berpikir logis, bersikap bijaksana, dan bertindak sesuai norma-norma sosial dan moral.

Pengertian pendidikan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Junaedi pada tahun (2019) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuannya mencakup pembentukan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang matang, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi ini menekankan bahwa pendidikan memiliki visi holistik yang mencakup pengembangan kemampuan intelektual sekaligus pembentukan nilai-nilai moral dan sosial.

Sejalan dengan itu, Abdullah (2007:15) menyatakan bahwa pendidikan merupakan mekanisme yang dibangun oleh masyarakat untuk membawa generasi muda mencapai tingkat kemajuan tertinggi dalam dirinya. Proses ini menghargai perbedaan bakat dan kemampuan setiap individu, sehingga pendidikan idealnya bersifat adaptif dan relevan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Artinya, pendidikan bukanlah proses menyeragamkan, melainkan

membimbing setiap individu agar dapat berkembang sesuai potensi uniknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah investasi terpenting bagi kemajuan sebuah bangsa. Ia tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, mengasah keterampilan, serta menanamkan nilai luhur yang akan menjadi pondasi kehidupan seseorang. Dalam konteks generasi muda Indonesia, pendidikan menjadi jalan utama untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, kreatif, berdaya saing global, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

E. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Fungsi dan tujuan pendidikan tidak hanya sebatas mencerdaskan individu dalam aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan watak, sikap moral, dan kesadaran sosial. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk menciptakan manusia yang utuh yakni individu yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, kuat secara spiritual, dan berintegritas dalam bertindak. Berikut penjelasan untuk fungsi dan tujuan pendidikan.

1. Fungsi Pendidikan

Secara umum, pendidikan memiliki beberapa fungsi utama yang saling berkaitan, yakni (Amaliyah & Rahmat, 2021):

a. Fungsi Pengembangan Potensi Diri

Pendidikan berfungsi membantu setiap individu mengenali potensi dirinya baik kemampuan intelektual, emosional, maupun kreatif agar dapat dikembangkan secara optimal. Melalui proses pendidikan, manusia dibimbing untuk menemukan jati diri dan diarahkan menjadi pribadi yang produktif serta mampu berkontribusi bagi masyarakat.

b. Fungsi Pembentukan Karakter dan Moral

Salah satu aspek terpenting dalam pendidikan adalah pembentukan moralitas dan etika sosial. Pendidikan yang sejati tidak hanya menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, toleransi, dan

kepedulian sosial. Inilah yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan "menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat".

c. Fungsi Sosialisasi dan Kebudayaan

Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, individu belajar mengenal identitas bangsa, memahami sejarah, serta menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang memperkuat persatuan nasional.

d. Fungsi Adaptasi dan Inovasi Sosial

Dalam masyarakat yang terus berkembang, pendidikan berperan membantu individu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pendidikan yang modern tidak hanya melestarikan nilai lama, tetapi juga mendorong inovasi untuk menciptakan solusi baru dalam menghadapi tantangan kehidupan.

2. Tujuan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah "mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab". Tujuan ini menggambarkan bahwa pendidikan di Indonesia bersifat holistik mengembangkan aspek jasmani, rohani, intelektual, dan sosial secara seimbang.

Lebih lanjut, tujuan pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memahami serta memecahkan masalah kehidupan.
b. Membentuk kepribadian yang bermoral, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan berkomitmen terhadap keadilan serta kebenaran.
c. Menghasilkan individu yang berdaya saing tinggi, kreatif, dan

inovatif guna menghadapi tantangan global.

d. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme sebagai wujud tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
e. Menyiapkan manusia Indonesia yang memiliki kesadaran politik dan sosial, yang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan bangsa.

Jadi, fungsi dan tujuan pendidikan saling melengkapi dalam membentuk insan yang cerdas sekaligus bermoral. Pendidikan bukan hanya menjadi alat untuk mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kemajuan peradaban bangsa. Masyarakat yang berpendidikan tinggi, beretika, dan sadar moral akan menjadi kekuatan utama untuk menciptakan sistem sosial dan politik yang adil, transparan, dan demokratis.

Ki Hadjar Dewantara, sebagai tokoh pelopor pendidikan nasional Indonesia, memberikan pandangan yang sangat mendalam tentang hakikat pendidikan yang masih relevan hingga saat ini. Bagi beliau, dalam Zuhdi (2014) pendidikan bukan semata proses intelektual atau akademis, tetapi adalah sebuah usaha menyeluruh yang menyentuh aspek budi pekerti (moral), pikiran (intelektual), dan jasmani (fisik). Pandangan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya manusia yang tidak hanya pintar dan cakap, tetapi juga berkarakter, beretika, serta mampu menyeimbangkan kehidupan pribadi, sosial, dan lingkungannya.

Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa pendidikan sejati harus mampu menghidupkan potensi anak agar tumbuh selaras dengan alam dan masyarakatnya, sehingga peserta didik menjadi individu yang merdeka berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial.

Gagasan Ki Hadjar Dewantara tersebut sangat sejalan dengan pandangan para ahli dan dasar-dasar hukum pendidikan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diartikan sebagai upaya sadar yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi

manusia mulai dari kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, hingga kecerdasan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk berkontribusi di masyarakat, bangsa, dan negara. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki dimensi yang luas dan bersifat integratif, karena tidak memisahkan antara aspek intelektual dan moral, melainkan menyatukannya dalam satu proses pembinaan nilai-nilai kemanusiaan.

Jika disimpulkan dari berbagai pandangan baik dari sisi etimologis, filosofis, maupun praktis pendidikan dapat dimaknai sebagai proses pelatihan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara komprehensif. Tujuannya adalah agar seseorang mampu mencapai taraf kemajuan tertinggi dalam dirinya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun budi pekerti. Pendidikan juga berperan penting sebagai sarana pembentukan karakter bangsa, di mana nilai-nilai spiritual, moralitas, dan sosial ditanamkan sebagai panduan dalam bertindak di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lebih jauh, Ki Hadjar Dewantara juga menempatkan pendidikan sebagai sarana pembebasan manusia. Beliau menekankan pentingnya prinsip "tut wuri handayani" memberikan dorongan dari belakang agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Nilai-nilai ini berimplikasi langsung pada pembentukan kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial yang sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi modern. Pendidikan bukan hanya untuk mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga untuk membangun warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, beretika dalam partisipasi sosial dan politik, serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi (Maulani et al, 2024).

Oleh sebab itu, pendidikan harus dilihat sebagai pilar utama dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Ia menjadi fondasi moral, intelektual, dan sosial bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan demokratis. Dengan pendidikan yang benar seperti yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara dan ditegaskan dalam kebijakan pendidikan nasional diharapkan akan lahir generasi muda yang tidak

hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga arif dalam bertindak, berdaya saing global, serta memiliki kesadaran politik dan kemanusiaan yang kuat demi kemajuan bangsa Indonesia.

F. PENGERTIAN POLITIK

Berbicara mengenai politik memang bukan hal yang asing bagi masyarakat, namun tidak semua orang memahami maknanya secara mendalam. Istilah politik sering kali diasosiasikan dengan partai politik, perebutan kekuasaan, atau jabatan pemerintahan, padahal sejatinya politik memiliki arti yang jauh lebih luas dan fundamental dalam kehidupan manusia. Politik tidak hanya menyangkut kekuasaan, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana manusia mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama.

Secara etimologis, kata "politik" berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti "kota" atau "negara kota". Dalam konteks kehidupan masyarakat Yunani Kuno, polis menggambarkan komunitas manusia yang hidup dalam suatu sistem pemerintahan dengan aturan, norma, dan lembaga yang mengatur kehidupan bersama. Dari istilah itulah muncul kata politike, yang berarti "hal-hal yang berkenaan dengan urusan warga negara." Jadi, pada dasarnya politik berhubungan dengan kegiatan manusia dalam mengatur dan mengelola kehidupan sosial agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

Di bahasa Arab, politik dikenal dengan istilah *siyasah*, yang berarti "mengatur, mengurus, atau memimpin sesuatu dengan kebijaksanaan." Makna ini menekankan pada aspek etika dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata *politics* berasal dari kata *politic*, yang secara harfiah berarti "cerdik" atau "bijaksana." Artinya, politik mengandung unsur kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan demi kepentingan masyarakat luas. Makna dari ketiga akar bahasa ini Yunani, Arab, dan Inggris pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu menempatkan politik sebagai seni dan ilmu dalam mengatur kehidupan bersama agar berjalan harmonis, adil, dan tertib.

Jika dilihat dari perspektif ilmiah, banyak para ahli memberikan definisi yang memperkuat pemahaman tersebut. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk mencapai kehidupan yang baik (*the good life*). Ia melihat politik sebagai aktivitas moral yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama, bukan semata-mata kekuasaan. Harold Laswell menegaskan politik sebagai *"who gets what, when, and how"* yaitu tentang bagaimana sumber daya publik dan kekuasaan didistribusikan dalam suatu masyarakat. Sedangkan Max Weber mendefinisikan politik sebagai upaya memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kolektif untuk mengatur kehidupan sosial berdasarkan nilai, kekuasaan, dan kepentingan bersama.

Dalam konteks sosial dan kenegaraan Indonesia, politik tidak hanya dimaknai sebagai bidang kekuasaan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, politik memiliki fungsi strategis sebagai alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Bagi generasi muda, memahami pengertian politik secara komprehensif menjadi sangat penting. Politik bukan sekadar arena pertarungan kepentingan, melainkan wadah pengabdian dan perjuangan moral untuk memperbaiki tatanan sosial dan membawa perubahan positif. Melalui pemahaman yang benar tentang politik, generasi muda dapat melihatnya sebagai sarana aktualisasi diri untuk menyalurkan ide, gagasan, dan inovasi dalam membangun masa depan bangsa.

Oleh karena itu, politik perlu dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia hadir dalam setiap aspek sosial, mulai dari pengambilan keputusan di lingkungan keluarga hingga dalam mengatur kebijakan publik di tingkat negara. Makna

sejati politik terletak pada bagaimana manusia dapat menggunakan kebijaksanaan dan etika dalam mengelola kekuasaan demi terciptanya tatanan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

Jika diamati secara mendalam, politik memang tidak dapat dipisahkan dari ranah dan lingkup negara. Membicarakan politik berarti sekaligus membicarakan urusan kenegaraan, mulai dari permasalahan internal negara hingga hubungan dengan pihak internasional. Politik mencakup berbagai dimensi penting seperti gagasan dasar, asas, sejarah pembentukan negara, bentuk dan tujuan negara, hakikat kekuasaan, peran kelompok penekan (*pressure group*), kelompok berkepentingan (*interest group*), elite politik, pendapat umum, serta peranan partai politik dan penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU). Semua ini menunjukkan bahwa politik adalah satu kesatuan pengetahuan yang mengkaji bagaimana suatu negara dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan sesuai prinsip-prinsip konstitusional.

Sedangkan secara kebahasaan dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan politik sebagai "pengetahuan tentang ketatanegaraan yang menyangkut sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan." Makna lainnya menunjukkan bahwa politik berkaitan dengan semua urusan pemerintahan negara, hubungan antarnegara, atau cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah (Qodratillah, 2011: 421). Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa politik tidak terbatas pada teori belaka, tetapi juga menyangkut praktik sehari-hari yang terkait langsung dengan kehidupan bernegara.

Banyak ahli memandang bahwa kekuasaan adalah inti dari politik, sehingga wajar apabila aktivitas politik sering dikaitkan dengan proses memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan semata-mata tentang dominasi, melainkan kemampuan untuk membuat keputusan dan mengarahkan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, perebutan dan penggunaan kekuasaan dilakukan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan partisipatif, seperti melalui kajian publik, debat kebijakan, musyawarah, dan pemilihan umum (PEMILU).

Berbicara mengenai politik, maka politik terbagi menjadi dua jenis utama (Pureklolon, 2016), yakni:

1. Politik teori

Politik teori memfokuskan kajian pada asas, ideologi, dan ciri khas suatu negara tanpa masuk ke rincian teknis aktivitas yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Ia bersifat normatif, memuat pandangan filosofis dan konseptual tentang apa yang sebaiknya menjadi tujuan serta nilai-nilai yang dianut sebuah negara.

2. Politik praktis.

politik praktis mempelajari bagaimana negara beroperasi sebagai lembaga yang bergerak untuk mencapai fungsi dan tujuannya. Politik praktis melihat negara sebagai entitas dinamis, yang menjalankan berbagai peran di bidang pemerintahan, legislasi, yudikasi, ekonomi, dan hubungan internasional. Politik praktis melibatkan tindakan nyata mulai dari pengambilan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, hingga diplomasi internasional yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan mandat konstitusi.

Dengan memahami ruang lingkup politik secara teoritis dan praktis, kita dapat melihat bahwa politik adalah mekanisme integral yang menghubungkan gagasan dan asas negara dengan tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menjadi dasar penting bagi generasi muda agar tidak hanya memahami politik sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang menentukan arah masa depan suatu bangsa.

3. Pengertian Politik Sebagai Suatu Ilmu

Politik sebagai ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempelajari prinsip, struktur, dan dinamika kekuasaan dalam suatu sistem pemerintahan. Prof. Miriam Budiardjo (2003) menjelaskan bahwa politik mencakup berbagai kegiatan dalam sistem politik (negara) yang berkaitan dengan penentuan tujuan dari sistem tersebut serta cara untuk mencapainya. Artinya, politik tidak semata berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan digunakan secara sah dan efektif untuk mencapai kepentingan bersama.

Sebagai ilmu, politik berusaha menjawab berbagai pertanyaan mendasar seperti: bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan, siapa yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan, serta bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Ilmu politik juga mempelajari hubungan antara rakyat dan pemerintah, bentuk-bentuk pemerintahan, sistem partai, perilaku politik, serta tata nilai yang mendasari legitimasi kekuasaan. Jadi, ilmu politik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki manfaat praktis dalam membantu memahami realitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara rasional dan objektif.

4. Pengertian Politik Sebagai Suatu Kegiatan

Politik sebagai kegiatan erat kaitannya dengan tindakan nyata atau praktik berpolitik dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Kata "berpolitik" sendiri berasal dari imbuhan "ber-" yang menunjukkan suatu aktivitas, sehingga berpolitik dapat dimaknai sebagai kegiatan atau usaha untuk memperoleh, menggunakan, serta mempertahankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Politik tidak hanya dijalankan oleh pejabat atau partai politik, tetapi oleh setiap warga negara yang berpartisipasi dalam proses sosial dan politik. Kegiatan politik dapat berupa memberikan suara dalam pemilu, ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan, menyampaikan aspirasi publik, atau melakukan advokasi kebijakan. Seperti dijelaskan oleh David Easton dalam bukunya *The Political System*, kehidupan politik mencakup berbagai aktivitas yang berpengaruh terhadap kebijakan publik yang dibuat dan dijalankan oleh pihak yang berwenang, serta bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi dengan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, politik sebagai kegiatan merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan sosialnya.

5. Pengertian Politik Sebagai Suatu Kebijaksanaan (Policy)

Politik sebagai kebijaksanaan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan, keputusan, dan strategi yang diambil oleh individu, kelompok,

atau pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang bijaksana dan efektif. Istilah ini mengacu pada praktik politik yang berorientasi pada *problem solving* yakni bagaimana kekuasaan digunakan untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Politik bukan hanya alat untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common good*). Pemerintah, misalnya, menerapkan kebijakan ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan yang menjadi bentuk nyata dari implementasi politik sebagai kebijaksanaan. Politik dalam makna ini menuntut kemampuan berpikir strategis, etika publik yang tinggi, serta kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif.

Berdasarkan 3 (tiga) pengertian politik diatas dapat dipahami bahwa politik memiliki dimensi yang luas dan saling berhubungan. Politik sebagai ilmu memberikan landasan pengetahuan; politik sebagai kegiatan melibatkan tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat; sedangkan politik sebagai kebijaksanaan menuntut penerapan prinsip moral dan logika rasional dalam proses pengambilan keputusan publik. Ketiganya sekaligus membangun pemahaman bahwa politik bukan hanya persoalan kekuasaan atau kepentingan, tetapi juga soal tanggung jawab, pengabdian, dan kemampuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama secara berkeadilan dan beretika.

G. UNSUR-UNSUR DAN FUNGSI POLITIK

Politik, sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan serta fungsi-fungsi yang menentukan bagaimana sistem politik berjalan dan berpengaruh terhadap masyarakat. Unsur-unsur tersebut menggambarkan komponen dasar yang membentuk struktur politik, sedangkan fungsi politik menjelaskan peran yang dimainkan politik dalam menjaga kestabilan, arah, dan dinamika kehidupan negara.

1. Unsur-unsur Politik

Unsur politik terdiri atas beberapa komponen utama yang berinteraksi dalam suatu sistem untuk mewujudkan tujuan bersama suatu negara. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Kekuasaan dan Kewenangan

Kekuasaan merupakan inti dari politik karena berkaitan dengan kemampuan individu atau lembaga dalam memengaruhi orang lain dan membuat keputusan yang mengikat (Maliki, 2018). Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang sah dan diakui berdasarkan hukum atau norma yang berlaku. Dalam konteks kenegaraan, kekuasaan dan kewenangan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan dan ketertiban.

b. Pemerintah dan Lembaga Negara

Pemerintah merupakan lembaga atau sistem yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan negara dan melaksanakan kebijakan publik (Resmadiktia et al, 2023). Di Indonesia, lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah contoh representatif dari unsur pemerintahan yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan nasional.

c. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan

Partai politik menjadi sarana utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus proses rekrutmen politik bagi calon pemimpin bangsa. Sementara itu, kelompok kepentingan (*interest groups*) dan kelompok penekan (*pressure groups*) juga memiliki peran besar dalam memengaruhi kebijakan negara melalui advokasi, opini publik, dan gerakan sosial.

d. Rakyat atau Warga Negara

Febrianasari (2022) menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi, partisipasi aktif warga negara dalam proses politik merupakan unsur yang paling vital. Melalui hak pilih, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, serta kontrol sosial terhadap pemerintah, rakyat menjadi bagian integral dari sistem politik yang sehat.

e. Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang panjang, mencakup perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah sosial. Kebijakan publik menunjukkan

orientasi bagaimana kekuasaan digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan bersama.

2. Fungsi Politik

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik memiliki fungsi yang sangat luas, tidak hanya dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam dinamika sosial. Merujuk pada buku Sistem Politik Indonesia karya Anggara (2013) fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengambil Keputusan dan Penetapan Tujuan Negara

Salah satu fungsi utama politik adalah menentukan arah kebijakan dan visi pembangunan negara. Melalui lembaga politik dan mekanisme demokratis, para pemimpin dan perwakilan rakyat menetapkan tujuan nasional yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

b. Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya

Politik berfungsi mengatur pembagian kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya negara agar tidak terpusat pada satu pihak. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan pemerataan kesejahteraan.

c. Pemersatu dan Pengendali Sosial

Melalui hukum, kebijakan, dan komunikasi politik, politik berperan sebagai alat pengendali sosial untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik. Di sisi lain, politik juga menjadi sarana pemersatu yang mengikat berbagai elemen bangsa dengan nilai-nilai konstitusi dan cita-cita nasional.

d. Pendidikan dan Partisipasi Politik

Politik memiliki peran mendidik masyarakat agar memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partisipasi politik yang aktif dan sehat mendorong terciptanya masyarakat yang sadar hukum, kritis terhadap kebijakan, dan ikut serta dalam proses pembangunan demokrasi.

e. Transformasi dan Pembangunan Sosial

Dalam fungsi ini, politik dipahami sebagai sarana perubahan sosial yang damai. Melalui proses politik yang baik, masyarakat dapat

memperjuangkan keadilan sosial, reformasi sistem, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Berdasarkan penjelasan unsur dan fungsi politik di atas, dapat disimpulkan bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan warga negara. Ia berfungsi bukan hanya untuk mengelola kekuasaan, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadaban. Politik yang sehat akan melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, memperkuat demokrasi, serta menumbuhkan kesadaran bahwa kekuasaan sejati bukan untuk menguasai, melainkan untuk melayani.

H. PENDIDIKAN POLITIK

Pendidikan politik merupakan bagian integral dari proses pembentukan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi (Rista & Wiranata, 2024). Sebagaimana halnya pendidikan pada umumnya, pendidikan politik adalah suatu usaha sadar, terencana, dan sistematis untuk membentuk individu agar memiliki wawasan, sikap, dan perilaku politik yang bertanggung jawab secara moral dan sosial (Kartono, 1996:64). Melalui pendidikan politik, seseorang diharapkan tidak hanya memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam berbagai kegiatan politik yang bersifat konstitusional, beretika, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Pendidikan politik berperan bukan sekadar memberikan pengetahuan tentang politik, partai, atau pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti kejujuran, toleransi, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan politik menjadi sarana penting untuk mencegah munculnya apatisme politik dan perilaku menyimpang dalam partisipasi publik. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat dapat memahami peran mereka sebagai pengawas kekuasaan, penyalur aspirasi, dan penggerak perubahan sosial yang konstruktif.

Dalam terminologi bahasa Inggris, pendidikan politik sering dikaitkan dengan konsep *political socialization* atau sosialisasi politik. Istilah ini digunakan karena secara esensial, kedua konsep tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sosialisasi politik merupakan proses di mana seseorang belajar, mengenal, dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, serta orientasi politik yang berlaku dalam masyarakat (Prayugo & Prayitno, 2022). Melalui proses ini, individu mendapatkan pemahaman tentang bagaimana sistem politik berjalan, siapa yang memiliki wewenang, bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi di dalamnya.

Dikatakan bahwa "pendidikan politik" dan "sosialisasi politik" memiliki makna yang hampir identik karena keduanya sama-sama berorientasi pada pembentukan kesadaran politik individu. Perbedaannya terletak pada pendekatan: pendidikan politik bersifat lebih terarah, formal, dan sistematis, seperti proses belajar yang dilakukan melalui lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau kegiatan pelatihan politik. Sementara itu, sosialisasi politik cenderung berlangsung alami dan informal, melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, keluarga, media massa, hingga peristiwa politik yang disaksikan secara langsung.

Artinya, pendidikan politik dapat disebut sebagai bagian dari proses sosialisasi politik yang bersifat lebih intensif, terarah, dan bertujuan membentuk pribadi warga negara yang berintegritas serta memiliki kesadaran moral dalam kehidupan berpolitik. Melalui pendidikan politik, diharapkan individu tidak hanya menjadi peserta pasif dalam politik, melainkan menjadi aktor yang mampu berpikir kritis, menilai kebijakan secara objektif, dan mengambil peran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alfian (1981:235) memandang pendidikan politik sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana agar masyarakat mampu memahami, mengenal, serta menghayati nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang dianut oleh suatu bangsa. Pandangan ini menegaskan bahwa pendidikan politik bukan sekadar

memberikan pengetahuan tentang politik secara konseptual, tetapi juga menanamkan kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan politik, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, partisipasi, dan penghormatan terhadap hukum. Melalui pendidikan politik, masyarakat dibimbing untuk tidak hanya menjadi pengamat, melainkan juga peserta aktif yang memiliki visi moral dan kesadaran etis dalam setiap tindakan politiknya.

Dari berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu memahami struktur, fungsi, dan nilai-nilai ideal dalam sistem politik secara mendalam. Pengetahuan ini penting agar saat mereka berpartisipasi sebagai warga negara, tindakan politik yang dilakukan bukan hanya dilandasi oleh kepentingan pribadi atau emosi sesaat, tetapi juga oleh tanggung jawab moral sebagai bagian dari komunitas politik yang lebih besar. Pendidikan politik berfungsi menumbuhkan kesadaran kritis agar masyarakat dapat menilai kebijakan secara objektif, menghormati perbedaan pendapat, dan terlibat dalam proses pembangunan politik yang sehat dan demokratis.

Menurut Kartini Kartono (1996:57–68), terdapat dua aspek penting dalam pendidikan politik, yaitu fungsi dan tujuan.

1. Fungsi Pendidikan Politik

Fungsi utama pendidikan politik adalah memberikan kontribusi besar terhadap proses demokrasi yang semakin matang dan realistis. Pendidikan politik berperan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, serta menumbuhkan kesadaran hukum dalam berpolitik. Dalam praktiknya, pendidikan politik menjadi media untuk:

a. Membentuk masyarakat yang sadar hukum dan etika politik, sehingga tindakan mereka senantiasa sesuai dengan prinsip keadilan dan tertib sosial.
b. Menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial agar demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

c. Menguatkan partisipasi politik masyarakat yang rasional dan berorientasi pada kemajuan bersama, bukan pada manipulasi kekuasaan.

Dengan kata lain bisa disimpulkan pendidikan politik berfungsi memperdalam praktik demokrasi yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip realistik dan hukum yang berlaku, sebagaimana ditegaskan Kartini Kartono, dengan menempatkan manusia sebagai subjek yang berpikir, beretika, dan berkeadilan.

I. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan utama pendidikan politik adalah membentuk warga negara yang sadar politik, memahami makna demokrasi, dan mampu berperan aktif dalam sistem politik tanpa melupakan nilai-nilai dasar kebangsaan (Pasaribu, 2017) Tujuan ini mencakup beberapa aspek penting:

a. Pemahaman politik yang luas, agar masyarakat mengetahui sistem politik, struktur pemerintahan, mekanisme kebijakan publik, serta hak-hak politik mereka.
b. Sikap tegas terhadap politik, yakni kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, menilai kinerja politik dengan objektif, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu atau propaganda yang menyesatkan.
c. Kemampuan beraktivitas politik secara demokratis, dengan mengedepankan nilai-nilai dialog, musyawarah, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
d. Pelestarian nilai-nilai dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi pedoman moral dan ideologis dalam kehidupan politik.
e. Peningkatan partisipasi politik aktif, agar masyarakat dapat saling melengkapi dalam proses politik sesuai dengan bakat, bidang, dan kemampuan masing-masing baik melalui kegiatan sosial, organisasi, maupun lembaga kenegaraan.

Berdasarkan fungsi dan tujuan yang sudah disampaikan diatas maka bisa dikatakan bahwa pendidikan politik dalam hal fungsi dan perannya berperan sebagai pilar utama dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat. Pendidikan politik menuntun rakyat untuk tidak sekadar menjadi pemilih rutin dalam pemilu, tetapi menjadi warga negara yang kritis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Politik yang dijalankan dengan pemahaman moral dan tanggung jawab sosial akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

J. Peranan Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Demokratis Dan Penguatan Karakter Bangsa

Pendidikan politik memiliki peranan penting dalam mengokohkan sendi-sendi demokrasi dan membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Demokrasi yang sejati tidak dapat tumbuh hanya dengan keberadaan sistem atau institusi politik yang formal, melainkan harus didukung oleh masyarakat yang memahami nilai-nilai demokrasi dan memiliki kesadaran untuk menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah peran pendidikan politik menjadi sangat strategis ia berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan moralitas, pemahaman, dan tanggung jawab politik kepada setiap warga negara.

Dalam kehidupan demokratis, pendidikan politik berperan menciptakan masyarakat yang melek politik atau *politically literate*. Artinya, masyarakat tidak hanya sekadar tahu tentang proses pemilihan umum atau kebijakan pemerintah, tetapi juga memahami bagaimana hak dan kewajiban politik harus dijalankan secara seimbang. Pendidikan politik menumbuhkan kesadaran bahwa kekuasaan dalam sistem demokrasi adalah milik rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Dengan pengetahuan yang benar, masyarakat dapat berpartisipasi aktif secara sehat berani mengkritisi kebijakan publik, namun tetap santun dan berlandaskan hukum dalam menyampaikan aspirasi.

Peranan lain dari pendidikan politik adalah membentuk karakter politik yang beretika dan berkepribadian kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,

semangat gotong royong, dan rasa cinta tanah air. Pendidikan politik menanamkan pemahaman bahwa politik yang baik bukan tentang perebutan kekuasaan semata, tetapi tentang pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Dengan nilai moral-politik yang kuat, seseorang tidak mudah terjerumus dalam praktik politik negatif seperti korupsi, politik uang, penyalahgunaan wewenang, atau penyebaran kebencian.

Selain itu, pendidikan politik juga berperan penting dalam memperkuat partisipasi politik generasi muda. Menurut Althafullaya (2024) kaum muda merupakan tulang punggung masa depan bangsa yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Melalui pendidikan politik yang baik, mereka diarahkan untuk memahami makna politik dalam arti positif sebagai wadah perjuangan untuk memperjuangkan ide-ide baru yang inovatif dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kesadaran politik generasi muda sangat penting untuk melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang berwawasan luas, berjiwa nasionalis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Peranan pendidikan politik juga tampak dalam upaya membangun budaya dialog dan toleransi dalam politik. Pendidikan politik menanamkan kebiasaan berpikir terbuka, menghargai perbedaan, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Dalam sistem demokrasi, keberagaman pandangan bukan ancaman, tetapi kekuatan yang jika dikelola dengan baik akan memperkaya kehidupan politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat belajar bahwa berpolitik tidak harus saling menjatuhkan, melainkan bekerja sama dalam perbedaan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar (Sutrisman, 2019).

Selain itu, pendidikan politik juga berperan dalam mencegah krisis moral dan disorientasi politik yang sering muncul akibat rendahnya literasi politik masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik, masyarakat akan lebih tahan terhadap propaganda, manipulasi isu, dan provokasi yang dapat mengancam stabilitas negara. Pendidikan politik membekali warga dengan kemampuan berpikir kritis dan moral yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh

oleh kepentingan jangka pendek atau politik praktis yang merugikan negara.

Artinya bisa juga dikatakan bahwa pendidikan politik bukan hanya bentuk pengajaran tentang sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan proses pembentukan manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan beretika dalam menjalankan perannya sebagai warga negara. Ia menjadi fondasi utama dalam memperkuat demokrasi yang substansial, yaitu demokrasi yang hidup dalam kesadaran rakyat, bukan sekadar prosedur formal. Melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, bangsa Indonesia akan mampu melahirkan masyarakat madani yang cerdas, berakhlak, serta memiliki komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan persatuan nasional.

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Melalui proses pendidikan, masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan formal, tetapi juga dibentuk sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan prinsip moral, etika, dan kebangsaan yang luhur.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, politik bukan hanya persoalan perebutan kekuasaan semata, melainkan sarana pengabdian dan pengelolaan kehidupan bersama yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pendidikan politik berperan sebagai pendorong utama agar warga negara, khususnya generasi muda, mampu memahami arti sebenarnya dari demokrasi yang menuntut partisipasi aktif, kesadaran moral, dan sikap etis dalam setiap tindakan politik. Pendidikan politik menjembatani antara teori demokrasi dan praktik kehidupan nyata agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga bermakna dan berdampak positif.

Pendidikan dan politik bersama-sama membangun karakter bangsa yang kuat sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal. Pendidikan menghadirkan kesadaran nasionalisme,

sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial, sementara politik menyediakan mekanisme untuk mengekspresikan kesadaran tersebut dalam bentuk kebijakan dan partisipasi publik (Putri et al, 2025). Keduanya mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan, musyawarah untuk mufakat, serta etika saling menghargai semua nilai yang sudah menjadi roh demokrasi Pancasila.

Dengan sinergi antara pendidikan dan politik yang sehat, maka akan terwujud warga negara yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Mereka akan menjadi generasi yang mampu menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, serta memperjuangkan keadilan di tengah dunia yang penuh dinamika ini. Pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menyaring dan membentuk calon pemimpin bangsa yang tidak mudah tergoda oleh godaan kekuasaan, melainkan mampu melayani rakyat dengan sepenuh hati.

Sehingga pada akhirnya, hubungan antara pendidikan, politik, dan pembentukan karakter warga negara dalam sistem demokrasi Pancasila adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi alat pembuka pintu kesadaran politik dan moral, politik menjadi arena aktualisasi demokrasi yang berkeadaban, dan karakter bangsa yang terbentuk menjadi pengaman serta penopang lestarinya nilai-nilai kebangsaan. Bersama-sama, ketiganya memastikan bahwa Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang damai, adil, dan makmur dengan demokrasi yang sejati sebagai penopangnya.

Di Indonesia, pendidikan politik memang belum secara eksplisit dimasukkan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum persekolahan, baik pada tingkat sekolah dasar maupun menengah. Namun, konsep dan prinsip pendidikan politik sebenarnya telah menyatu secara implisit dalam beberapa mata pelajaran, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui mata pelajaran ini, siswa diperkenalkan nilai-nilai dasar kenegaraan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan fondasi penting dalam pendidikan politik. Jadi, meskipun bentuknya tidak formal sebagai pendidikan politik khusus, secara

tidak langsung proses pengenalan dan pembekalan politik dasar sudah mulai diberikan sejak dini kepada generasi muda.

Dari segi landasan yuridis, pendidikan politik di Indonesia pernah secara eksplisit diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda. Instruksi Presiden ini menegaskan bahwa pendidikan politik kepada generasi muda bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membekali calon penerus bangsa dengan pengetahuan mendalam mengenai norma-norma, nilai-nilai, tata cara, serta aturan dalam kehidupan politik bangsa. Dengan memahami hal-hal tersebut, generasi muda diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik sehingga tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktor yang berkontribusi dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda tidak dapat dipandang sebelah mata karena mereka adalah aset utama bangsa dan penerus cita-cita nasional. Sebagian dari generasi muda ini kelak akan terlibat langsung dalam dunia politik, baik sebagai tokoh masyarakat, pejabat publik, maupun penggerak sosial. Jika mereka dibekali pendidikan politik yang baik sejak awal, akan terwujud kader-kader pemimpin yang berintegritas, berkompeten, dan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa, bukan sekadar ambisi kekuasaan.

Selain mempersiapkan kader masa depan, pendidikan politik juga memiliki fungsi strategis dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara (Hermawan, 2013). Pendidikan politik bekerja untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara generasi muda, menanamkan semangat nasionalisme yang kokoh, serta menguatkan komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Di tengah dinamika kehidupan bangsa yang semakin kompleks, rasa persatuan dan kesatuan ini menjadi modal utama untuk menghindarkan bangsa dari perpecahan dan konflik yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional.

Jadi meskipun belum memiliki kurikulum pendidikan politik yang terpisah, berbagai kebijakan dan praktik yang ada telah memuat

unsur-unsur pendidikan politik penting yang bertujuan membentuk generasi muda Indonesia yang sadar politik, berkarakter kuat, dan siap menjalankan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ke depan, penguatan pendidikan politik secara formal dan kontinyu akan sangat dibutuhkan agar generasi muda semakin kompeten dan berdaya dalam menghadapi tantangan pembangunan demokrasi di era globalisasi dan transformasi sosial.

K. TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA

Pendidikan politik di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang harus diatasi agar pendidikan politik ini mampu memberikan kontribusi maksimal dalam membentuk generasi muda yang sadar politik dan berintegritas. Tantangan-tantangan ini ada yang bersifat struktural, konseptual, maupun praktis, yang jika tidak direspons dengan baik dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Namun demikian, bersamaan dengan tantangan tersebut muncul pula peluang penting yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik ke depan. Berikut berbagai tantangan pendidikan politik di indonesia;

1. Kurangnya kurikulum khusus dan sistematis

Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya pendidikan politik yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran formal di tingkat sekolah dasar dan menengah. Pendidikan politik selama ini masih bergantung pada materi penanaman nilai yang disisipkan dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sehingga cakupan dan kedalamannya belum optimal. Hal ini menyebabkan kurangnya pembekalan terstruktur bagi siswa terkait seluk-beluk sistem politik, mekanisme demokrasi, dan etika berpolitik.

2. Rendahnya literasi politik masyarakat, terutama generasi muda

Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang politik membuat sebagian generasi muda menjadi apatis, mudah terpengaruh

propaganda politik negatif, atau bahkan terjerumus dalam politik praktis yang tidak sehat seperti pemecah belah dan korupsi. Informasi mengenai politik sering kali dipenuhi hoaks, disinformasi, dan polarisasi, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik.

3. Pengaruh negatif budaya politik yang pragmatis dan materialistis

Dalam praktiknya bisa kita amati bahwa budaya politik Indonesia kerap masih didominasi oleh kepentingan pragmatis, politik uang, dan perebutan kekuasaan yang tidak berdasar pada nilai-nilai moral. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap motivasi generasi muda untuk terlibat dalam politik dengan cara yang bersih dan etis, sehingga menciptakan siklus politik yang sulit diubah tanpa pendidikan politik yang kuat.

4. Keterbatasan sumber daya dan dukungan institusional

Pelaksanaan pendidikan politik sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dalam bidang ilmu politik, serta minimnya dukungan dari lembaga pemerintah dan partai politik untuk menyelenggarakan program pendidikan politik berbasis masyarakat yang inklusif dan inovatif.

Tantangan pendidikan politik di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama agar bisa terselesaikan dengan baik. Jalan keluarnya adalah menciptakan peluang agar pendidikan politik ini bisa dilaksanakan dengan baik, diantara peluang pendidikan politik yakni melalui;

5. Pengembangan kurikulum yang inklusif dan kontekstual

Dengan kemajuan teknologi dan reformasi pendidikan, ada peluang besar untuk mengembangkan kurikulum pendidikan politik yang lebih terstruktur dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan generasi muda masa kini. Kurikulum yang mengintegrasikan teori politik, praktek demokrasi, dan pendidikan nilai Pancasila dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran politik secara menyeluruh.

6. Pemanfaatan teknologi digital dan media sosial

Generasi muda Indonesia sangat akrab dengan teknologi digital dan media sosial yang dapat dijadikan media efektif untuk pendidikan politik. Informasi politik yang akurat, analisis kebijakan, serta kampanye edukasi demokrasi dapat disebarkan secara luas dan cepat melalui platform digital, asalkan dilakukan dengan cara yang kreatif dan etis.

7. Peran aktif komunitas dan organisasi masyarakat sipil

Organisasi kepemudaan, LSM, kelompok advokasi, dan komunitas sosial berperan sebagai agen penting dalam menyelenggarakan pendidikan politik nonformal yang berbasis partisipasi dan praktek nyata. Kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas ini dapat menciptakan ekosistem pembelajaran politik yang dinamis dan inklusif.

8. Dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah

Pemerintah memiliki peluang untuk memperkuat pendidikan politik melalui kebijakan yang mengatur pelaksanaan pendidikan politik secara nasional. Penyediaan dana, pemberdayaan guru, serta regulasi yang mewajibkan pengajaran pendidikan politik dalam kurikulum menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang berpolitik cerdas dan bertanggung jawab.

Jadi dengan mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut, pendidikan politik di Indonesia dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat demokrasi Pancasila. Generasi muda yang cerdas dan berkarakter politik akan menjadi aset berharga bagi bangsa dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna untuk kemajuan sosial dan ekonomi negara. Pendidikan politik yang efektif akan melahirkan warga negara yang tidak hanya berpartisipasi secara aktif, tetapi juga beretika, kritis, dan memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan.

L. GENERASI MUDA

Menentukan seseorang termasuk dalam golongan muda tidak bisa hanya didasarkan pada penampilan fisik atau sikap yang diperlihatkan, melainkan harus mengacu pada batasan usia yang jelas. Definisi usia ini penting untuk memberikan ruang identifikasi yang objektif mengenai siapa yang termasuk kategori generasi muda atau pemuda, sebagai bagian penting dari pembangunan sosial dan politik suatu bangsa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pemuda" berasal dari kata dasar "muda" yang berarti belum sampai setengah umur, sedangkan pemuda sendiri didefinisikan sebagai orang yang masih dalam masa muda dan dianggap sebagai harapan bangsa. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatur bahwa pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berada pada rentang usia 16 sampai 30 tahun. Di tingkat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan klasifikasi pemuda pada kelompok usia antara 15 sampai 24 tahun. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa batas umur yang digunakan untuk mengkategorikan pemuda berkisar antara 15 hingga 30 tahun, menyesuaikan konteks nasional dan internasional.

Namun, definisi pemuda tidak hanya berhenti pada aspek usia semata. Seiring perkembangan zaman, pemuda juga memiliki ciri-ciri khas yang membedakan mereka dari kelompok usia lain, terutama dalam hal peran sosial, budaya, dan politik. Pemuda dikenal sebagai kelompok dinamis yang berada dalam tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, dengan energi yang besar, kreativitas tinggi, serta semangat perubahan yang kuat. Dari sisi kultural, generasi muda sering kali menjadi agen pembaruan, pembawa ide-ide inovatif, serta pelopor dalam pengembangan nilai-nilai baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dari sisi peran bisa dikatakan generasi muda tidak hanya sebagai penerus bangsa, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka memiliki potensi besar

untuk menjadi agen perubahan sosial dan politik yang mampu mendukung pembangunan demokrasi, memperkuat persatuan nasional, serta menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, pemuda sering disebut sebagai "harapan bangsa" karena energi dan kreativitasnya menjadi sumber kekuatan utama dalam menggerakkan kemajuan bangsa.

Pemuda juga menghadapi tantangan tersendiri dalam menjalankan peran ini, mulai dari masalah pendidikan, kesempatan kerja, penguatan karakter, hingga keterlibatan dalam proses politik yang sehat dan beretika. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat tentang siapa generasi muda dan peran strategis mereka sangat penting agar kebijakan pembangunan pemuda dapat dirumuskan dan dijalankan dengan baik. Dengan dukungan pendidikan, pelatihan, dan fasilitas yang memadai, generasi muda akan mampu mewujudkan potensinya secara optimal dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

1. Perkembangan Pemuda di Indonesia

Indonesia memiliki payung hukum yang mengatur tentang kepemudaan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang ini dirancang dengan tujuan utama memaksimalkan peran pemuda sebagai agen perubahan bangsa sekaligus memberikan wadah yang mendukung pengembangan potensi mereka secara optimal. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana UU tersebut berfungsi dalam menunjang peran pemuda, penting terlebih dahulu untuk memahami aspek perkembangan pemuda secara umum. Pemahaman ini akan menjadi dasar agar kebijakan dan program yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Stanley Hall, seorang pelopor dalam studi psikologi perkembangan pemuda, pernah mengemukakan bahwa perhatian ilmiah terhadap perubahan fisiologis dan psikologis yang dialami pemuda masih sangat terbatas pada masanya. Dalam karya yang dikutip oleh Surakhmand (1980:51), Hall menyatakan bahwa pada awal penelitiannya lebih dari setengah abad yang lalu, para ilmuwan masih minim pemahaman tentang pengaruh perubahan fisiologis terhadap perkembangan emosi dan perilaku pemuda. Namun seiring waktu, penelitian dalam

bidang genetika, endokrinologi, dan ekologi perkembangan manusia mengalami perkembangan pesat.

Kini, dengan penggunaan metode penelitian yang lebih canggih dan longitudinal yaitu pengamatan jangka panjang terhadap individu atau kelompok telah terkumpul data yang komprehensif dan dapat menjadi pedoman dalam memahami perkembangan normal pada pemuda. Kurva perkembangan yang dihasilkan dari studi tersebut memberikan gambaran kecenderungan umum karakteristik fisik, emosional, dan sosial pemuda dalam berbagai rentang usia. Hal ini penting bukan hanya bagi dunia pendidikan dan kesehatan, tetapi juga sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepemudaan secara holistik.

Memahami perkembangan pemuda secara menyeluruh meliputi aspek biologis, psikologis, dan sosial menjadi sangat penting agar peran dan potensi pemuda dapat dioptimalkan. Hal ini juga menjawab kebutuhan UU No 40 Tahun 2009 yang tidak hanya memberi ruang bagi keterlibatan pemuda secara politik dan sosial, tetapi juga mencakup perlindungan serta pembinaan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pemahaman yang baik tentang proses tumbuh kembang pemuda, berbagai program pemberdayaan dapat disusun sesuai kebutuhan sebenarnya, memperkuat posisi pemuda sebagai penerus sekaligus penggerak kemajuan bangsa.

Oleh karena itu, pengembangan studi dan penelitian tentang perkembangan pemuda yang terus berjalan merupakan aset penting bagi setiap pemangku kebijakan. Selain itu, hasil-hasil penelitian tersebut bisa membantu memperkuat pendidikan politik dan sosial yang lebih relevan, sehingga generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Lalu bagaimana dengan Perkembangan Pemuda di Indonesia?

Mengenai perkembangan pemuda di Indonesia, perlu dicermati bahwa sejauh ini masih terdapat keterbatasan dalam jumlah dan kualitas penelitian yang secara khusus mengkaji karakteristik, kebutuhan, dan dinamika kehidupan pemuda Indonesia secara komprehensif. Data dan kajian yang ada masih relatif terbatas sehingga sulit memberikan

gambaran menyeluruh yang benar-benar mencerminkan kondisi riil generasi muda di berbagai wilayah dan lapisan sosial. Hal ini menjadi tantangan bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi kepemudaan untuk menghasilkan data yang valid dan aplikasi yang tepat guna bagi pembangunan pemuda di Indonesia.

Dalam mengatasi kekurangan tersebut, sering kali hasil-hasil penelitian dari luar negeri dijadikan referensi untuk memahami perkembangan pemuda. Namun, penggunaan data dan model dari konteks asing harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Situasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyesuaikan dan mengadaptasi hasil-hasil penelitian luar agar relevan dan efektif diaplikasikan dalam konteks Indonesia. Misalnya, pola perilaku pemuda, nilai-nilai budaya, serta tantangan sosial yang mereka hadapi bisa sangat berbeda, sehingga perlu kajian holistik yang mempertimbangkan kekhasan lokal tersebut.

Penelitian yang komprehensif tentang pemuda Indonesia harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perkembangan fisik, psikologis, penerimaan sosial, pendidikan, hingga keterlibatan politik dan sosial. Data empiris yang akurat akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program kepemudaan yang sesuai dengan kebutuhan aktual. Kebijakan yang didasarkan pada data valid dan konteks lokal akan lebih efektif dalam mendukung pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan yang mampu menghadapi tantangan global sekaligus menjaga jati diri dan nilai-nilai kebangsaan.

Indonesia perlu mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian tentang perkembangan pemuda. Ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga akademik, organisasi sosial, dan komunitas pemuda sendiri. Penelitian longitudinal dan multidisipliner sangat dianjurkan agar memperoleh gambaran menyeluruh dan berkelanjutan mengenai kondisi pemuda. Jadi, intervensi kebijakan tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif, sehingga potensi besar generasi muda dapat dioptimalkan secara maksimal untuk kemajuan bangsa (Mulyadi et al, 2024).

Secara keseluruhan, memahami perkembangan pemuda di Indonesia secara akurat dan mendalam menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yaitu mengoptimalkan peran pemuda dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pengetahuan dan data yang tepat, generasi muda akan mendapatkan pembinaan, pelatihan, serta dukungan yang berorientasi pada pemberdayaan diri dan peran sosial-politik yang produktif serta berkelanjutan.

Studi klasik mengenai perkembangan pemuda, seperti yang dilakukan oleh Simmons (1944) terhadap sejumlah besar pemuda Amerika, memberikan gambaran empiris mengenai perubahan fisiologis yang terjadi selama masa remaja. Simmons menemukan bahwa pada wanita, berat badan bertambah pesat pada rentang usia 9-12 tahun, sedangkan pada pria, perubahan tersebut terjadi sedikit lebih lambat, yakni pada usia 11-14 tahun. Data ini menjadi petunjuk umum tentang kecenderungan perkembangan normal pada pemuda, tetapi perlu diketahui bahwa variasi dalam perkembangan sangatlah luas dan tidak selalu mengikuti pola rata-rata tersebut. Hal ini menandakan bahwa satu "norma" tunggal sulit diterapkan secara mutlak sebagai standar ukuran perkembangan yang normal.

Selain aspek fisiologis, penelitian perkembangan psikologis pemuda juga menunjukkan variasi yang besar antar individu. Dalam konteks psikologi pemuda Indonesia, pengenalan terhadap normatif perkembangan tersebut masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menghindari apa yang disebut Garrison sebagai *tyranny of the norm*, yakni kecenderungan memaksakan standar rata-rata sebagai acuan mutlak yang mengabaikan keberagaman individu (Fiedler, 1984). Sebagaimana ditegaskan Garrison, perlunya pengakuan terhadap perbedaan waktu mulai pubertas dan laju perubahan organ tubuh yang sangat variatif ini harus menjadi dasar untuk menerima banyaknya variasi dalam perkembangan, selama masih dalam batas wajar dari "perkembangan normal".

Pendapat tersebut perlu diperluas tidak hanya untuk meninjau perkembangan individu secara biologis, tetapi juga menimbang aspek

sosial-kultural yang turut memengaruhi tugas-tugas perkembangan pemuda. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara kebutuhan individu yang berkaitan dengan faktor biologis serta kebutuhan sosial-kultural yang mencakup peranan budaya, lingkungan sosial, dan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas. Hal ini relevan mengingat budaya dan lingkungan sosial Indonesia yang sangat beragam, sehingga pola perkembangan sosial-kultural pemuda pun bisa berbeda-beda sesuai konteks lokalnya.

Sebagai bagian dari kehidupan manusia, perkembangan pemuda memiliki sifat-sifat yang secara umum bersifat universal, namun juga memunculkan ciri khas tersendiri pada masa remaja. Menurut Sumanto (2014) ada tiga sifat umum perkembangan yang perlu diperhatikan, yakni:

a. Perilaku manusia berkembang secara bertahap (*developmental*), mengikuti pola tertentu dimana setiap langkah menuju kedewasaan memperlihatkan kemajuan yang khas. Penyimpangan besar dari pola ini bisa dianggap sebagai indikasi penyimpangan atau abnormalitas perkembangan.
b. Perilaku yang berkembang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, dengan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi daripada makhluk hidup lainnya. Ini menunjukkan manusia, termasuk pemuda, memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan fisik di sekitarnya.
c. Perilaku yang berkembang bersifat dinamis, artinya terus bergerak dan berubah menuju tujuan hidup yang lebih matang. Namun sifat dinamis ini juga dapat mengarah pada pilihan yang tidak realistis atau bermasalah jika penyesuaian terhadap lingkungan tidak berjalan secara wajar.

Ketiga sifat umum ini sangat jelas terlihat dalam perkembangan pribadi pemuda, terutama saat mereka memasuki masa remaja. Pada fase ini, pemuda secara aktif memposisikan dirinya terhadap lingkungan sosialnya, mulai dari keluarga, sekolah, teman sebaya,

hingga masyarakat luas. Interaksi dan pengalaman dengan lingkungan tersebut bersama dengan perkembangan fisik dan psikologis yang dialami, secara kontinu meningkatkan kapasitas dan kedewasaan mereka. Namun keberhasilan perkembangan ini sangat bergantung pada seberapa baik penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan pola perkembangan yang wajar dan sehat.

Memahami berbagai aspek ini sangat penting dalam merancang pendekatan pendidikan politik, sosial, dan budaya yang tepat bagi generasi muda. Dengan penghormatan terhadap keberagaman individu dan konteks sosial kultural, intervensi yang dilakukan akan lebih efektif dalam mendukung perkembangan yang sehat dan integratif. Pendekatan yang holistik ini tidak hanya memperhatikan aspek biologis dan psikologis, tetapi juga memastikan pemuda dapat berkembang secara optimal sehingga siap menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan dan perkembangan tingkah laku pemuda seharusnya diarahkan secara jelas kepada tujuan-tujuan hidup yang bermakna dan konstruktif (Anwar, 2015). Namun, sifat dinamis yang melekat pada masa muda kerap menjadi tantangan tersendiri. Dinamika ini dapat menyebabkan pemuda mengalami kebingungan, impulsivitas, atau pilihan perilaku yang kurang terkontrol dan tidak selalu mencerminkan sikap yang terhormat atau sesuai norma sosial. Ketidakterarahan ini sering dikaitkan dengan berbagai faktor seperti tekanan sosial, pengaruh lingkungan, serta kurangnya bimbingan yang memadai dalam proses penyesuaian diri.

Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa tingkah laku pemuda yang sedang berkembang ini bukanlah sesuatu yang statis atau tidak dapat diubah. Dengan pendekatan yang tepat, perilaku dinamis tersebut masih sangat memungkinkan untuk dibina dan diarahkan ke jalur yang positif. Proses pembinaan ini harus berfokus pada penguatan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga pemuda tidak hanya menjadi sekadar individu yang reaktif terhadap perubahan, tetapi mampu menjadi agen yang sadar dan bertanggung jawab secara sosial.

Pembinaan dan pengarahan tingkah laku pemuda dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, termasuk pendidikan politik yang menanamkan prinsip-prinsip demokrasi, kejujuran, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Selain itu, peran keluarga, sekolah, komunitas, dan media juga sangat vital dalam memberikan contoh konkret serta dukungan emosional yang membantu pemuda menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Dengan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan, pemuda akan mampu menyalurkan energi dan kreativitasnya ke arah yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

Konteks ini menegaskan bahwa meskipun pemuda memiliki sifat yang berubah-ubah dan tidak selalu stabil, mereka tetap merupakan bagian dari proses perkembangan manusia yang dapat diarahkan. Dengan dukungan lingkungan yang kondusif dan pendidikan yang tepat, tingkah laku mereka dapat dibentuk agar mencerminkan karakter yang berintegritas, bermoral, dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan etika dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, fokus pada pembinaan perilaku pemuda sebagai individu yang dinamis harus disertai dengan penguatan pendidikan politik dan sosial yang menekankan nilai-nilai luhur serta tanggung jawab kolektif. Pendekatan holistik ini akan menjamin bahwa pemuda dapat berkembang sebagai pribadi yang terarah dan mampu menjadi ujung tombak perubahan positif di masa depan.

2. Pemuda Sebagai Sumber Manusia dalam Pembangunan Nasional

Menurut Pujianto & Abdillah (2024) pemuda merupakan lapisan masyarakat yang penuh dengan dinamisme, semangat perubahan, dan vitalitas heroisme yang tinggi. Mereka tidak hanya menjadi kelompok yang energik dan kreatif, tetapi juga memiliki peran krusial sebagai sumber daya utama dalam pembangunan suatu bangsa. Pemuda adalah generasi penerus yang memikul tanggung jawab besar untuk

meneruskan perjuangan dan mewujudkan cita-cita bangsa.

Jumlah pemuda di Indonesia pada tahun 2024 menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 64,22 juta jiwa, yang secara persentase mewakili sekitar 22,99% dari total penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa. Angka ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dibandingkan data tahun 2018 dan mencerminkan perubahan demografi dalam satu dekade terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda bukan hanya bagian penting dari demografi bangsa, tetapi juga aset strategis yang perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal. Keberadaan mereka memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan nasional jika potensi mereka dapat dioptimalkan lewat pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan.

Melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam setengah abad terakhir, peran pemuda sangat menonjol dan tak tergantikan dalam berbagai tahap penting. Empat tahap perjuangan bangsa yang mencatat kiprah pemuda menunjukkan kontribusi berkelanjutan mereka dalam membentuk arah sejarah nasional. Dari angkatan perintis yang memperjuangkan kemerdekaan, angkatan penegak keadilan yang menghadapi tantangan masa orde lama dan orde baru, hingga angkatan pembangunan masa kini yang berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, pemuda selalu berada di garis depan perubahan.

Paralel dengan peran historis tersebut, pemuda masa kini disebut sebagai angkatan pembangunan yang memiliki harapan besar untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin kompleks dan dinamis, pemuda diharapkan dapat menjadi motor penggerak inovasi, pengawal nilai-nilai kebangsaan, dan penjaga persatuan bangsa. Mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, budaya, maupun pemerintahan.

Sebagai sumber manusia yang potensial, pemuda Indonesia membawa energi dan ide-ide segar yang dibutuhkan untuk mengisi berbagai sektor pembangunan dengan kreatifitas dan semangat optimisme. Namun, agar peran ini benar-benar optimal, pemuda

harus mendapatkan akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, dan ruang partisipasi yang luas untuk menyalurkan aspirasi dan kontribusinya. Oleh karena itu, peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas dalam memberdayakan pemuda menjadi sangat vital.

Kesadaran akan posisi strategis pemuda sebagai sumber pembangunan bangsa harus menjadi landasan utama dalam kebijakan nasional. Dengan dukungan yang tepat, pemuda Indonesia tidak hanya akan menjadi penerus, tetapi juga penggerak perubahan dan pelopor kemajuan yang mampu mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan makmur di masa depan.

Pelaksanaan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberadaan angkatan kerja yang produktif dan kompeten. Dalam konteks Indonesia, sekitar 40% dari total penduduk diperkirakan merupakan angkatan kerja yang secara ekonomi aktif berkontribusi dalam menjalankan roda pembangunan. Data historis menunjukkan, ketika jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 120 juta jiwa, angkatan kerja telah mendekati angka 50 juta jiwa (Surakhmand, 1980:5). Dengan pertambahan populasi yang signifikan, hingga lebih dari 268 juta jiwa pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja juga melesat menjadi sekitar 67 juta jiwa. Angka ini menunjukkan betapa besarnya potensi tenaga kerja, khususnya dari kalangan pemuda, yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam memperkuat pembangunan nasional.

Komposisi angkatan kerja yang didominasi oleh generasi muda menjadi salah satu keuntungan demografis yang disebut sebagai "bonus demografi." Savitri (2019) memaparkan bahwa bonus ini merupakan momentum utama bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan sosial-ekonomi, asalkan generasi muda ini mendapatkan kesempatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja masa kini dan masa depan.

Dengan jumlah yang besar, pemuda bukan hanya sebagai kuantitas tenaga kerja, tetapi sebagai sumber inovasi, kreativitas, dan daya saing yang dapat mendorong kemajuan bangsa Indonesia di berbagai bidang.

Pengembangan potensi pemuda secara maksimal perlu menjadi agenda prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Tidak hanya dalam sektor ekonomi, pemuda juga diharapkan berkontribusi secara nyata dalam bidang sosial, politik, budaya, dan teknologi. Peran mereka sebagai pelopor perubahan dan agen transformasi sosial sangat vital untuk menjaga dinamisasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendidikan, pelatihan kerja, kewirausahaan, dan pemberdayaan sosial, pemuda dapat diarahkan untuk menjadi kekuatan strategis yang solid dalam membangun peradaban bangsa.

Sebagai tonggak perjuangan bangsa, generasi muda harus mampu mengambil peran utama dalam memajukan peradaban Indonesia. Mereka diharapkan tidak sekadar menjadi pelaku pembangunan, tetapi juga menjadi pemimpin yang inovatif, visioner, dan berintegritas tinggi. Pemuda perlu didorong untuk aktif dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan industri, teknologi informasi, kreatif ekonomi, sampai advokasi hak dan pembangunan politik yang inklusif. Jadi, peran pemuda dalam pembangunan nasional tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi yang signifikan, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing tinggi di panggung global.

Melihat realitas dan potensi besar ini, sudah semestinya semua pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia akademik, dunia usaha, maupun masyarakat memberikan perhatian serius dan komitmen yang kuat untuk menguatkan posisi pemuda sebagai motor utama pembangunan bangsa. Penyiapan mereka melalui pendidikan berkualitas dan pembinaan karakter yang kuat akan memastikan bahwa generasi muda Indonesia bisa mewujudkan potensi optimalnya dan menjadi pilar utama dalam menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik.

3. Pemuda dalam Aspek Kultural dan Individual

Dalam kajian politis yang umum diterapkan di Indonesia, terutama dalam berbagai organisasi kepemudaan, batas usia pemuda seringkali ditetapkan antara rentang 15 hingga 35 tahun. Meskipun pengelompokan usia ini memudahkan identifikasi dan pengorganisasian kelompok

pemuda, dari sudut pandang perkembangan psikologis dan pedagogis, rentang usia yang cukup luas ini tidak selalu mampu menggambarkan perubahan mendalam yang terjadi pada individu selama masa tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan pemuda secara lebih akurat dan konstruktif, diperlukan pertimbangan tambahan yang lebih komprehensif menyangkut tahapan perkembangan individu dalam konteks budaya dan sosial.

Periode transisi yang dialami pemuda merupakan fase kritis dimana seseorang bergerak meninggalkan masa kanak-kanak menuju kedewasaan (Jannah et al, 2021). Masa transisi ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga melibatkan perkembangan psikologis dan kultural yang kompleks. Pandangan dari Purnomo, dkk (2024) menggambarkan sifat golongan pemuda pada rentang usia 15-35 tahun sebagai masa yang ditandai oleh kejadian psikologis penting, yakni masa transisi dari kekanak-kanakan ke kedewasaan. Dalam periode ini, pemuda mempersiapkan diri menjadi individu yang sesungguhnya, dengan tanggung jawab, kemandirian, dan identitas yang lebih jelas.

Masa transisi ini terdiri dari beberapa subperiode yang dikenal dalam literatur psikologi perkembangan, seperti masa pra-puber (prae-pubertas) hingga masa pemudaan (*youth*). Setiap periode memiliki ciri khas perkembangan yang berpengaruh pada pola pikir, nilai, dan perilaku individu. Misalnya, pada masa pra-puber, perubahan hormonal mulai memicu perubahan fisik dan emosional; sedangkan masa pemudaan melibatkan pembentukan identitas diri, pemahaman nilai sosial, dan adaptasi terhadap lingkungan budaya yang semakin kompleks.

Dari aspek kultural, pemuda bukan hanya individu yang berkembang secara pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari komunitas budaya yang membentuk orientasi, nilai, dan norma perilaku mereka (Kurdi, 2023). Budaya lokal dan nasional memberikan kerangka acuan yang membentuk identitas pemuda, sekaligus menyediakan ruang bagi mereka untuk berekspresi, berinovasi, dan mencari jati diri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek kultural sangat penting, karena dapat menjelaskan mengapa pemuda di berbagai daerah atau

kelompok sosial dapat memiliki pola perkembangan dan perilaku yang berbeda-beda.

Selain itu, aspek individual dalam perkembangan pemuda juga menuntut pendekatan yang bersifat personal dan humanistik. Setiap pemuda memiliki karakter, potensi, dan pengalaman unik yang perlu dihargai dan dikembangkan secara khusus. Pendekatan pendidikan dan pembinaan yang terlalu generik dan standar dapat gagal menangkap keunikan ini, sehingga kurang efektif dalam membina kemandirian dan tanggung jawab pribadi yang menjadi ciri utama pemuda dewasa.

Jadi memahami pemuda dari aspek kultural dan individual menuntut perspektif yang holistik dan multidimensional, yang mengintegrasikan perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan budaya. Pendekatan seperti ini akan memungkinkan kebijakan kepemudaan dan program pembinaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata generasi muda, memperkuat kontribusi mereka dalam kehidupan sosial-politik, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya nasional dalam menghadapi globalisasi.

Sifat-sifat permulaan yang muncul pada periode perkembangan pemuda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sering kali ditandai dengan munculnya keinginan kuat untuk menunjukkan sikap berani dan mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya. Sikap-sikap ini pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi demonstratif yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan diri untuk menyembunyikan kegelisahan dan ketidakpastian yang belum sepenuhnya dipahami oleh pemuda itu sendiri. Dengan kata lain, perilaku yang tampak berani atau mencari perhatian ini bukanlah refleksi kematangan emosional, melainkan tanda-tanda pencarian jati diri yang sedang berlangsung.

Keinginan pemuda untuk "menemui dirinya sendiri" merupakan fase krusial dalam perkembangan identitas. Pada tahap ini, mereka mulai menggali makna hidup dan harga diri, serta berusaha memahami nilai-nilai apa yang penting dan pantas dijunjung tinggi. Proses ini meliputi pencarian pemahaman tentang tujuan hidup, peran sosial, dan tanggung jawab yang harus dipikul sebagai bagian dari masyarakat. Dalam pencarian tersebut, pemuda melakukan berbagai

percobaan dan eksplorasi terhadap nilai dan norma yang ada, termasuk mencoba berbagai peran sosial dan pola perilaku yang berbeda, untuk menemukan mana yang paling sesuai dengan diri mereka.

Selain aspek internal, hasrat pemuda untuk segera memasuki masyarakat dan mengenal kebudayaan juga menjadi bagian integral dari perkembangan mereka. Integrasi sosial ini penting dalam membantu pemuda menempatkan diri dalam kelompok sosial yang lebih luas, memperluas wawasan, dan menginternalisasi nilai-nilai kultural yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Melalui proses ini, pemuda belajar menyesuaikan diri dengan norma dan aturan sosial, sekaligus mengembangkan identitas budaya yang khas dan dapat memberi kontribusi terhadap kelangsungan komunitas.

Sikap-sikap tersebut yang awalnya bersifat demonstratif dan penuh ketidakpastian akan menjadi lebih sempurna dan matang apabila pemuda berhasil menjalani proses pencarian jati diri dengan baik. Ketika mereka mampu mencapai pemahaman yang utuh tentang harga kehidupan dan melaksanakan percobaan sosial dengan sikap kritis dan reflektif, mereka akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakar kuat pada budaya serta nilai-nilai sosial. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan karakter yang matang dan etis, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemahaman mendalam tentang dinamika ini sangat relevan dalam konteks pendidikan politik dan pemberdayaan pemuda. Program-program pembinaan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya memberikan pengetahuan politik semata, tetapi juga mendukung proses pencarian jati diri yang sehat dan positif. Jadi, pendidikan politik akan dapat mengarahkan semangat dan energi pemuda ke dalam tindakan yang konstruktif dan berlandaskan nilai moral dan kebangsaan yang kuat.

Dalam proses pencarian jati diri dan kedewasaan, anak muda berusaha memperoleh status sebagai manusia yang mandiri dan dihargai secara sosial (Mulyono et al, 2002). Hal ini mendorong terjadinya kecenderungan emansipasi, di mana mereka berusaha

melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua atau figur otoritas yang sebelumnya menganggap mereka sebagai individu yang masih rendah karena faktor usia, pengalaman, dan kecakapan. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan otonomi ini merupakan bagian penting dari perkembangan psikologis dan sosial pemuda, yang menandai transisi dari ketergantungan menuju kemandirian.

Berdasarkan Riski (2021) perkembangan pesat dalam aspek fisik, intelektual, dan emosional memberikan dasar yang kuat bagi pemuda untuk mulai mencari pengalaman dan memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang. Keterbukaan terhadap dunia baru ini membangun daya kritis yang semakin tajam, di mana mereka mulai tertarik pada persoalan-persoalan teoritis dan nilai-nilai abstrak yang lebih kompleks. Ketertarikan ini membantu membentuk pandangan hidup dan cita-cita yang ingin dicapai, sekaligus mendorong keterlibatan dalam kegiatan sosial yang tidak lagi terbatas pada lingkungan rumah atau sekolah saja, tetapi meluas ke komunitas dan masyarakat yang lebih luas.

Dalam kerangka ini, Purnomo, dkk (2024) menilai bahwa sifat pemuda pada masa pemudaan tidak hanya mencakup keberanian saja, tetapi juga berkembang menjadi lebih dinamis, revolusioner, radikal, dan kritis. Sifat-sifat ini mencerminkan peningkatan kesadaran politik dan sosial serta semangat perubahan yang kuat. Pemuda mulai menunjukkan keberanian dalam mengkritik status quo dan berpartisipasi dalam tindakan kolektif yang dapat mendorong reformasi sosial dan politik.

Namun, pandangan Depernas tersebut, meskipun memberikan gambaran positif, masih terlalu umum dan cenderung menyederhanakan kompleksitas perilaku pemuda. Sifat pemuda yang dinamis dan kritis tidak selalu berarti radikal atau revolusioner dalam arti yang negatif; ada spektrum luas ekspresi yang bermakna dan berbeda-beda konteksnya. Perilaku kritis dan revolusioner pada pemuda bisa berbentuk advokasi yang konstruktif, pengembangan kreativitas sosial, maupun bentuk kegiatan pemuda yang berorientasi pada perubahan positif dalam masyarakat.

Lebih jauh, tiap individu pemuda membawa latar belakang budaya, sosial, dan pengalaman hidup yang berbeda, sehingga pembinaan dan pendidikan harus memperhatikan keragaman ini. Pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap karakter serta dinamika pemuda penting agar pendekatan pendidikan dan pemberdayaan tidak hanya menggeneralisasi perilaku, tetapi mampu memahami kebutuhan dan potensi unik tiap pemuda.

Oleh sebab itu, dalam konteks pendidikan politik dan pembangunan karakter, perlu upaya yang lebih terarah dan komprehensif untuk membimbing pemuda dalam menyalurkan semangat kritis dan keberaniannya menuju aktivitas yang positif dan bermakna. Pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai akan membantu pemuda menginternalisasi tanggung jawab sosial, etika, dan semangat nasionalisme yang menjadi fondasi pembangunan bangsa.

Untuk memahami pemuda secara lebih mendalam dan merancang program pembinaan yang efektif agar mereka mampu menempatkan diri secara tepat di masa sekarang dan masa depan, diperlukan pengetahuan yang komprehensif dan kontekstual. Sekadar menggunakan gambaran umum tentang sifat-sifat pemuda, seperti yang disarankan oleh Purnomo, dkk (2024) ternyata kurang memadai untuk merumuskan strategi pembinaan yang tepat. Setiap masyarakat memiliki kaidah tingkah laku sosial dan budaya yang unik, yang sangat mempengaruhi perkembangan dan peran pemuda di dalamnya.

Di masyarakat yang bersahaja dengan struktur sosial yang relatif stabil, kebudayaan yang terjaga, serta nilai-nilai tradisional dan historis yang kokoh, tuntutan hidup terhadap pemuda sering kali menjadi lebih jelas dan terarah. Peran pemuda dalam hal ini telah terdefinisi dalam kerangka tradisi yang diterima secara luas, sehingga sosialisasi dan mekanisme interaksi sosial berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, norma dan kaidah tingkah laku sosial sudah mengalami proses *institutionalization* yakni diresmikan dan dilegitimasi sebagai aturan sosial yang mengatur perilaku pemuda.

Kaidah-kaidah tersebut mempermudah pemuda dalam memahami peran dan tanggung jawabnya, serta membantu mereka

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya secara lebih natural dan harmonis. Sistem sosial yang stabil dan terstruktur jelas memberikan arah yang pasti bagi pemuda dalam menempa karakter dan keterampilan sosial mereka. Tantangan pembinaan pemuda dalam masyarakat seperti ini lebih kepada pemeliharaan dan penguatan nilai-nilai yang sudah ada agar tetap relevan dan mampu menghadapi perubahan zaman.

Sebaliknya, di masyarakat yang mengalami transformasi cepat, urbanisasi, atau proses modernisasi yang terjadi secara massif, pemuda menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Dalam situasi sosial yang dinamis dan terkadang tidak stabil ini, kaidah klasik yang bersifat tradisional tidak selalu dapat mengatur perilaku dan interaksi sosial pemuda secara efektif. Ada kecenderungan munculnya ketidakpastian nilai, konflik budaya, dan gejolak psikososial akibat perubahan konteks ekonomi, teknologi, dan budaya yang pesat.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya masyarakat tempat pemuda berasal sangat penting untuk merancang program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada norma umum, tetapi juga fleksibel dan responsif terhadap perkembangan sosial yang terjadi. Pendekatan pembinaan yang bersifat lokal, memperhitungkan keragaman budaya, dinamika sosial, serta kebutuhan psikologis pemuda akan lebih efektif dalam menuntun mereka menuju kedewasaan yang harmonis dan produktif.

Selain itu, integrasi pendidikan nilai, sosial, dan politik yang kontekstual menjadi bagian penting dalam membantu pemuda memahami peran mereka dalam masyarakat sekaligus menginternalisasi nilai kebangsaan dan demokrasi. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan pemuda dapat menempatkan diri dengan baik di masa kini dan masa depan, siap menghadapi tantangan bangsa dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan sosial, budaya, dan politik.

Di Indonesia, terdapat banyak dokumentasi dan laporan tertulis yang menggambarkan kehidupan pemuda atau kelompok pemuda dalam masyarakat yang bersifat tertutup dan tradisional, seperti yang ditemukan pada suku-suku di Tabelo, Tanimbar, Bali, Sumatera Selatan,

dan daerah lainnya. Fischer menyoroti bahwa keberadaan pemuda sebagai anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang berlaku di lingkungan mereka. Meski pertumbuhan fisik pemuda berlangsung secara bertahap dan tidak selalu terjadi dalam rentang waktu yang singkat, perubahan peran mereka dalam masyarakat seringkali berlangsung lebih cepat karena adanya tugas-tugas sosial dan kultural yang harus mereka emban.

Dalam masyarakat seperti ini, pemuda diharapkan untuk segera menjadi *meetellend burger* atau warga yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan peran dalam kehidupan sosial. Transisi dari masa kanak-kanak menuju status tersebut dipercepat oleh kaidah sosial dan pola sosialisasi tertentu yang berlaku, seperti perkawinan dini dan tanggung jawab pekerjaan, yang sering kali sudah dimulai sebelum pemuda siap secara biologis atau fisik. Hal ini menunjukkan betapa norma dan aturan budaya sangat dominan dalam mengatur proses kedewasaan pemuda di masyarakat tradisional yang relatif tertutup.

Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih terbuka dan dinamis seperti di daerah perkotaan atau masyarakat modern, pemuda menghadapi permasalahan dan tantangan yang berbeda. Masa pendidikan yang lebih panjang dan regulasi ketenagakerjaan, seperti undang-undang yang melarang penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur tertentu, memaksa pemuda untuk menunda fase-fase tradisional seperti menikah atau menjalani hubungan heteroseksual yang benar-benar memenuhi aspek kedewasaan.

Namun demikian, dalam konteks sosial yang lebih modern, pemuda tetap diperbolehkan menjalin hubungan akrab dan bergaul dengan pemuda lain dari jenis kelamin berbeda, dengan catatan bahwa mereka harus menjaga harga diri dan kehormatan diri sesuai norma sosial yang berlaku. Kematangan heteroseksualitas yang dimaksud di sini bukan sekadar aspek biologis, tapi lebih mengarah pada kematangan sosial dan psikologis, yaitu kemampuan untuk memahami dan memanifestasikan hubungan seksual secara bertanggung jawab, beretika, dan berlandaskan pada penghormatan diri dan sesama.

Perbedaan pendekatan dan tuntutan sosial-kultural ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya pengalaman pemuda di Indonesia, yang bergantung pada konteks budaya dan sosial tempat mereka tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, dalam proses pembinaan dan pendidikan pemuda, diperlukan pendekatan yang sensitif dan sesuai dengan konteks lokal agar nilai-nilai luhur, tanggung jawab sosial, dan norma budaya dapat terinternalisasi dengan baik tanpa menghilangkan aspek kemajuan dan kemandirian personal.

Pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemahaman terhadap perbedaan konteks budaya ini akan sangat penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi juga tetap mempertahankan identitas budaya dan moralitas yang kuat sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keanekaragaman kultural dan sosial yang melekat pada generasi muda Indonesia memiliki implikasi besar terhadap bagaimana pendidikan politik dan pemberdayaan pemuda harus dirancang dan diimplementasikan. Pendidikan politik yang efektif tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan konteks budaya, norma sosial, dan nilai-nilai lokal yang berbeda di setiap wilayah atau komunitas.

Pemahaman mendalam tentang keberagaman ini menjadi kunci dalam menghasilkan program pendidikan yang relevan dan berdampak positif bagi pemuda di berbagai latar belakang.

Konteks sosial-kultural memengaruhi bagaimana nilai-nilai politik dipahami, diinternalisasi, dan diaplikasikan oleh pemuda. Dalam masyarakat tradisional yang menekankan norma-norma sosial dan peran kolektif, pendidikan politik harus mengakomodasi nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap otoritas sebagai fondasi pembangunan demokrasi yang partisipatif. Di sisi lain, dalam masyarakat yang lebih modern dan individualistik, pendidikan politik perlu mendorong kesadaran kritis, kebebasan berpendapat, serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan tetap menghargai keberagaman dan toleransi.

Selain itu, peran sosialisasi politik yang berlangsung secara informal di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas kerap membentuk pola pikir dan sikap politik pemuda (Kharisma, 2015). Faktor-faktor seperti akses informasi, interaksi sosial, dan pengalaman hidup akan menentukan bagaimana mereka menanggapi isu-isu politik serta sejauh mana mereka terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik harus memberi ruang bagi dialog terbuka dan pembelajaran kontekstual yang relevan dengan realitas sosial pemuda.

Pemberdayaan pemuda juga harus mempertimbangkan tantangan yang muncul dari ketimpangan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang masih dialami sebagian generasi muda di berbagai daerah. Upaya penguatan kapasitas harus diarahkan agar semua pemuda, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam proses pembangunan dan politik. Hal ini akan menghindarkan dari marginalisasi sebagian kelompok pemuda dan memperkuat kohesi sosial serta persatuan nasional.

Lebih jauh, pemberdayaan melalui pendidikan politik yang sensitif terhadap konteks kultural dapat membentuk karakter politik yang berintegritas dan beretika. Pemuda tidak hanya menjadi partisipan politik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu bertindak dengan etika, menghormati perbedaan, serta berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi, pengembangan pendidikan politik dan program pemberdayaan pemuda yang kontekstual dan inklusif menjadi kunci keberhasilan dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya bangsa. Integrasi antara aspek kultural, sosial, dan pendidikan politik yang tepat akan memastikan bahwa pemuda menjadi pilar kuat bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Karsidi (2005) menyampaikan bahwa persoalan kebebasan dan keterikatan kewibawaan dengan orang tua merupakan tantangan penting dalam perkembangan dan pembinaan pemuda,

terutama jika dilihat dalam konteks perbedaan antara masyarakat tertutup dan masyarakat terbuka. Dalam masyarakat tertutup, seperti yang banyak dijumpai di berbagai komunitas tradisional di Indonesia, hubungan kekeluargaan sangat erat dan melekat kuat. Bahkan setelah menikah, seorang anak seringkali diharapkan untuk tinggal bersama orang tua dalam satu rumah besar atau *rumah gadang* simbol nyata dari keterikatan sosial dan budaya yang kuat antar generasi. Kewibawaan orang tua dipandang sebagai hal yang mutlak dan menjadi dasar utama dalam proses pendidikan serta pengambilan keputusan keluarga. Konsep kewibawaan dalam pendidikan pada masyarakat seperti ini sangat berbeda dengan konsep modern yang menekankan pada kemandirian dan otonomi individu.

Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih terbuka dan modern, situasi tersebut mengalami perubahan signifikan. Pemuda didorong untuk segera melepaskan diri dari keterikatan yang erat dengan orang tua dan membangun kemandirian sebagai pribadi dewasa yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keberanian untuk berdiri sendiri menjadi indikator kematangan dan tanda penting masuk ke dalam dunia dewasa. Jadi kewibawaan tidak hanya terpaku pada figur orang tua, tetapi juga pada kemampuan individu dalam membangun hidupnya secara mandiri, berkontribusi pada masyarakat, dan mengambil keputusan secara rasional dan etis.

Pribadi seorang pemuda merupakan suatu organisasi mental yang menyatukan dua dimensi utama, yakni aspek kultural dan aspek individual (Rintjap & Monintja, 2018). Aspek kultural mencakup keseluruhan faktor yang terbentuk dari pengalaman, nilai, norma, serta pembelajaran yang didapatkan dari interaksi dengan kelompok dan komunitas di mana pemuda berada. Aspek ini sangat menentukan bagaimana pemuda memahami dirinya, menginterpretasikan dunia, serta menyesuaikan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Sementara itu, aspek individual mengacu pada faktor-faktor pembawaan, seperti bakat, kepribadian, dan karakter unik yang masing-masing dimiliki pemuda. Variasi dalam aspek individual

menyebabkan perbedaan perilaku dan sikap walaupun berasal dari lingkungan kultural yang sama, sehingga menghasilkan keunikan dan keberagaman dalam cara setiap pemuda mengekspresikan dirinya.

Pemuda Indonesia, oleh karena itu, harus dipandang sebagai entitas yang holistik, yang hidup dan berkembang dalam keseimbangan antara identitas budaya yang diwarisi dan potensi individual yang dimilikinya. Pendekatan dalam pendidikan dan pembinaan pemuda mesti mengakomodasi kedua aspek ini agar hasilnya tidak hanya menghasilkan generasi yang berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal, tetapi juga mampu berinovasi, beradaptasi, dan berkontribusi di dunia yang semakin dinamis dan global.

Dengan pengertian ini, penting bagi lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian pemuda sekaligus menghargai dan menjaga nilai-nilai kultural yang membentuk jati diri mereka. Pembinaan yang berimbang antara kebebasan individu dan kewibawaan kultural akan menghasilkan pribadi pemuda yang matang, bertanggung jawab, dan siap menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan negara.

4. Peranan Pemuda Terhadap Proses Sosialisasi

Ahli-ahli psikologi telah banyak meneliti potensi pertumbuhan manusia dalam kaitannya dengan proses sosialisasi, terutama dalam membentuk kepribadian dan identitas sosialnya. Pada usia dini, seorang bayi yang berusia satu tahun sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap dunia sekitarnya. Mereka mulai mengamati dan memperhitungkan berbagai hal di lingkungan mereka, baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Seiring perkembangan waktu, batas dari dunia yang mereka kenali menjadi semakin luas, dan proses belajar ini berlangsung melalui pengalaman langsung yang terus berkembang.

Pada tingkat awal, persepsi anak terhadap dunia ini merupakan fondasi utama dalam proses sosialisasi (Astari et al, 2024). Persepsi ini merupakan cara anak mempersepsikan realitas melalui indra dan pengalaman mereka, dan menjadi dasar utama dalam membangun konsep diri dan lingkungan sosialnya. Semakin baik fungsi persepsi

tersebut, semakin terintegrasilah anak dengan dunianya sendiri. Dalam konteks sosial, persepsi terhadap lingkungan ini berperan sebagai cikal bakal terbentuknya kemampuan anak untuk beradaptasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dalam masyarakat.

Dalam proses sosialisasi ini, anak-anak tidak hanya berinteraksi secara langsung, tetapi juga merespons dan menanggapi berbagai norma, nilai, dan budaya yang mereka serap dari lingkungan sosialnya. Mereka belajar apa yang dianggap baik, buruk, benar, salah, serta bagaimana mereka harus berperilaku sesuai dengan harapan sosial tersebut. Dari persepsi yang mereka bangun terhadap dunia sosial itu, anak-anak kemudian membentuk konsep-konsep tertentu tentang diri mereka sendiri dan lingkungannya, yang kemudian menjadi dasar bagi mereka dalam berperilaku dan berinteraksi di masa dewasa nanti.

Peran pemuda sebagai individu yang sedang dalam proses sosialisasi sangat signifikan karena mereka sedang dalam fase aktif membangun identitas diri dan memahami posisi mereka dalam masyarakat. Mereka tidak hanya menerima norma dan nilai secara pasif, tetapi juga secara aktif menginterpretasi dan menyesuaikan nilai-nilai tersebut sesuai dengan pengalaman dan kondisi sosial yang mereka hadapi. Pemuda harus mampu mengintegrasikan persepsi terhadap diri sendiri dan lingkungannya secara kritis dan positif, agar mereka mampu menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, proses sosialisasi yang mereka jalani harus didukung oleh lingkungan yang sehat dan mendukung, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas sosial. Nilai-nilai sosial yang positif, pengalaman yang konstruktif, serta proses komunikasi yang terbuka akan membantu pemuda dalam membangun persepsi yang sehat dan konsep diri yang positif. Jadi, pemuda bukan saja menjadi produk sosialisasi, tetapi juga pelaku aktif yang mampu mengubah atau memperkuat lingkungan sosialnya menuju masyarakat yang lebih bermartabat dan beradab.

Secara keseluruhan, peranan pemuda dalam proses sosialisasi ini sangat fundamental karena mereka sedang membentuk dasar kepribadian sosial dan mental yang akan memandu mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka adalah

calon anggota masyarakat yang kelak akan mewarisi dan menjaga keberlangsungan budaya serta tradisi sosial bangsa.

Untuk memahami proses sosialisasi dari sudut "keterlibatan" pemuda, kita dapat melihat pola yang dimulai sejak masa bayi sebagai fase awal interaksi manusia dengan lingkungannya. Bayi dihadapkan pada berbagai rangsangan (*stimuli*) yang sangat beragam dan kadang membingungkan. Di tengah beragam rangsangan tersebut, bayi mulai mengenali stimulus tertentu yang membawa kesenangan dan rasa aman, seperti susu ibu atau benda-benda yang hangat, lembut, dan halus. Pengalaman-pengalaman awal ini sangat penting dalam membentuk respons emosional dan kognitif bayi terhadap lingkungan fisik dan sosialnya.

Respons bayi yang mulai berdiferensiasi ini merupakan tahap awal proses sosialisasi yang lebih kompleks. Bayi mulai menunjukkan preferensi atau ketidaksukaan terhadap benda, peristiwa, dan suasana tertentu, yang menandai kemampuan mereka untuk menilai dan menanggapi lingkungan secara selektif. Respons yang berbeda pula mulai dialami terhadap manusia di sekitarnya. Misalnya, bayi berusia sekitar tiga bulan sudah dapat menanggapi senyum dan ekspresi wajah orang lain sebagai bentuk komunikasi sosial pertama. Pada masa ini, bayi juga mulai mengenali figur orang tua, terutama ibu, dan menunjukkan rasa takut atau kewaspadaan terhadap wajah asing. Fenomena ini menandakan perkembangan kesadaran sosial atau *person awareness*, di mana bayi mulai memahami dirinya sebagai individu yang berbeda dan memiliki relasi dengan orang lain di sekitarnya.

Kesadaran sosial yang muncul pada tahap awal kehidupan ini menjadi fondasi penting bagi proses sosialisasi lanjutannya saat mereka memasuki masa pemudaan. Pada masa pemuda, keterlibatan dalam interaksi sosial menjadi lebih kompleks dan beragam, mencakup berbagai macam hubungan dan lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, komunitas, hingga masyarakat luas. Pemuda belajar menegosiasikan identitasnya, memahami norma sosial, dan menginternalisasi nilai budaya melalui interaksi tersebut. Proses ini tidak hanya membentuk perilaku dan sikap sosial, tetapi juga mengasah

kemampuan beradaptasi dan berpikir kritis terhadap berbagai situasi sosial yang mereka hadapi.

Dalam kaitannya dengan pembinaan dan pendidikan pemuda, pemahaman tentang perkembangan awal sosialisasi ini sangat penting. Ini menggarisbawahi bahwa proses sosialisasi bukan sekadar transfer nilai dan norma secara pasif, tetapi merupakan keterlibatan aktif yang berkelanjutan dalam interaksi sosial yang kompleks (Toron, 2024). Pendidikan politik dan sosial bagi pemuda harus mampu menfasilitasi perkembangan kesadaran sosial ini dengan memberikan pengalaman belajar yang konkret, dialog terbuka, dan pelibatan aktif dalam kegiatan sosial yang membangun. Melalui pendekatan ini, pemuda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memahami nilai-nilai sosial dan politik, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengimplementasikannya secara aktip dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jadi, proses sosialisasi yang dimulai sejak bayi sampai masa pemuda merupakan rangkaian perkembangan yang saling berkesinambungan, menuntun individu untuk mengenal dirinya dan lingkungannya secara semakin mendalam (Gustina et al, 2022). Pemuda yang mampu melalui proses sosialisasi ini dengan baik akan memiliki fondasi kuat untuk menjadi warga negara yang produktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan sosial-politik yang demokratis dan berkeadaban.

5. Kedudukan Pemuda dalam Konsepsi Pendidikan Nasional

Saat ini di Indonesia sedang berkembang dan ditingkatkan pemikiran menuju penyempurnaan konsepsi pendidikan yang dapat disebut sebagai pendidikan nasional. Konsepsi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau struktural pendidikan, tetapi juga berupaya mengakomodasi nilai-nilai filosofis dan antropologis mendasar yang menjadi landasan bagi seluruh proses pendidikan. Salah satu kelompok yang paling dipengaruhi oleh konsepsi pendidikan nasional ini adalah para remaja dan pemuda, yang secara khusus memiliki peranan strategis dalam masa depan bangsa.

Namun, meninjau kedudukan pemuda dalam kerangka pendidikan nasional tidaklah cukup jika hanya dipandang sebagai calon manusia dewasa atau sekadar kader pembangunan bangsa. Pemuda seharusnya dipahami dan dihargai sebagai pribadi manusia yang utuh dengan kepribadian dan kebutuhan yang kompleks. Mereka bukan hanya objek dari proses pembangunan sosial-ekonomi, melainkan subjek yang memiliki hak dan potensi penuh untuk dikembangkan secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, moral, emosional, maupun sosial.

Pandangan ini harus berakar pada sebuah pendekatan antropologis filosofis yang mengakui hakekat manusia dan tujuan hidupnya sebagai dasar utama dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Pendidikan nasional harus secara eksplisit ataupun implisit memuat pemahaman tentang hakekat manusia yang utuh yang tidak hanya menuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran spiritual. Dengan dasar ini, tujuan pendidikan tidak hanya sekadar menghasilkan tenaga kerja produktif, tetapi juga individu yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Sehingga pemuda sebagai bagian dari anak didik memiliki kebutuhan pendidikan yang lebih dari sekadar transfer pengetahuan. Mereka memerlukan pendidikan yang mampu menumbuhkan kesadaran akan identitas diri, mengembangkan kreativitas, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dan moral. Pendidikan yang komprehensif seperti ini akan mempersiapkan pemuda agar mampu berperan sebagai agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar budaya dan nilai luhur bangsa.

Dengan dasar filosofis dan antropologis yang kuat, konsepsi pendidikan nasional harus mampu menjadi pedoman dalam pembinaan pemuda yang harmonis antara pengembangan aspek individual dan sosial-kultural. Pendidikan tidak hanya menjadi jembatan menuju kedewasaan dan peran produktif, tetapi juga proses yang membentuk

manusia seutuhnya pemuda yang berintegritas, berjiwa kemanusiaan, dan mempunyai komitmen tinggi terhadap masa depan bangsa.

Oleh karena itu, upaya penyempurnaan konsepsi pendidikan nasional harus memberi ruang luas bagi pengembangan pemuda sebagai manusia yang berharga dan unik, yang keberadaannya adalah modal utama bagi kemajuan masyarakat dan negara Indonesia. Pendekatan yang holistik ini tentu akan memperkuat peran pendidikan dalam membangun generasi muda yang siap berkontribusi secara optimal, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi juga sebagai pelopor peradaban bangsa yang berdaya saing global.

Di Indonesia, saat ini sedang digalakkan pemikiran untuk menyempurnakan konsepsi pendidikan nasional yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga filosofi dan antropologi pendidikan secara mendalam. Konsepsi pendidikan ini secara langsung mempengaruhi kehidupan remaja dan pemuda sebagai kelompok yang sangat menentukan masa depan bangsa. Namun, ketika meninjau kedudukan pemuda, tidaklah cukup hanya melihat mereka sebagai calon manusia dewasa atau sekadar sebagai kader pembangunan semata.

Pemuda perlu dipandang secara menyeluruh sebagai manusia utuh dengan kepribadian yang kompleks. Mereka bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek dengan hak dan potensi untuk berkembang secara penuh, baik secara intelektual, emosional, moral, maupun sosial. Pandangan menyeluruh ini harus berasal dari pemahaman antropologis filosofis yang menegaskan hakekat manusia dan tujuan hidupnya sebagai dasar utama pendidikan. Jadi, pendidikan nasional harus mengandung pemikiran bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya yang tidak sekadar pintar, tetapi juga berbudi pekerti, berkepribadian, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Konsepsi pendidikan yang berdasarkan pada hakekat manusia ini menjadikan fungsi pendidikan bagi pemuda bukan hanya sebagai alat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, melainkan sebagai sarana pengembangan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan yang demikian memberikan dasar kepada pemuda untuk mengembangkan potensi kreatif, berpikir kritis, dan memiliki jiwa tanggung jawab kepada diri sendiri, lingkungan, dan bangsa. Hal ini terjadi dalam bingkai nilai kebangsaan dan budaya yang harus terus dipupuk dan dijaga.

Jadi pemuda dalam pendidikan nasional harus diberi ruang untuk berkembang sebagai pribadi unik yang memiliki dimensi kultural dan individual sekaligus. Pendidikan yang holistik harus mampu menyeimbangkan aspek pengembangan intelektual dan emosional dengan pewarisan nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan nasional yang demikian akan menghasilkan generasi muda berintegritas, berdaya saing, dan berkomitmen untuk membangun bangsa yang maju serta berkeadaban.

Oleh karena itu, penyempurnaan konsepsi pendidikan nasional harus mengedepankan pembinaan pemuda sebagai manusia yang berharga, bukan sekadar sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan semata. Menurut Bahsoan et al (2025) pendekatan berbasis antropologi dan filosofi pendidikan ini merupakan langkah fundamental agar pendidikan dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkualitas dan siap berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai anak didik, pemuda memiliki sifat-sifat khas yang harus menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan. Dalam menyusun dan melaksanakan tujuan pendidikan, para pendidik harus bergerak secara sistematis dari satu tujuan intermedier ke tujuan intermedier berikutnya, karena pencapaian tujuan yang satu akan menuntut tercapainya tujuan sebelumnya. Pendekatan ini memastikan bahwa semua tujuan pendidikan yang dirumuskan terarah secara realistis dan langsung kepada pencapaian kedewasaan manusia sebagai tujuan akhir pendidikan.

Kedewasaan yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek fisik atau jasmani semata, tetapi lebih luas meliputi kedewasaan intelektual, emosional, sosial, etis, dan religius. Semua dimensi kedewasaan

tersebut sangat penting untuk dijadikan bagian integral dalam konsepsi pendidikan, karena mereka membentuk keseimbangan dan kesempurnaan manusia seutuhnya. Konsepsi pendidikan idealnya harus merancang tujuan-tujuan intermedier secara fungsional agar dapat menghubungkan tahapan-tahapan pembelajaran menuju tujuan akhir, yaitu pembentukan pribadi dewasa yang matang secara holistik.

Tujuan-tujuan tersebut harus disusun dalam satu gambaran integral yang jelas mengenai sifat manusia yang hendak "diciptakan" atau dibentuk melalui proses pendidikan. Setiap tujuan mempunyai fungsi dan peran tertentu dalam konteks interaksi edukatif yakni proses belajar dan mengajar yang berlangsung antara pendidik dan anak didik. Karena tujuan-tujuan ini tersusun secara hierarkis atau berlapis (tektonik), sangat penting bagi konsepsi pendidikan untuk merumuskan tujuan tersebut secara operasional, dengan memperhatikan tiga syarat utama: spesifitas, realitas, dan keterpusatan pada perkembangan anak didik.

Spesifitas berarti tujuan pendidikan harus jelas, terukur, dan terdefinisi dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Realitas menuntut tujuan-tujuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis anak didik agar pendidikan relevan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Sedangkan keterpusatan pada perkembangan anak didik menekankan bahwa pendidikan harus beradaptasi dengan tingkat kematangan dan karakteristik perkembangan individu pemuda, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Pendekatan pendidikan yang memperhatikan semua aspek kedewasaan ini menjamin bahwa proses pembelajaran tidak hanya mengedepankan aspek kognitif, tetapi juga pengembangan kepribadian dan sikap positif yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan semacam ini akan menghasilkan generasi muda yang bukan hanya cerdas secara intelektual, namun juga matang dalam pengendalian diri, berkepribadian kuat, bertanggung jawab sosial, dan beretika dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Oleh karena itu, perancangan dan pelaksanaan pendidikan pemuda

harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa perkembangan manusia bersifat multidimensional dan kompleks. Konsepsi pendidikan yang matang dan operasional akan menjadi landasan yang kuat dalam membimbing pemuda menuju kedewasaan yang sejati, sekaligus mempersiapkan mereka untuk berperan sebagai individu dan warga negara yang produktif, kritis, dan berintegritas.

Di antara berbagai perkembangan tingkah laku pemuda yang merupakan bagian dari tugas-tugas perkembangan penting, perlu adanya perumusan yang lebih lanjut dan mendalam agar proses pembinaan dan pendidikan menjadi lebih terarah dan efektif. Tugas-tugas perkembangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan pemuda yang harus dikuasai dan diwujudkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan.

Pertama, pemuda harus memahami makna kedewasaan jasmaniah dan mampu menerima status sosial berdasarkan jenis kelaminnya. Pemahaman ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga tentang pengenalan diri secara keseluruhan yang mengakar pada kesadaran akan identitas pribadi dan sosial.

Kedua, pemuda diharapkan dapat mengadakan interaksi sosial yang sehat dengan berbagai kelompok pemuda dari kedua jenis kelamin. Hal ini mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang harmonis, saling menghargai, serta memiliki sikap psiko-heteroseksual yang sehat dalam konteks sosial. Keterlibatan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan turut memperkuat keterikatan sosial dan fungsi sosial pemuda.

Ketiga, pemuda harus mampu menjalankan peranan sosial sesuai dengan status kelamin masing-masing, sekaligus menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan individu dalam batas-batas kewajaran. Sikap saling menghargai ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Keempat, pemuda perlu mengasah kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab, baik yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Kematangan dalam pengambilan keputusan ini merupakan tanda penting

kedewasaan sosial dan intelektual yang harus dikembangkan secara intensif (Satar & Yusri, 2019).

Kelima, pemuda harus mampu melepaskan diri dari ketergantungan emosional terhadap orang tua, pendidik utama, atau figur otoritas lainnya. Kemampuan ini menunjukkan kematangan psikologis yang esensial untuk berdiri sebagai individu dewasa yang mandiri dalam kehidupan sosial.

Keenam, pemuda wajib mencapai taraf kemampuan untuk berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan primer bagi diri sendiri dan keluarganya. Kemandirian ekonomis dan sosial ini menjadi dasar kehidupan yang stabil dan produktif dalam masyarakat.

Ketujuh, pemuda perlu diarahkan untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan dalam memilih serta menguasai bidang pekerjaan yang berguna dan konstruktif. Pengembangan keahlian yang sesuai minat dan potensi menjadi modal penting dalam memasuki dunia kerja dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Kedelapan, pemuda harus mampu mengembangkan selera dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan rekreatif dan estetis, yang berlangsung dalam konteks budaya nasional Indonesia. Partisipasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas hidup pribadi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan rasa cinta tanah air.

Kesembilan, mereka harus menghormati kaidah kegotong-royongan sosial dan hukum yang berlaku dalam lingkungan sosial dan lembaga tertentu, serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara demokratis. Rasa keterikatan sosial dan kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan harmonis.

Kesepuluh, pemuda harus memiliki kesatuan nilai etis dan tata susila yang menjadi penuntun tingkah laku sosial serta mampu mewujudkan perilaku nyata yang mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Judrah et al (2024) integritas moral ini merupakan kunci keberhasilan individu dalam berinteraksi dan berkontribusi positif kepada masyarakat dan bangsa.

Dengan perumusan tugas-tugas perkembangan tersebut secara komprehensif, pendidikan dan pembinaan pemuda bisa diarahkan untuk mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, dan kultural secara holistik. Pendekatan ini akan menjadikan pemuda tidak hanya sebagai agen pembangunan semata, tetapi pribadi yang utuh, bertanggung jawab, dan mampu meneruskan dan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dalam menghadapi perubahan global.

M.PARTISIPASI POLITIK

1. Pengertian Partisipasi Politik

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi berarti keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan. Jadi, partisipasi politik secara umum dapat dimaknai sebagai keikutsertaan seseorang maupun kelompok dalam aktivitas yang berkaitan dengan politik, yang mencakup berbagai bentuk tindakan mulai dari diskusi, pemilihan umum, hingga keterlibatan dalam organisasi politik.

Lebih lanjut, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994:5) mendefinisikan partisipasi politik sebagai segala bentuk kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Partisipasi politik dalam pandangan mereka bukan hanya sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menekan, mendukung, atau mengawasi keputusan pemerintah. Keterlibatan ini bisa berbentuk kegiatan formal dan informal, baik secara individu maupun kolektif, sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Senada dengan itu, Surbakti (1992:141) mengungkapkan bahwa sebagai warga negara biasa, masyarakat pasti terpengaruh oleh setiap keputusan yang diambil pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik agar dapat menentukan atau minimal mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Surbakti menggarisbawahi bahwa partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan

yang berhubungan langsung dengan eksistensi dan kesejahteraan mereka dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan penjelasan ahli diatas partisipasi politik dapat disimpulkan sebagai segala bentuk keterlibatan aktif warga negara baik secara individu maupun kelompok dalam proses dan kegiatan politik untuk turut serta memengaruhi, memilih, maupun mengawasi kebijakan dan keputusan pemerintah. Keterlibatan ini sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik merupakan salah satu wujud nyata praktek demokrasi, dan menjadi tolak ukur seberapa matang kesadaran serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Halim et al, 2016).

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik warga negara dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk dan tingkatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, formal maupun informal. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik dianggap sebagai salah satu indikator utama sehat atau tidaknya sistem politik suatu negara, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Secara umum, bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemilihan Umum (Voting)

Bentuk paling jelas dan umum dari partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilu, baik pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun presiden. Melalui pemberian suara, warga negara secara langsung menentukan arah kebijakan dan pemerintahan.

b. Kegiatan di Partai Politik

Bergabung atau aktif dalam partai politik merupakan salah satu cara warga negara mempengaruhi dan memperjuangkan aspirasi politik mereka secara terorganisir.

c. Keterlibatan dalam Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Banyak warga negara memilih berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, LSM, atau kelompok advokasi yang memiliki kepedulian politik, seperti isu lingkungan, hak asasi, atau keadilan sosial.

d. Aksi Sosial dan Demonstrasi

Unjuk rasa, aksi damai, petisi, atau kampanye sosial adalah bentuk partisipasi aktif dalam memperjuangkan perubahan atau mengekspresikan pendapat terhadap kebijakan tertentu yang diambil oleh pemerintah.

e. Memberi Masukan dan Kritik

Partisipasi juga dapat dilakukan melalui kanal-kanal aspirasi seperti mengirim surat pembaca, diskusi publik, konsultasi publik, debat, ataupun memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan gagasan serta kritik terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah.

f. Keterlibatan dalam Proses Legislasi

Masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan undang-undang atau peraturan dengan mengikuti sidang terbuka, memberikan masukan dalam public hearing, atau terlibat dalam drafting peraturan melalui kelompok kerja dan panel konsultasi.

3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Apabila kita amati, bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi politik di setiap negara atau komunitas tidak selalu sama, hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, di antaranya:

a. Tingkat Pendidikan: Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya semakin besar pula pemahaman dan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
b. Akses Informasi: Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi politik dan kebijakan publik, termasuk melalui media massa dan internet, akan mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi.
c. Kepercayaan pada Pemerintah dan Sistem Politik: Rasa percaya terhadap keadilan dan integritas pemerintah maupun institusi politik akan meningkatkan kemauan warga untuk terlibat secara aktif.

d. Lingkungan Sosial dan Budaya: Tradisi, nilai-nilai budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat turut menentukan apakah partisipasi politik didorong atau justru kurang mendapat dukungan.
e. Kondisi Ekonomi: Kesejahteraan ekonomi berpengaruh pada keaktifan warga dalam berpolitik, karena kebutuhan dasar yang terpenuhi memungkinkan mereka untuk berpikir dan terlibat lebih jauh dalam urusan publik.

Partisipasi politik yang aktif, inklusif, dan kritis menjadi fondasi penting bagi pembangunan demokrasi yang kokoh dan pemerintahan yang akuntabel. Upaya peningkatan partisipasi politik harus menjadi perhatian bersama pemerintah, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk menciptakan ruang-ruang partisipatif dan budaya politik yang sehat di Indonesia.

Partisipasi politik adalah hak asasi setiap individu yang dijamin dalam negara-negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Negara demokratis menjadikan partisipasi politik sebagai elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan, karena melalui keterlibatan warga negara dalam urusan politik, roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan akuntabel. Jaminan hak berpartisipasi ini dituangkan dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik, yang memberikan ruang luas bagi warga untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses-proses politik yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Berdasarkan pemikiran Back, et al (2011), partisipasi politik masyarakat dalam sistem demokrasi paling tidak dapat diwujudkan melalui tiga cara utama:

1. Terlibat dalam Arena Publik

Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, dan aspirasi secara terbuka di ruang publik. Wujud nyata dari partisipasi ini antara lain adalah demonstrasi, aksi unjuk rasa, public hearing, dan kampanye sosial yang bertujuan untuk menekan kebijakan pemerintah atau memperjuangkan isu tertentu. Keterlibatan

aktif seperti ini memperlihatkan adanya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menjadi ciri khas negara demokrasi.

2. Menjadi Bagian dari Lembaga Eksekutif atau Legislatif

Hak berpartisipasi juga dapat diwujudkan dengan menjadi anggota lembaga eksekutif (pemerintah) ataupun legislatif (parlemen). Melalui jalur ini, masyarakat dapat secara langsung memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dan ikut serta dalam penentuan arah kebijakan negara. Setiap warga negara pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri atau dipilih sebagai pejabat publik dalam mekanisme demokrasi yang terbuka dan kompetitif.

3. Terlibat dalam Proses Seleksi Pejabat Publik

Selain menjadi kandidat, warga negara juga dapat berpartisipasi dengan mengikuti atau terlibat aktif dalam proses seleksi calon pejabat publik, misalnya melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan anggota dewan. Partisipasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar mendapat legitimasi dari rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka yang memilihnya.

Ketiga bentuk partisipasi yang disampaikan oleh Back, et al menggarisbawahi betapa luas dan beragamnya ruang dan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik di negara demokratis. Partisipasi ini bersifat sukarela, artinya mayoritas masyarakat terlibat atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, bukan paksaan. Hal tersebut meningkatkan responsivitas politik masyarakat: ketika muncul permasalahan dalam dunia politik – baik yang berasal dari kebijakan pemerintah maupun isu yang diangkat oleh kelompok masyarakat lain – warga negara cenderung cepat memberikan reaksi, baik dalam bentuk kritik, aksi damai, maupun upaya advokasi.

Jadi partisipasi politik tidak hanya menjadi hak, tetapi juga perwujudan tanggung jawab warga negara untuk menjaga kualitas demokrasi, mengawal jalannya pemerintahan, serta memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap

pengambilan keputusan politik. Negara perlu terus memberikan dan memperluas ruang serta mekanisme partisipasi politik, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa berkontribusi aktif dalam pembangunan dan pengawasan negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik dalam masyarakat demokratis sangatlah beragam, sebagaimana dijelaskan oleh Teorell (2007) yang membagi partisipasi politik ke dalam lima dimensi utama. Pemahaman terhadap klasifikasi ini menjadi penting agar partisipasi politik tidak sempit diartikan hanya sebagai kegiatan memilih saat pemilihan umum (PEMILU), tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain yang mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Setiap dimensi mencerminkan cara-cara masyarakat memengaruhi, mengawasi, dan menuntut akuntabilitas pemerintah serta politisi dalam sebuah negara demokratis. Adapun untuk kelima dimensi dan penjelasannya adalah sebagai berikut;

1. Electoral Participation

Ini merupakan bentuk partisipasi paling umum yang dikenal masyarakat, yakni memberikan suara dalam PEMILU atau pilkada. Melalui aktivitas ini, warga negara secara langsung berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Electoral participation menjadi indikator utama bagi berfungsinya sistem demokrasi karena mewujudkan hak politik setiap individu.

2. Consumer Participation

Bentuk ini meliputi tindakan warga sebagai "konsumen politik", misalnya melakukan boikot terhadap produk atau layanan yang terkait kebijakan pemerintah, serta menginisiasi atau menandatangani petisi. Sikap kritis masyarakat terhadap isu publik dan kebijakan pemerintah lewat tindakan konsumen politik bukan hanya bentuk protes, tetapi juga sarana untuk menyalurkan aspirasi secara mandiri dan kolektif.

3. Party Activity

Dimensi ini mencakup kegiatan aktif di partai politik, seperti menjadi anggota, menyumbangkan dana, membantu kampanye, atau bekerja secara sukarela. Partisipasi dalam partai politik memungkinkan

warga negara berperan langsung dalam pengambilan keputusan strategis, membentuk agenda politik, dan membangun platform perjuangan bersama.

4. Protest Activity

Aktivitas ini meliputi demonstrasi, unjuk rasa, dan bentuk pernyataan sikap kolektif lainnya, sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah atau isu tertentu. Protest activity tidak hanya menjadi saluran ekspresi pendapat, tetapi juga alat penting dalam menekan pemerintah dan mendorong reformasi serta akuntabilitas kebijakan publik. Contoh nyata di Indonesia adalah demonstrasi pelajar pada tahun 2019 yang menuntut revisi Rancangan UU KPK; aksi ini merupakan refleksi partisipasi politik yang dijamin konstitusi dan penting bagi demokrasi.

5. Contact Activity

Bentuk ini mencakup interaksi langsung warga negara dengan pemerintah, politisi, atau organisasi milik pemerintah, baik secara formal maupun informal. Contohnya antara lain mengirim surat aspirasi, melakukan audiensi, atau berdialog dengan wakil rakyat, yang berperan dalam proses advokasi, konsultasi kebijakan, dan pengawasan terhadap kerja pemerintah.

Berdasarkan kelima dimensi yang dijelaskan oleh Teorell, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik itu multidimensional dan fleksibel. Tidak ada satu bentuk tunggal yang menjadi syarat utama, melainkan berbagai cara yang sah untuk menyalurkan aspirasi dan memenuhi hak warga negara. Di Indonesia sendiri, berbagai bentuk partisipasi ini telah diakomodasi oleh sistem politik dan dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk berpendapat, berorganisasi, dan mengambil peran dalam perubahan kebijakan.

Penting bagi masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang tersedia, sehingga keterlibatan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya terbatas pada pemilihan umum. Dengan keaktifan dalam kelima dimensi tersebut, warga dapat berfungsi sebagai agen kontrol sosial

dan motor penggerak demokrasi, serta memastikan bahwa pemerintah selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Aktif

Partisipasi politik yang aktif dan bermakna dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan sosial. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik secara luas dan inklusif.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran politik dan kemampuan berpartisipasi secara aktif. Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki pemahaman lebih baik tentang proses politik, hak dan kewajiban warga negara, serta cara menyuarakan aspirasi mereka secara efektif.

2. Akses Informasi dan Media

Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi politik melalui media massa dan media sosial mempengaruhi tingkat partisipasi. Informasi yang akurat dan transparan meningkatkan kesadaran politik dan mendorong warga untuk terlibat dalam kegiatan politik.

3. Kepercayaan pada Pemerintah dan Sistem Politik

Kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi dan kinerja pemerintah sangat menentukan motivasi mereka untuk berpartisipasi. Ketika warga merasa pemerintah responsif dan adil, partisipasi mereka cenderung meningkat. Sebaliknya, ketidakpercayaan bisa memicu apatisme atau bahkan sikap antipolitik.

4. Norma Sosial dan Budaya

Budaya politik yang menanamkan nilai-nilai partisipasi, musyawarah, dan toleransi mendorong warga untuk aktif berkontribusi dalam kehidupan politik. Sebaliknya, norma yang mengekang atau mengabaikan suara rakyat dapat menghambat partisipasi.

5. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial memberi ruang dan

waktu bagi individu untuk memperhatikan urusan politik. Sebaliknya, masalah kemiskinan dan tekanan kehidupan sehari-hari dapat mengalihkan fokus dan mengurangi partisipasi politik.

6. Pengalaman dan Motivasi Individu

Motivasi pribadi, pengalaman berpolitik, dan rasa keterikatan dengan isu yang diperjuangkan meningkatkan partisipasi. Orang yang merasa kebijaksanaan politik berdampak langsung pada kehidupan mereka biasanya lebih aktif.

5. Dampak Partisipasi Politik bagi Ketahanan Demokrasi

Partisipasi politik yang luas dan aktif berdampak langsung pada ketahanan dan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat dan stabil ditandai oleh tingginya tingkat partisipasi warga yang secara langsung memengaruhi legitimasi pemerintah dan kebijakan publik.

a. Menguatkan Legitimasi Pemerintah: Partisipasi luas dalam pemilihan dan pengambilan keputusan memperkuat legitimasi dan akuntabilitas institusi politik, sehingga pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap rakyat.
b. Mendorong Transparansi dan Anti-Korupsi: Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan kinerja pemerintah mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi.
c. Mengembangkan Kesadaran Politik dan Sosial: Partisipasi yang berkelanjutan menumbuhkan budaya politik yang sadar dan kritis, yang mendukung pembangunan masyarakat demokratis.
d. Mengurangi Ketegangan Sosial: Melalui partisipasi politik, berbagai aspirasi dan konflik sosial dapat disalurkan secara damai dan konstruktif, menjaga kohesi sosial dan stabilitas negara.
e. Memperkuat Perlindungan Hak Asasi: Partisipasi warga menjadi mekanisme kontrol sosial yang menjaga penghormatan terhadap hak-hak individu sekaligus memajukan keadilan sosial.

Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik dapat mengakibatkan demokrasi yang rapuh, pemerintahan yang tidak efektif, dan

meningkatnya konflik sosial serta rasa ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan partisipasi politik merupakan hal yang sangat krusial untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berdaya tahan tinggi di Indonesia.

6. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Politik di Indonesia

Dalam rangka memperluas dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia, diperlukan berbagai strategi dan kebijakan yang strategis, inovatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, serta ekonomi yang beragam. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi semata, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi tersebut bermakna dan mampu memperkuat demokrasi serta keberlanjutan sistem pemerintahan. Diantara strategi dan kebijakan yang bisa dilaksanakan yakni melalui (Al Farisi et al, 2025);

1. Pendidikan Politik yang Inklusif dan Berjenjang

Pendidikan politik harus dimulai sejak usia dini melalui kurikulum formal di sekolah dan institusi pendidikan lainnya serta melalui kegiatan nonformal seperti pelatihan dan seminar masyarakat. Pendidikan ini harus mampu menyampaikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pentingnya partisipasi aktif secara sistematis dan berkelanjutan. Program pendidikan ini perlu dikembangkan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan daerah tertinggal.

2. Penguatan Peran Media dan Teknologi Digital

Pemanfaatan media massa dan media sosial secara maksimal dapat memperluas akses informasi politik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama generasi muda. Pemerintah dan lembaga terkait harus mampu menyediakan platform digital yang aman, transparan, dan edukatif untuk mendukung partisipasi aktif. Kampanye digital yang menarik dan edukatif dapat menjadi instrumen efektif untuk menarik partisipasi warga di era modern ini.

3. Perluasan Ruang Partisipasi

Pengembangan forum-forum dialog, konsultasi publik, dan

mekanisme pengambilan keputusan berbasis masyarakat di tingkat desa, kecamatan, maupun kota-kota besar harus terus didorong. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan melalui musyarawah, forum warga, dan parlemen rakyat kian penting dalam memperkuat demokrasi partisipatif.

4. Reformasi Regulasi dan Peran Lembaga Pengawas

Peraturan perundang-undangan perlu terus direvisi dan disusun agar lebih menjamin hak-hak warga dalam berpartisipasi politik secara aman, terukur, dan efektif. Selain itu, lembaga pengawas, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan lembaga surat kabar serta komunitas civitas masyarakat madani, harus diberdayakan sebagai pelaku utama pengawasan dan kontrol terhadap jalannya proses politik.

5. Meningkatkan Kesadaran dan Kepercayaan Publik

Konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang transformatif, adil, dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Program-program pelibatan warga harus didesain untuk memperlihatkan hasil nyata dari partisipasi mereka agar tercipta budaya politik yang positif dan berkelanjutan.

6. Fasilitasi dan Dukungan terhadap Kegiatan Politik dan Sosial

Pemerintah dan organisasi masyarakat harus mendukung kegiatan politik yang produktif dan konstruktif, termasuk melalui bantuan dana, pelatihan, dan fasilitas lainnya yang membuka peluang lebih luas bagi warga untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial akan memperkuat jalinan demokrasi yang inklusif.

Melalui implementasi kebijakan dan strategi ini, diharapkan partisipasi politik masyarakat Indonesia tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan bermakna. Partisipasi aktif warga akan memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berdaulat.

N. Demokrasi dan Demonstrasi

1. Pengertian Demokrasi

Secara bahasa atau etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos (cratos)/ kratein (cratein)" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diterjemahkan sebagai "pemerintahan rakyat" atau "rakyat berkuasa". Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang menjadi sumber legitimasi setiap keputusan politik dan pemerintahan.

Pengertian demokrasi yang paling luas dikenal di kalangan masyarakat dunia adalah definisi Abraham Lincoln pada tahun 1863, yaitu "*the government FROM the people, BY the people, and FOR the people*" yang bermakna pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Berikut untuk penjelasannya;

a. Pemerintahan dari rakyat menandakan bahwa pemerintah memperoleh mandat dan legitimasi dari rakyat melalui mekanisme yang sah, seperti pemilihan umum.
b. Pemerintahan oleh rakyat memberi arti bahwa pelaksanaan kekuasaan dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis.
c. Pemerintahan untuk rakyat menegaskan bahwa segala kebijakan, program, dan hasil keputusan harus berorientasi pada kesejahteraan, kepentingan, dan kebutuhan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi tidak lagi berada di tangan individu atau kelompok kecil, tetapi benar-benar berada di tangan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sistem ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang adil, transparan, serta mampu menjamin partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan negara.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya Qodratillah (2011:91), demokrasi dijelaskan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat secara kolektif ikut serta dalam lingkungan pemerintahan, baik langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Partisipasi ini menjadi indikator utama keberhasilan sistem demokrasi dalam mengakomodasi aspirasi dan suara seluruh elemen masyarakat.

Selanjutnya, menurut Alamudi (dalam Haridito, 2010), dijelaskan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan suatu seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dirumuskan dan diimplementasikan melalui praktik dan prosedur yang telah melalui proses sejarah panjang dan sering penuh liku-liku. Demokrasi dalam pandangan ini adalah upaya pelembagaan kebebasan yang melibatkan berbagai mekanisme legal dan sosial untuk melindungi hak hampir setiap warga negara, sekaligus menjaga keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat yang beragam.

Pelembagaan kebebasan yang menjadi inti demokrasi tersebut menuntut adanya mekanisme kontrol dan partisipasi publik yang berkelanjutan agar demokrasi tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sistem pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan inklusif. Sistem ini juga membuka ruang bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak politik mereka, termasuk di dalamnya kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi.

2. Hubungan Demokrasi dan Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan manifestasi nyata dari partisipasi politik dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi. Demonstrasi bukan sekadar aksi protes, melainkan bagian integral dari dinamika demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kritik, maupun tuntutan terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu (Nabillah, 2024). Dalam konteks demokrasi yang sehat, demonstrasi adalah salah satu mekanisme legitimasi sosial yang memastikan pemerintah tetap responsif dan akuntabel kepada rakyatnya.

Contoh terbaru, gerakan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang turun ke jalan pada tahun 2019 menuntut penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) menunjukkan betapa demonstrasi menjadi bagian dari partisipasi politik yang dilindungi oleh konstitusi. Tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan keberanian dan kesadaran politik generasi muda, tetapi juga memperkuat nilai demokratis dalam penyampaian pendapat dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Demokrasi dan demonstrasi saling berkaitan erat sebagai bagian dari sistem politik yang membuka ruang demokratis bagi masyarakat untuk menentukan nasib politik dan sosialnya. Kedua elemen ini menjadi pilar utama bagi terciptanya pemerintahan yang benar-benar berdaulat rakyat, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

3. Jenis-jenis Demokrasi

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memiliki dua bentuk utama yang membedakannya berdasarkan cara keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

Menurut Winarno (2015:99), demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi di mana seluruh warga negara secara langsung ikut berpartisipasi dalam musyawarah dan pengambilan keputusan terkait kebijakan umum dan pembuatan undang-undang. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk secara aktif menyampaikan pendapat dan menentukan kebijakan secara langsung tanpa perantara. Contoh praktik demokrasi langsung meliputi pemilihan umum (PEMILU), pengorganisasian demonstrasi dan unjuk rasa, serta pemilihan ketua organisasi seperti OSIS di sekolah. Bentuk demokrasi ini mencerminkan keterlibatan rakyat yang sangat aktif dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

Sebaliknya, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah sistem di mana rakyat memberikan kekuasaan kepada wakil-wakil yang telah dipilih untuk mewakili suara mereka dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam demokrasi tidak

langsung, rakyat tidak secara langsung terlibat dalam setiap keputusan, melainkan memilih perwakilan seperti anggota DPR yang bertugas menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan atas nama mereka. Sebagai contoh, pemilihan ketua umum DPR merupakan bagian dari demokrasi tidak langsung, karena yang berhak memilih adalah anggota DPR sebagai wakil rakyat, bukan seluruh warga secara langsung.

Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan hak politiknya melalui wakil yang dipercayainya dalam lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh wakil tersebut harus mencerminkan kepentingan rakyat secara menyeluruh dan tidak boleh merugikan atau menindas rakyat. Prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara menjadi landasan utama supaya demokrasi berjalan sesuai dengan tujuan mulia sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Kedua bentuk demokrasi tersebut memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Demokrasi langsung memberikan ruang partisipasi yang luas dan transparan, namun bisa menjadi kurang efektif dalam skala populasi besar dan pengambilan keputusan yang kompleks. Sedangkan demokrasi tidak langsung memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisien serta profesioanl, tetapi membutuhkan kepercayaan tinggi dari rakyat kepada wakilnya dan pengawasan yang ketat agar wakil tersebut benar-benar bertindak sesuai aspirasi rakyat.

Dalam praktik negara-negara demokratis modern, termasuk Indonesia, sistem demokrasi yang berlaku umumnya merupakan kombinasi antara demokrasi langsung dan tidak langsung, di mana warga negara berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum dan melalui wakil rakyat dalam berbagai proses legislatif dan kebijakan pemerintahan (Asshiddiqie, 2006). Kombinasi ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan efisiensi pemerintahan sekaligus menjaga keterlibatan dan representasi rakyat secara optimal.

4. Prinsip dan Indikator Negara Demokrasi

Dalam memahami konsep demokrasi secara lebih mendalam, penting untuk mengetahui prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasi dan sekaligus indikator keberhasilan suatu negara dalam menjalankan sistem demokrasi.

Menurut Maswadi Rauf (1997:14), demokrasi didirikan atas dua prinsip utama:

a. Kebebasan atau Persamaan (Freedom/Equality)
b. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Kebebasan ini mencakup kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, serta kebebasan memilih maupun dipilih, tanpa diskriminasi. Persamaan di sini tidak hanya secara formal, tetapi juga harus tercermin dalam praktik keseharian masyarakat, sehingga semua individu memiliki kesempatan yang setara dalam mengambil bagian dalam proses demokrasi.
c. Kedaulatan Rakyat (People's Sovereignty). Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai sumber legitimasi setiap pemerintahan dan kebijakan. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak dan kepentingan warga negara. Tidak ada kekuasaan yang berdiri sendiri tanpa persetujuan atau dukungan rakyat dalam sistem demokrasi sejati.

Lebih lengkap, Alamudi (dalam Haridito, 2010) merinci indikator-indikator penting yang menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi atau masih dianggap demokrasi:

a. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan sebagai dasar sistem politik harus nyata dalam proses pengambilan keputusan dan legitimasi pemerintahan.

b. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan yang Diperintah

setiap kebijakan dan tindakan pemerintah haruslah berdasarkan persetujuan rakyat yang diperintah, mencerminkan prinsip representasi dan partisipasi.

c. Kekuasaan Mayoritas

Dalam pengambilan keputusan, suara mayoritas menjadi penentu, namun bukan berarti tanpa menghormati hak minoritas.

d. Pengakuan Hak-Hak Minoritas

Sistem demokrasi yang sehat harus melindungi hak-hak kelompok minoritas agar tidak terpinggirkan dan tetap dihargai.

e. Jaminan Hak Asasi Manusia

Hak-hak dasar warga negara harus dijamin dan dilindungi tanpa diskriminasi dan pelanggaran.

f. Pemilihan yang Bebas dan Jujur

Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus dilaksanakan secara bebas, adil, transparan, dan kompetitif.

g. Persamaan di Depan Hukum

Semua warga negara diperlakukan sama menurut hukum tanpa adanya diskriminasi.

h. Proses Hukum yang Wajar

Tersedianya proses hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak merupakan jaminan keadilan dalam sistem demokrasi.

i. Pembatasan Pemerintah secara Konstitusional

Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

j. Pluralisme Sosial, Ekonomi, dan Politik

Keberagaman dalam masyarakat harus dihargai dan diakomodasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa dominasi kelompok tertentu.

k. Nilai-Nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerjasama, dan Mufakat

Demokrasi tidak hanya tentang aturan, tetapi juga nilai sosial yang mendorong toleransi terhadap perbedaan, sikap pragmatis dalam penyelesaian masalah, kerjasama antar elemen masyarakat, serta mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan kolektif.

Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur bagi bangsa dan negara dalam menilai kualitas demokrasi yang dijalankan. Negara yang mampu mengimplementasikan prinsip dan indikator ini secara konsisten menunjukkan kematangan dan stabilitas demokrasi yang dapat membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya secara berkelanjutan.

5. Demonstrasi

Dalam kajian kebahasaan, terutama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah demonstrasi memiliki dua makna utama yang berbeda konteksnya. Pertama, demonstrasi dapat berarti suatu peragaan atau pertunjukan yang menunjukkan cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, seperti dalam konteks demonstrasi fisika atau demonstrasi keterampilan. Bentuk ini lebih kepada metode pembelajaran atau penyampaian teknik tertentu secara praktis dan visual.

Kedua, demonstrasi diartikan sebagai pernyataan protes yang dilakukan secara massal oleh sekelompok orang dan lebih dikenal sebagai unjuk rasa. Dalam konteks politik dan sosial, pengertian kedua inilah yang menjadi fokus utama pembahasan. Demonstrasi sebagai tindakan protes massal merupakan bentuk ekspresi kolektif dari aspirasi, ketidakpuasan, atau tuntutan warga negara terhadap kebijakan atau kondisi tertentu yang dianggap tidak adil, merugikan, atau perlu diperbaiki (Hutasoit, 2023).

Pendapat ini diperkuat oleh A. Partanto (2001:100) yang mengartikan demonstrasi sebagai unjuk rasa yang dilakukan bersama-sama sebagai bentuk tindakan kolektif. Demonstrasi tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga alat penting dalam mengontrol dan mengawasi kebijakan publik, serta menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa demonstrasi dalam konteks politik adalah suatu tindakan protes yang dilakukan oleh massa secara terorganisir sebagai bentuk partisipasi politik aktif. Demonstrasi memberikan suara kepada kelompok masyarakat yang mungkin merasa tidak terdengar dalam mekanisme politik formal, sehingga fungsi demonstrasi menjadi krusial bagi kelangsungan demokrasi yang sehat dan dinamis.

Dalam demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi (Aulianisa & Aprilia, 2019). Melalui demonstrasi, warga negara dapat mengekspresikan ketidakpuasan sekaligus membangun

kesadaran sosial mengenai isu-isu tertentu. Namun, demonstrasi juga menuntut tanggung jawab dan kesadaran hukum agar pelaksanaannya tetap berlangsung damai, tertib, dan tidak merugikan kepentingan umum.

Jadi, demonstrasi bukan semata bentuk kerusuhan atau gangguan, melainkan bagian integral dari dinamika demokrasi untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap hidup dan pemerintahan tetap mendapat pengawasan serta evaluasi dari masyarakat.

6. Pelaksanaan Demonstrasi di Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi yang secara tegas menjamin dan melindungi hak setiap warganegaranya, termasuk hak untuk menyampaikan dan mengeluarkan pendapat. Dalam kerangka hukum nasional, hak ini tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis maupun melalui media massa, serta hak untuk berserikat dan berkumpul.

Hak untuk menyampaikan pendapat tersebut tidak hanya dilindungi oleh konstitusi nasional Indonesia, tetapi juga oleh instrumen hak asasi internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebagai prinsip dasar yang diakui dunia, juga menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental setiap individu.

Lebih spesifik, pelaksanaan hak ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang konkret bagi warga negara untuk melakukan demonstrasi dan unjuk rasa secara sah dan teratur, dengan tujuan menyalurkan aspirasi, kritik, dan tuntutan kepada pemerintah serta institusi publik dalam sistem demokrasi.

Penegakan hukum dan pelaksanaan undang-undang tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu wujud nyata demokrasi yang berfungsi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demonstrasi, sebagai salah satu bentuk partisipasi politik, menjadi sarana penting

bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kehendak rakyat.

Namun, pelaksanaan demonstrasi di Indonesia juga mengandung tanggung jawab sosial dan hukum agar kegiatan tersebut berlangsung tertib, aman, dan tidak merugikan kepentingan umum. Regulasi yang jelas mengatur tata cara, prosedur, dan batasan dalam pelaksanaan demonstrasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, demonstrasi menjadi mekanisme vital yang memperkuat fungsi check and balance antara pemerintah dan rakyat serta menegaskan kehidupan politik yang terbuka dan partisipatif. Melalui demonstrasi, suara rakyat dapat terdengar, aspirasi disalurkan, dan kepentingan bersama dapat diperjuangkan secara efektif dan beradab.

Dijaminnya kemerdekaan berpendapat di muka umum merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan yang termaktub dalam nilai-nilai luhur Pancasila (Harefa & Fatolosa, 2020), khususnya sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hak ini menjadi landasan bagi terbentuknya demokrasi di Indonesia, di mana setiap warga negara diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi demi kebaikan bersama dan pembangunan bangsa.

Namun, meskipun negara menjamin hak ini secara konstitusional, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap individu bisa menyampaikan pendapat sesuka hati tanpa batas atau aturan. Kebebasan berpendapat tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan hukum agar tidak menimbulkan kerusuhan, kekerasan, atau gangguan ketertiban umum yang justru merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan secara aman, tertib, dan damai agar pesan yang disampaikan efektif dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan.

Pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam demokrasi haruslah menerapkan asas tanggung jawab, yakni setiap tindakan atau ucapan

harus memperhatikan norma hukum dan tata tertib yang berlaku. Dua prinsip penting ini kebebasan dan tanggung jawab harus berjalan seiring agar demokrasi dapat hidup dan berkembang dengan sehat. Selain itu, menurut Ariany & Perdana (2024) koeksistensi antara hak individu dan kepentingan umum merupakan kunci agar hak menyampaikan pendapat tidak disalahgunakan untuk tujuan destruktif atau melanggar hak-hak orang lain.

Dalam konteks hukum Indonesia, aturan terkait pelaksanaan kebebasan berpendapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, termasuk perundang-undangan yang mengatur tentang demonstrasi dan unjuk rasa, yang mengatur tata cara, persyaratan, serta batasan-batasan untuk menjamin demokrasi yang bertanggung jawab dan damai. Pendapat yang disampaikan harus menghormati ketertiban umum, keamanan nasional, dan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat.

Jadi, kebebasan berpendapat yang dijamin negara tidak hanya sebagai hak mutlak, tetapi juga harus dipraktikkan dengan kesadaran akan tanggung jawab moral dan legal, serta rasa hormat terhadap keberagaman dan kerukunan sosial. Pendekatan ini bukan hanya menjaga ketertiban publik, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan sosial, sehingga suara rakyat dapat terakomodasi tanpa menimbulkan keresahan sosial.

Penyampaian pendapat oleh warga negara dapat dilakukan berbagai cara, baik secara tertulis, lisan, maupun melalui metode lain yang dianggap efektif, selama dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kebebasan menyampaikan pendapat ini merupakan hak fundamental, namun harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial terhadap dampak yang mungkin timbul dari penyampaian pendapat tersebut (Aisyah, 2021).

Penyampaian pendapat secara lisan bisa dilakukan melalui sejumlah cara, antara lain mediasi, dialog publik, hingga demonstrasi. Menurut Sentosa & Widarto (2024) demonstrasi sendiri merupakan salah satu bentuk paling umum dari penyampaian pendapat yang dapat

dilakukan secara individu maupun secara massa di muka umum. Kegiatan demonstrasi biasanya bersifat demonstratif dan bertujuan untuk menyuarakan tuntutan, kritik, atau aspirasi kepada pemerintah atau pemangku kebijakan.

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara tegas mengatur bahwa penyampaian pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi adalah salah satu cara yang diperbolehkan dan dilindungi. Selain demonstrasi, warga negara juga dapat menyampaikan pendapat secara terbuka melalui pawai, rapat umum, mimbar bebas, atau forum-forum diskusi publik lainnya. Beragam media ini memberikan fleksibilitas bagi warga untuk mengekspresikan pendapat sesuai dengan kondisi dan tujuan mereka.

Namun demikian, penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai dengan sejumlah asas yang menjadi pijakan utama, untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil, tertib, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Asas-asas tersebut meliputi:

a. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Setiap warga berhak menyampaikan pendapat, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan tidak mengganggu kepentingan umum.

b. Asas Musyawarah Mufakat

Penyampaian pendapat hendaknya didasarkan pada semangat dialog dan mencari kesepakatan bersama, bukan pada pertentangan atau konflik yang berlebihan.

c. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Pelaksanaan kebebasan berpendapat harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan hak.

d. Asas Manfaat

Aktivitas penyampaian pendapat harus memberikan manfaat positif, tidak sekadar menimbulkan kegaduhan atau kerugian bagi masyarakat luas.

e. Asas Profesionalitas

Pelaksanaan penyampaian pendapat harus dilakukan secara terorganisir dan bertanggung jawab, menjaga norma-norma etika dan sopan santun dalam interaksi sosial dan politik.

Dengan berlandaskan pada asas-asas tersebut, penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan secara efektif, kondusif, dan mencerminkan kualitas demokrasi yang tinggi. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, di mana kebebasan berekspresi terlindungi sekaligus ketertiban sosial tetap terjaga.

O. Hubungan Demokrasi dengan Demonstrasi

Demonstrasi merupakan fenomena yang tidak asing dan sangat biasa terjadi dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini karena demonstrasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari hak-hak politik dan kebebasan berekspresi yang dilindungi dalam sistem pemerintahan demokratis (Wahyuni & Desiandri, 2024). Negara demokrasi memberikan ruang yang luas dan jaminan hukum bagi warga negara untuk mengadakan demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi, kritik, dan tuntutan secara terbuka dan kolektif.

Kehadiran demonstrasi dalam kehidupan politik suatu negara demokrasi justru merupakan indikator bahwa demokrasi tersebut berjalan dengan sehat. Demonstrasi menunjukkan bahwa tidak ada penghalang atau pembatasan yang bersifat otoriter terhadap hak-hak dasar warga negara (Suarlin & Fatmawati, 2022), termasuk hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Pemerintah dan lembaga negara dalam sistem demokrasi yang baik akan menghargai dan melindungi hak ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk memastikan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Alamudi (dalam Haridito, 2010), salah satu indikator utama keberadaan negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia tersebut meliputi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, di mana demonstrasi merupakan salah satu manifestasi nyata dari hak-hak tersebut. Karena itu, demonstrasi

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan demokrasi dan justru menjadi mekanisme penting bagi warga negara untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Demonstrasi memungkinkan masyarakat untuk bersuara secara langsung mengenai berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan mereka, sehingga menjaga dinamika demokrasi tetap hidup dan responsif terhadap perubahan. Tanpa adanya ruang yang memadai bagi demonstrasi dan kebebasan berekspresi, demokrasi akan kehilangan esensinya dan berpotensi berubah menjadi sistem otoriter di mana suara rakyat tidak didengar.

Jadi, hubungan antara demokrasi dan demonstrasi bersifat simbiotik dan esensial; demokrasi menyediakan fondasi hukum dan moral bagi pelaksanaan demonstrasi, sementara demonstrasi menjadi alat vital yang menjaga agar demokrasi tetap hidup, dinamis, dan berkeadilan. Pelaksanaan demonstrasi yang sesuai dengan aturan dan etika demokrasi akan memperkuat pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan rakyat

Meskipun demonstrasi merupakan hak asasi yang melekat pada setiap warga negara dan dijamin dalam sistem demokrasi, terdapat pandangan kritis dari tokoh-tokoh filsafat klasik seperti Plato dan Aristoteles yang menyatakan bahwa kebebasan yang terlalu luas dalam menjalankan hak asasi manusia, termasuk demonstrasi, justru dapat melemahkan sistem demokrasi itu sendiri. Plato dan Aristoteles berargumen bahwa klaim hak asasi yang berlebihan, tanpa disertai tanggung jawab, dapat menyebabkan ketidakteraturan dan kekacauan dalam masyarakat.

Menurut Aristoteles, apabila tindakan-tindakan demokratis seperti demonstrasi tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial dan kesadaran hukum, hal itu dapat membuka peluang munculnya anarkisme dan penyalahgunaan kekuasaan mayoritas. Jadi mayoritas yang mendominasi bisa bertindak sewenang-wenang atas nama rakyat, sehingga menyalahi prinsip keadilan dan keseimbangan yang seharusnya dijaga dalam demokrasi. Fenomena seperti ini berpotensi

mengancam stabilitas demokrasi dan menimbulkan konflik sosial yang merugikan seluruh rakyat.

Namun demikian, terlepas dari potensi risiko tersebut, esensi utama demokrasi tetaplah menempatkan partisipasi rakyat sebagai pilar utama dalam pengelolaan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Demokrasi hadir untuk memberikan ruang bagi seluruh warga negara agar dapat mengakses dan memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak menyampaikan pendapat secara bebas dan damai. Oleh karena itu, negara modern yang mengadopsi sistem demokrasi wajib secara konsisten memberikan kesempatan bagi warga untuk menggunakan hak-haknya dalam batas-batas yang diatur oleh hukum dan etika bersama.

Dengan kata lain, walaupun demonstrasi memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan jika disalahgunakan, hak tersebut tidak dapat dicabut atau dikurangi begitu saja, mengingat perannya yang strategis sebagai saluran suara rakyat dan alat pengawasan terhadap pemerintah. Harefa & Fatolosa (2020) menyatakan bahwa demokrasi dan demonstrasi secara hakiki merupakan sistem yang saling mempengaruhi dan saling memperkuat satu sama lain. Demonstrasi menjadi salah satu mekanisme yang memastikan bahwa demokrasi berjalan secara dinamis, transparan, dan akuntabel.

Kesimpulannya, demokrasi memang membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keteraturan. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga agar demonstrasi serta bentuk partisipasi politik lainnya berlangsung dengan efektif dan damai, sehingga demokrasi dapat terus berkembang sebagai sistem pemerintahan yang menghormati hak-hak asasi sekaligus menjamin ketertiban dan stabilitas sosial.

P. Sejarah Demonstrasi Mahasiswa di Indonesia: Gerakan 1966 dan 1998

Catatan sejarah Indonesia mencatat dua fenomena besar unjuk rasa yang sangat signifikan dan melibatkan peran aktif pelajar dan mahasiswa, yaitu gerakan mahasiswa pada tahun 1966 dan 1998. Kedua gerakan ini bukan hanya sekadar aksi protes biasa, melainkan momentum penting yang menandai perubahan besar dalam sejarah politik dan pemerintahan Indonesia.

Gerakan mahasiswa tahun 1966 muncul sebagai respons keras terhadap ketidakpuasan rakyat dan mahasiswa terhadap pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni rezim Presiden Soekarno. Kondisi ekonomi yang memburuk, ketegangan politik, serta krisis legitimasi pemerintahan mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan menyuarakan tuntutan perubahan. Gerakan ini dikenal sebagai Angkatan 66 atau Eksponen 66, dimana mahasiswa secara aktif mengorganisir unjuk rasa dan berbagai aksi politik lainnya. Tekanan dan protes yang masif tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan Bung Karno mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan, menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi orde baru.

Kemudian, pada tahun 1998, terjadi gerakan mahasiswa yang juga sangat berdampak besar dalam sejarah nasional Indonesia. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan yang mendalam dari rakyat dan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela, ditambah kondisi ekonomi yang sangat memburuk akibat krisis moneter Asia, menjadi pemicu utama aksi demonstrasi. Gerakan mahasiswa tersebut dikenal dengan nama Angkatan 98 atau Pengawal Reformasi, yang menuntut reformasi politik, sosial, dan ekonomi. Tekanan dari gerakan ini akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatan pada Mei 1998, membuka babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Kedua momentum historis ini menegaskan peran penting pemuda, khususnya mahasiswa, sebagai agen perubahan sosial-politik yang

mampu memobilisasi kekuatan massa untuk menuntut perbaikan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Demonstrasi dan gerakan mahasiswa menjadi simbol aspirasi rakyat yang mendesak perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, gerakan 1966 dan 1998 juga menunjukkan bagaimana demonstrasi dalam demokrasi bukan sekadar bentuk protes sosial, tetapi memiliki kekuatan strategis yang dapat membawa perubahan fundamental dalam arah dan kebijakan negara. Faktor keberhasilan gerakan ini tidak hanya terletak pada jumlah massa yang turun ke jalan, tetapi juga pada kesadaran kolektif, strategi politik yang matang, serta dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat.

Memahami sejarah gerakan mahasiswa seperti ini penting untuk mengapresiasi nilai demokrasi dan peran partisipasi politik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Gerakan-gerakan tersebut menginspirasi generasi muda masa kini untuk tetap kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam berperan sebagai penjaga demokrasi dan pembangunan bangsa. Bercermin dari dua peristiwa besar tersebut, dapat dipahami bahwa kekuatan dan dampak yang dihasilkan oleh gerakan atau unjuk rasa yang dilakukan oleh pemuda, terutama mahasiswa, sangat profound dan mampu mengubah jalannya sejarah bangsa.

Keberhasilan gerakan tahun 1966 dan 1998 yang mampu menggulingkan pemimpin negara membuktikan bahwa aksi massa yang terorganisasi dan penuh semangat patriotik bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang sangat besar dalam sistem demokrasi. Namun, di balik keberhasilannya, sejarah juga mencatat adanya peristiwa kelam dan tragis dalam gerakan mahasiswa, seperti meninggalnya mahasiswa Tri Sakti pada kerusuhan 1998. Insiden tersebut menjadi pengingat yang keras bahwa demonstrasi, walaupun hak fundamental dalam demokrasi, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Kekerasan dan tindakan anarkis selama unjuk rasa tidak hanya merusak citra gerakan mahasiswa, tetapi juga berpotensi menyebabkan korban jiwa dan kerusakan fisik yang serius.

Oleh karena itu, peristiwa tersebut menegaskan bahwa sistem demokrasi menuntut partisipasi rakyat yang tidak hanya aktif dan berani, tetapi juga tertib dan berlandaskan aturan hukum. Demonstrasi harus dilakukan dengan penuh kedewasaan, menjaga keamanan umum, serta menghormati hak orang lain agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Penyelesaian konflik melalui pertemuan, dialog, dan mediasi lebih dianjurkan sebagai langkah preventif guna menghindari kekerasan dan jatuhnya korban.

Pengalaman pahit ini memperlihatkan bahwa kekuatan gerakan rakyat harus diseimbangkan dengan tanggung jawab moral dan etika, karena keberhasilan dalam memperjuangkan hak dan aspirasi harus diiringi dengan upaya menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat secara menyeluruh. Kedisiplinan dan tata tertib dalam berunjuk rasa bukan semata-mata demi menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, pengalaman ini menjadi pembelajaran penting agar gerakan massa tetap pada jalur yang benar, mengedepankan perdamaian dan rasa hormat, serta mampu menjadi kekuatan positif yang memperkuat demokrasi tanpa menimbulkan penderitaan dan korban. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh keberagaman pendapat, tetapi juga oleh kedewasaan masyarakat dalam mengekspresikan aspirasi dan menyikapi perbedaan secara konstruktif.

Q. Gerakan dan Demonstrasi Tahun 1966

Gerakan mahasiswa dan pelajar yang terjadi pada tahun 1966 merupakan kelanjutan dari serangkaian aksi protes dan tuntutan perubahan yang telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Pada masa itu, organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menjadi salah satu garda terdepan dalam melakukan aksi-aksi demonstrasi yang semakin massif dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Selain KAMI, muncul pula organisasi serupa di kalangan pelajar yang dikenal sebagai Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia

(KAPPI). KAPPI dianggap memiliki kemurnian gerakan karena anggotanya masih muda dan dianggap lebih idealis serta stabil secara psikologis. Organisasi ini memainkan peran strategis dengan menguasai berbagai titik penting di jalan-jalan utama ibu kota pada saat itu, mengorganisir demonstrasi dan aksi protes yang memiliki dampak politik sangat signifikan.

Keunikan gerakan tahun 1966 adalah bukan hanya didukung oleh masyarakat sipil, tetapi juga mendapat dukungan secara diam-diam dari kalangan militer. Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika itu berperan sebagai benteng pelindung mahasiswa dan pelajar dari berbagai ancaman yang datang dari unsur-unsur pro-komunis. Hubungan politik dan strategis antara kalangan militer, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Jenderal HR Dharsono dan Komandan Pasukan Elite RPKAD Sarwo Edhi, dengan KAMI sangat erat. Dukungan ini memberikan kekuatan lebih besar pada gerakan mahasiswa untuk menekan pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Gerakan mahasiswa tahun 1966 akhirnya menjadi katalisator penting yang memicu pergantian kepemimpinan nasional, yang berimplikasi pada berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno dan sekaligus membuka era baru dalam sejarah politik Indonesia. Demonstrasi dan aksi massa dalam konteks ini menunjukkan bagaimana partisipasi politik pemuda bisa membawa perubahan besar ketika didukung oleh semangat kolektif, strategi yang matang, serta dukungan dari elemen-elemen kunci dalam negara.

Selain aspek politik, gerakan ini juga menunjukkan dinamika sosial yang kompleks, di mana pemuda dan mahasiswa tidak hanya menjadi agen perubahan, tetapi juga pelopor dalam menumbuhkan kesadaran rakyat akan pentingnya demokrasi dan pertanggungjawaban pemerintahan. Kesatuan aksi dan solidaritas dalam gerakan nasional ini menjadi bahan perenungan penting dalam pengembangan partisipasi politik pemuda di masa mendatang.

Pada tanggal 10 Januari 1966, yang kini dikenal sebagai Hari Kebangkitan Pemuda, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat melancarkan aksi besar yang dipicu oleh pengumuman Tri Tuntutan

Rakyat (TRITURA). TRITURA terdiri dari tiga tuntutan utama, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), perombakan kabinet, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini secara cepat menyebar dan berhasil menguasai sejumlah tempat strategis di Jakarta, menunjukkan betapa besar gelombang protes yang terorganisasi oleh para mahasiswa dan peserta aksi lainnya.

Setelah aksi tersebut, pada hari berikutnya mahasiswa di Jakarta memulai aksi mogok kuliah yang kemudian diikuti oleh mahasiswa di berbagai daerah. Demonstrasi semakin intens dengan berbagai bentuk ekspresi protes, seperti coretan-coretan di dinding yang berisi kritik dan tuntutan terhadap pemerintah yang berkuasa. Momentum ini menandai eskalasi ketegangan sosial-politik yang sangat signifikan pada saat itu.

Sebagai respons atas tekanan dari demonstrasi, pada tanggal 13 Januari 1966 pemerintah akhirnya menurunkan tarif karcis bus dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp200. Penurunan tarif angkutan umum ini menjadi simbol kemenangan kecil sekaligus kemajuan bagi para mahasiswa yang menuntut perubahan nyata dalam hidup masyarakat.

Dua hari kemudian, Presiden Soekarno mengundang perwakilan mahasiswa ke Istana Bogor untuk menghadiri sidang kabinet. Tindakan ini mencerminkan perhatian Presiden atas tuntutan mahasiswa meskipun pertemuan tersebut justru memicu kegaduhan di berbagai daerah seperti Bandung dan Jakarta. Demonstrasi dan aksi mahasiswa pada tahun 1966 terus berlanjut tanpa henti, memperlihatkan keberanian dan keteguhan mereka menuntut perubahan radikal.

Dalam perkembangan yang semakin memanas, organisasi KAMI dan KAPPI melakukan aksi sabotase terhadap pelantikan kabinet baru. Beberapa ruas jalan utama di Jakarta lumpuh total dalam aksi tersebut. Meski demikian, calon menteri yang akan dilantik berhasil memasuki istana menggunakan helikopter. Upaya mahasiswa untuk memasuki istana yang dijaga ketat oleh pasukan khusus Cakrabirawa memicu kerusuhan yang kian memuncak.

Sayangnya, kerusuhan tersebut tidak dapat dihindari dari jatuhnya korban jiwa. Arif Rachman Hakim, seorang demonstran dari

Universitas Indonesia, gugur tertembak dalam insiden itu. Kematian Arif Rachman Hakim menjadi simbol pengorbanan dan semangat perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Solidaritas mahasiswa semakin menguat setelah gugurnya Arif, yang kemudian namanya diabadikan untuk sebuah laskar perjuangan, yaitu Laskar ARH (Arif Rachman Hakim). Pembentukan laskar ini menunjukkan bagaimana peristiwa tragis mampu menjadi sumber inspirasi dan memperkuat gerakan mahasiswa pada masa itu.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah gerakan mahasiswa, tetapi juga menegaskan peran vital pemuda dalam perubahan sosial-politik Indonesia. Semangat, keberanian, dan solidaritas yang ditunjukkan pada masa itu menjadi warisan berharga bagi generasi penerus untuk terus menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Pada tahun 1998, gerakan mahasiswa di Indonesia berkembang secara pesat, seiring dengan memburuknya situasi ekonomi negara yang disebabkan oleh krisis finansial Asia dan ketidakpuasan terhadap sistem politik yang dianggap korup dan tidak berkeadilan. Awalnya, aksi-aksi ini lebih banyak dilakukan di kalangan kampus dan dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang menjadi motor utama dalam menyuarakan reformasi. Slogan utama yang diusung adalah Reformasi, yang berisi tuntutan pembaruan menyeluruh terhadap aspek ekonomi dan politik agar bangsa Indonesia keluar dari rezim otoriter Orde Baru yang telah lama berkuasa.

Selain menuntut perubahan sosial dan politik, mahasiswa secara tegas menuntut pencabutan lima paket undang-undang politik yang dianggap sebagai pembelenggu demokrasi dan memperkuat kekuasaan otoriter. Kepala pemerintah saat itu, Soeharto, yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade, dianggap tidak mampu menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadaan semakin memburuk ketika pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang akibatnya harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan menambah penderitaan rakyat.

Beban hidup masyarakat yang semakin berat mendorong mahasiswa serta kelompok reformis lainnya untuk meningkatkan aksi demonstrasi secara luas dan masif. Hampir setiap hari, di berbagai kota besar maupun daerah, mahasiswa turun ke jalan melakukan unjuk rasa dan aksi mogok kerja yang menuntut reformasi menyeluruh. Aksi ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia, menciptakan gelombang protes terbesar pasca reformasi 1966.

Gerakan 1998 menjadi momentum yang sangat penting karena memunculkan kesadaran rakyat akan pentingnya demokrasi yang sehat dan transparan. Tekanan dari gerakan mahasiswa ini akhirnya memaksa pemerintahan Soeharto untuk mengundurkan diri pada Mei 1998, menandai dimulainya era reformasi di Indonesia. Aksi-aksi ini tidak hanya menunjukkan keberanian mahasiswa sebagai agen perubahan, tetapi juga menegaskan bahwa kekuatan rakyat yang bersatu dan berjuang secara damai mampu membawa perubahan besar dalam sistem politik bangsa.

Peristiwa tahun 1998 ini menjadi tonggak sejarah yang membekas dalam ingatan bangsa Indonesia, bahwa kekuatan mahasiswa dan rakyat dapat menjadi pilar utama dalam memperjuangkan hak asasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Gerakan ini memperkuat paradigma bahwa demokrasi yang sehat harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan tekad bersama untuk mendorong perubahan positif demi kemajuan bangsa.

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sejak awal tahun 1998 semakin meluas dan intens dari waktu ke waktu. Aksi protes tidak hanya terpaku di satu kampus saja, melainkan mulai merambah ke berbagai kampus di seluruh wilayah Indonesia. Slogan "Reformasi" yang digaungkan mahasiswa menjadi semakin lantang dan jelas terdengar di tengah kerumunan demonstran. Mahasiswa menuntut pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Soeharto beserta jajarannya untuk segera melakukan perubahan reformasi menyeluruh di segala bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Puncak intensitas demonstrasi terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di sekitar area Kampus Trisakti, Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Pada peristiwa itu, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan yang anarkis. Bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan mewarnai kejadian tersebut, yang berujung pada tindakan represif aparat dengan penggunaan senjata api. Tragisnya, empat mahasiswa tewas akibat tertembak dalam peristiwa tersebut. Keempat korban yang gugur dikenal sebagai Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Hartanto, dan Hendriawan Sie.

Kematian empat mahasiswa tersebut menjadi titik balik yang semakin memperkeruh situasi politik dan sosial. Berita meninggalnya rekan-rekan mereka yang menjadi korban tembakan aparat menyulut kemarahan dan semangat perlawanan yang lebih besar dari kalangan mahasiswa. Mereka tidak hanya melanjutkan aksi demonstrasi, tetapi juga mulai melancarkan perlawanan yang semakin keras terhadap aparat.

Situasi semakin memburuk dengan munculnya aksi pembakaran gedung-gedung pemerintahan dan kendaraan, serangkaian kerusuhan yang diiringi kekerasan, serta insiden penjarahan yang terjadi di beberapa daerah. Kekacauan yang terus berlangsung ini mengguncang kestabilan politik nasional dan memicu pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuasaan di tingkat elite politik.

Puncaknya, tekanan dari demonstrasi dan situasi politik yang tidak menentu tersebut mengantarkan pada satu momen bersejarah yang menghentikan era kekuasaan Orde Baru. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00 pagi, Presiden Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun memerintah Indonesia. Peristiwa pengunduran diri Soeharto tersebut disiarkan secara langsung oleh televisi nasional, menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kursi kepresidenan pun secara resmi diserahkan kepada Wakil Presiden saat itu, BJ Habibie. Transisi ini menandai dimulainya era reformasi di Indonesia, dengan harapan

bangsa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.

R. Peran Mahasiswa dalam Era Reformasi dan Tantangan Demokrasi Pasca 1998

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, mahasiswa kembali memainkan peran sentral dalam mengawal proses reformasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai motor penggerak perubahan, mahasiswa tidak hanya hadir sebagai agen penentang rezim otoriter, tetapi juga sebagai pengawal transisi demokrasi yang menuntut agar prinsip-prinsip demokrasi sejati dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran mahasiswa pada era reformasi terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam berbagai agenda reformasi seperti penuntutan amandemen UUD 1945 untuk mereformasi sistem pemerintahan, penguatan supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia. Mereka juga menjadi pengawas kritis terhadap kebijakan pemerintah baru serta pelaku penting dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Berbagai aksi demonstrasi, seminar, diskusi publik, dan advokasi hukum dilakukan mahasiswa untuk menuntut perubahan struktural yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Namun, peran mahasiswa dalam era reformasi tidak lepas dari tantangan dan dinamika yang kompleks. Seiring dengan perubahan politik yang dinamis, mahasiswa sering dihadapkan pada problem internal seperti adanya fragmentasi kepentingan, politisasi, serta tantangan eksternal berupa tekanan politik dan hambatan terhadap kebebasan akademik dan berekspresi. Selain itu, kebutuhan memperkuat kapasitas intelektual dan organisasional menjadi penting agar mahasiswa dapat terus berkontribusi secara efektif dalam proses demokrasi yang semakin kompleks.

Era reformasi juga menuntut mahasiswa dan generasi muda untuk mengembangkan peran mereka tidak hanya sebagai aktivis demonstrasi, tetapi juga sebagai pemikir dan penggerak kebijakan

melalui partisipasi yang lebih strategis dan konstruktif dalam institusi politik, pemerintahan, dan masyarakat sipil. Penguatan kapasitas kepemimpinan, pemahaman kebijakan publik, dan kemampuan advokasi menjadi kunci agar mahasiswa mampu bertransformasi menjadi agen perubahan yang berkelanjutan.

Selain itu, tantangan demokrasi pasca 1998 juga meliputi upaya konsolidasi demokrasi, penguatan pemerintahan yang bersih, dan pengembangan budaya politik demokratis yang inklusif. Jadi peran mahasiswa sangat strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat luas, melawan politik uang dan korupsi, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang menghargai keberagaman dan hak asasi manusia.

Sebagai penutup, keterlibatan mahasiswa dalam era reformasi dan masa depan demokrasi Indonesia harus terus diapresiasi dan didukung melalui penguatan lembaga pendidikan dan organisasi kemahasiswaan yang sehat. Melalui peran ini, mahasiswa akan tetap menjadi pilar penting dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi Indonesia agar mampu menghadapi tantangan global dan menegakkan keadilan sosial dalam negeri.

S. Demonstrasi Terbaru di Indonesia Tahun 2025: Gerakan #IndonesiaGelap

Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengalami gelombang demonstrasi yang cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah, terutama di Jakarta, yang menjadi pusat aksi massa. Gerakan demonstrasi ini dikenal dengan sebutan #IndonesiaGelap atau Habislah Gelap Terbitlah Perlawanan, yang merupakan simbol keresahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Demonstrasi besar pertama kali diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menginisiasi aksi mulai tanggal 20 Februari 2025. Peserta aksi pada saat itu diperkirakan mencapai sekitar 5.000 mahasiswa dengan dukungan luas dari masyarakat sipil. Mereka menuntut pemerintah untuk melakukan

evaluasi terhadap kabinet yang dinilai kurang efektif, menolak revisi kontroversial Undang-Undang seperti UU Tentara Nasional Indonesia (TNI), UU Polri, dan UU Kejaksaan, serta mengkritisi program Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak tepat sasaran.

Gelombang demonstrasi kemudian semakin meluas dengan keterlibatan kelompok buruh, pengemudi ojek online, pekerja kurir, serta berbagai elemen masyarakat sipil. Pada bulan Maret hingga Agustus 2025, sejumlah aksi serupa dilakukan di depan gedung DPR RI dan DPRD di berbagai daerah. Aksi-aksi ini menuntut peninjauan ulang kebijakan pemerintah dan legislator yang perihatin dipandang tidak pro-rakyat serta meminta transparansi dan keadilan dalam pengelolaan negara.

Puncak dari demonstrasi terjadi pada akhir Agustus 2025, menyusul penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan: Perdesaan dan Perkotaan) dan sejumlah undang-undang yang kontroversial. Pada malam 28 Agustus, aksi unjuk rasa bereskalasi menjadi bentrokan yang lebih besar antara massa dan aparat keamanan, dipicu oleh insiden tragis pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan yang tewas tertabrak kendaraan taktis aparat. Bentrokan dan kerusuhan yang terjadi melibatkan ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat, seperti pengemudi ojek daring dan mahasiswa.

Aksi terus berlanjut hingga awal September 2025 dan sejumlah tuntutan publik yang tersebar dalam petisi dan forum umum semakin diperkuat, antara lain 17+8 Tuntutan Rakyat yang berisi desakan terhadap pengesahan kebijakan pro-rakyat, evaluasi undang-undang penting, penghapusan praktik korupsi, dan keadilan sosial. Dalam aksi ini, ribuan demonstran dari berbagai latar belakang terlibat dalam unjuk rasa yang dikombinasikan dengan panggung seni, bazar UMKM, dan mimbar rakyat sebagai bentuk kreatif dalam menyampaikan aspirasi.

Tuntutan utama demonstran fokus pada perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, penolakan revisi Undang-Undang yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, serta penguatan hak pekerja dan masyarakat adat. Demonstrasi ini menjadi ruang penting bagi rakyat dan mahasiswa untuk mengawal demokrasi dan

memastikan pemerintah mendengarkan serta memenuhi kebutuhan rakyat secara adil dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, demonstrasi tahun 2025 di Indonesia merupakan perwujudan nyata dari demokrasi partisipatif di mana masyarakat secara aktif menggunakan hak mereka dalam menyatakan pendapat dan menuntut perubahan. Meskipun sejumlah aksi berakhir dengan konfrontasi, gelombang demonstrasi ini tetap mencerminkan dinamika sosial-politik yang sehat dan tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah untuk semakin memperkuat tata kelola demokrasi yang inklusif dan akuntabel.

T. Tanggapan Pemerintah dan Aparat Keamanan terhadap Demonstrasi 2025 di Indonesia

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, secara tegas menyatakan menghormati dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, termasuk melalui demonstrasi damai. Dalam beberapa pernyataannya usai gelombang demonstrasi besar yang terjadi sejak pertengahan tahun 2025, Presiden menegaskan bahwa hak untuk berunjuk rasa adalah bagian penting dari demokrasi yang dijamin baik oleh konstitusi Indonesia maupun oleh instrumen hak asasi manusia internasional.

Namun, Presiden dan pemerintah juga memberikan peringatan keras bahwa kebebasan berekspresi ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh berubah menjadi anarki maupun tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, serta kekerasan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, wajib melindungi masyarakat dan menjaga fasilitas publik dari perusakan. Aparat juga harus bertindak tegas menindak pelaku pelanggaran hukum dengan cara yang transparan dan profesional.

Penegakan hukum atas pelanggaran oleh aparat yang berlebihan dalam meredam demonstrasi juga menjadi perhatian pemerintah. Terkait insiden-insiden aparat yang diduga melakukan tindakan

di luar prosedur seperti penggunaan kekerasan berlebihan atau tembakan yang mengakibatkan korban jiwa, pihak kepolisian telah menjalankan pemeriksaan secara terbuka dan transparan. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik dengan menindak tegas apabila ditemukan aparat yang melanggar aturan, dan memberikan akses bantuan hukum kepada para korban.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta jajaran terkait juga menyampaikan bahwa pemerintah serius menanggapi berbagai tuntutan yang disuarakan oleh para demonstran, termasuk tuntutan yang terorganisir dalam gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat". Pemerintah berjanji akan membuka dialog dengan publik dan melakukan evaluasi atas berbagai kebijakan yang menjadi sumber keresahan, seperti kenaikan pajak, isu ketenagakerjaan, dan transparansi anggaran. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tidak semua tuntutan dapat dipenuhi sekaligus karena adanya keterbatasan dan perlu dilakukan secara bertahap.

Di lapangan, aparat keamanan berusaha menjaga situasi tetap kondusif dan melakukan pengamanan dengan prinsip pelibatan minimal kekerasan. Namun, ada laporan-laporan mengenai penggunaan peluru karet dan bentrokan di beberapa lokasi seperti Markas Brimob yang memicu protes lanjutan. Kritik dari sejumlah lembaga HAM dan masyarakat sipil menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh mengenai pengamanan aksi demonstrasi supaya humanis dan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara umum, pemerintah hadir sebagai mediator antara kepentingan keamanan nasional dan hak rakyat untuk menyuarakan aspirasi, berupaya memberikan ruang demokrasi yang sehat sekaligus menjaga ketertiban publik. Peran aparat keamanan difokuskan pada perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum sesuai dengan standar internasional.

Respons proaktif dan terbuka dari pemerintah terhadap tuntutan demonstran dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengakomodasi partisipasi politik masyarakat secara nyata. Namun, tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa

kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak berubah menjadi aktivitas yang merusak ketertiban dan keamanan bersama.

U. Cara Menyampaikan Pendapat yang Baik dan Benar di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara jelas mengatur hak serta kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dan sesuai aturan hukum. Pasal 6 UU tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara atau kelompok yang hendak mengemukakan pendapat di muka umum wajib memenuhi sejumlah kewajiban dan tanggung jawab penting demi menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial.

Kewajiban utama yang harus dipatuhi meliputi:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain serta norma moral yang diakui secara umum. Ini berarti penyampaian pendapat harus dilakukan tanpa merugikan hak orang lain, tidak menyebarkan kebencian, fitnah, atau kekerasan, serta tetap beretika sesuai nilai-nilai sosial.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Warga negara diwajibkan mengikuti rambu-rambu hukum agar penyampaian pendapat tidak menimbulkan konflik hukum dan tetap dalam ruang legal.
3. Menjaga ketertiban umum. Demonstrasi atau unjuk rasa harus berlangsung secara tertib dan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat luas, seperti menghindari perusakan fasilitas umum atau kekerasan.
4. Memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam berpendapat di muka umum, harus dijaga agar tidak memecah belah atau menimbulkan konflik sosial yang bisa merusak persatuan nasional.

Selain kewajiban tersebut, undang-undang juga mengatur pembatasan lokasi tertentu yang dilarang digunakan sebagai tempat menyampaikan pendapat di muka umum untuk menjaga keamanan dan fungsi strategis. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat dapat dilakukan di tempat terbuka kecuali dilarang di lokasi berikut:

1. Istana Kepresidenan
2. Tempat ibadah
3. Instalasi militer
4. Rumah sakit
5. Pelabuhan udara atau laut
6. Pangkalan angkutan umum seperti stasiun kereta api dan terminal
7. Berbagai objek vital negara lainnya

Selain larangan lokasi, penyampaian pendapat di muka umum juga dilarang dilakukan saat hari besar nasional untuk menjaga ketertiban dan penghormatan terhadap momen-momen penting negara.

Lebih lanjut, orang-orang yang menyampaikan pendapat di tempat umum tidak diperkenankan membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, seperti senjata tajam, bahan peledak, atau alat lain yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kekerasan.

Undang-undang ini juga mengatur asas-asas fundamental dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat, antara lain:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial.
2. Asas musyawarah mufakat yang mendorong penyelesaian masalah secara damai dan dialogis.
3. Asas kepastian hukum dan keadilan yang menekankan perlunya aturan yang jelas dan adil dalam setiap proses.
4. Asas manfaat yang mengarah pada tujuan bahwa penyampaian pendapat harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.
5. Asas profesionalitas yang mengharuskan pelaku penyampaian

pendapat melaksanakan aktivitasnya secara terorganisir dan bertanggung jawab.

Dengan ketentuan tersebut, penyampaian pendapat yang baik dan benar di muka umum tidak hanya melindungi hak asasi manusia untuk berekspresi, tetapi juga menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, aman, dan harmonis bagi seluruh warga negara. Kombinasi hak dan kewajiban yang diatur secara rinci ini menjadi landasan agar demokrasi dapat berkembang dengan sehat serta memungkinkan partisipasi aktif dan konstruktif yang memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, seperti demonstrasi, tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa pemberitahuan sebelumnya, terutama untuk aksi dengan skala pengerahan masa yang besar. Dalam konteks demokrasi yang berjalan sesuai aturan, kegiatan demonstrasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pemberitahuan tersebut harus disampaikan oleh pihak penyelenggara atau penanggung jawab aksi minimal 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai dan surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh POLRI setempat di wilayah pelaksanaan aksi.

Surat pemberitahuan ini memuat informasi penting yang wajib dipenuhi, antara lain:

1. Maksud dan tujuan kegiatan demonstrasi
2. Tempat, lokasi, dan rute yang akan digunakan selama aksi
3. Waktu pelaksanaan dan durasi kegiatan
4. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan, misalnya orasi, pawai, atau unjuk rasa
5. Nama dan identitas penanggung jawab kegiatan
6. Nama dan alamat organisasi, kelompok, maupun perorangan yang terlibat dalam aksi
7. Alat-alat yang akan digunakan dalam demonstrasi, misalnya pengeras suara atau spanduk

8. Perkiraan jumlah peserta yang akan ikut serta

Pemberitahuan tertulis ini sangat penting bagi POLRI sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga dan mengatur ketertiban umum selama aksi berlangsung. Informasi dalam surat tersebut memungkinkan POLRI melakukan persiapan pengamanan yang optimal, termasuk pengaturan lalu lintas, koordinasi dengan pihak terkait, dan langkah antisipasi atas kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusuhan atau tindakan anarkis.

Selain aspek pengamanan, pemberitahuan ini juga menjamin bahwa demonstrasi dapat berjalan dengan lancar tanpa melanggar regulasi yang berlaku dan tetap menghormati hak-hak masyarakat lain yang tidak terlibat dalam aksi tersebut. POLRI bertindak sebagai mediator yang menjaga keseimbangan antara hak warga untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga ketertiban serta keamanan publik.

Setelah menerima surat pemberitahuan yang lengkap, POLRI wajib memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada penyelenggara sebagai bukti resmi bahwa mereka telah memenuhi kewajiban hukum untuk memberitahukan rencana aksi. Kepemilikan STTP ini penting untuk legitimasi penyelenggaraan demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Jika ada perubahan atau pembatalan kegiatan, hal tersebut juga harus disampaikan secara tertulis kepada POLRI paling lambat 24 jam sebelum aksi berlangsung. Dengan ketentuan ini, penyampaian pendapat melalui demonstrasi di muka umum menjadi proses yang terstruktur dan diawasi, agar demokrasi tetap berjalan sehat, aman, dan damai.

V. Peran dan Tanggung Jawab Koordinator Lapangan (Korlap) dalam Pelaksanaan Demonstrasi

Dalam pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa, khususnya yang melibatkan massa besar, keberadaan seorang Koordinator Lapangan (Korlap) menjadi sangat krusial. Korlap bertugas memimpin dan mengatur jalannya aksi dari awal hingga akhir sesuai dengan agenda

yang telah disepakati secara mufakat pada rapat persiapan aksi. Tanggung jawab penuh Korlap mencakup seluruh aspek teknis dan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

Korlap harus memastikan bahwa aksi demonstrasi berjalan tertib, aman, dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ia berhak memberikan instruksi kepada para peserta aksi dan bertanggung jawab atas dinamika massa selama kegiatan. Selain itu, Korlap juga bertugas mengenali setiap peserta untuk mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau provokator yang dapat memicu kerusuhan atau kekacauan.

Dalam situasi jika terjadi kondisi darurat atau gangguan keamanan, Korlap menjadi sosok yang harus mampu mengambil keputusan cepat dan tepat, termasuk mengatur evakuasi atau menghentikan aksi jika situasi sudah tidak kondusif. Keberadaan Korlap juga penting untuk menjembatani komunikasi antara peserta aksi dan pihak aparat keamanan, memfasilitasi negosiasi apabila terjadi pemblokiran jalan atau perselisihan di lapangan.

Selain Korlap, beberapa unsur penting dalam manajemen demonstrasi adalah:

1. Wakil Korlap (Wakorlap): Sebagai asistennya yang membantu mengatur jalannya aksi, biasanya diperlukan dalam aksi dengan jumlah massa yang sangat besar.
2. Orator: Bertugas menyampaikan orasi, mengomunikasikan tuntutan, dan membakar semangat massa dengan kemampuan komunikasi yang baik.
3. Agitator: Bertugas sebagai penyemangat massa, meneriakkan yel-yel dan lagu perjuangan untuk memupuk solidaritas dan semangat aksi.
4. Negosiator: Berperan melakukan komunikasi dan negosiasi dengan aparat keamanan, pihak yang menjadi sasaran aksi, maupun media, untuk memastikan kelancaran jalannya demonstrasi.
5. Tim Keamanan: Menjaga ketertiban massa dengan mengatur

barisan dan mencegah masuknya penyusup atau provokator, serta mengatur arus lalu lintas yang dilalui aksi.

6. Tim Logistik: Bertanggung jawab atas kebutuhan perlengkapan aksi seperti alat peraga, makanan, minuman, dan peralatan medis standar P3K.
7. Tim Humas dan Dokumentasi: Mengelola komunikasi dengan media, menyebarluaskan pernyataan sikap, serta mendokumentasikan jalannya aksi untuk rekam jejak dan evaluasi.

Koordinasi yang baik antar unsur ini sangat penting untuk menciptakan demonstrasi yang berjalan lancar, damai, dan dapat menyampaikan aspirasi dengan efektif. Korlap dan timnya harus mampu mengantisipasi berbagai situasi dan menjaga agar aksi tidak menyimpang menjadi tindakan kekerasan atau anarkis.

Peran Koordinator Lapangan adalah kunci utama dalam menjaga integritas dan keberhasilan sebuah demonstrasi, karena dia bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses serta hasil akhir aksi di lapangan. Dalam menghadapi situasi kompleks dan tantangan dinamis di lapangan, Korlap harus senantiasa memegang prinsip profesionalitas, ketenangan, dan komunikasi yang baik agar aksi tetap terjaga secara damai dan sesuai hukum.

Daftar Pustaka

Abdullah, A. S. (2007). *Teori-teori pendidikan berdasarkan al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aisyah, P. P. (2021). Hak kebebasan berpendapat yang semakin menyempit dan memburuk. *Jurnal Syntax Fusion*.

Al Asadullah, S., & Nurhalin, N. (2021). Peran pendidikan karakter dalam membentuk kemampuan berfikir kritis generasi muda indonesia. *Kaisa: Jurnal pendidikan dan pembelajaran*, *1*(1), 12-24.

Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku dan partisipasi politik masyarakat sipil sebagai perkembangan sosial dalam pembangunan politik*. Penerbit: Kramantara JS.

Alfian. (1981). *Pemikiran dan perubahan politik indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Althafullayya, M. R. (2024). Peran pendidikan karakter untuk generasi muda berdaya tahan dalam mendukung ketahanan nasional: Analisis holistik. *Journal Education Innovation (JEI)*, *2*(1), 163-174.

Amaliyah, A., & Rahmat, A. (2021). Pengembangan potensi diri peserta didik melalui proses pendidikan. *ATTADIB*, *5*(1), 28-45.

Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia (Vol. 1, No. 1)*. CV Pustaka Setia.

Anwar. (2015). *Management of student development*. Indragiri TM.

Ariany, L., & Perdana, S. P. (2024). Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(12).

Asshiddiqie, J. (2006). Partai politik dan pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi. *Jurnal*, *6*.

Astari, T., Purwanti, K. Y., Arditama, A. Y., Subhananto, A., Nuryanti, M. S., Nyihana, E., ... & Hikmah, A. N. (2024). *Ekologi sosialisasi anak: Perspektif keluarga, sekolah dan komunitas*. Cv. Edupedia Publisher.

Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi: Pengamanan atau pengekangan

kebebasan berpendapat?. *Padjadjaran Law Review*, *7*(2), 26-37.

Back, H., Teorell, J., & Westholm, A. (2011). Explaining modes of participation: A dynamic test of alternative rational choice models. *Scandinavian Political Studies*, *34*(1), 74-97. https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2011.00262.x

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Edisi VI*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pemuda Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. Diakses dari https://www.bps.go.id

Bahsoan, A., Nur, A., Panai, D. N., Kalaka, F. R. S., Mestari, S. A., Laali, S. A.,& Hida, Y. (2025). *Filsafat dalam multiperspektif*. Ideas Publishing.

Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., ... & Judijanto, L. (2024). *Sistem politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, *2*(2), 287-310

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Cahyati, B. S., Zahra, F. A., Naima, N., & Hasanah, N. (2024). Menjadi generasi maju dengan memahami demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks Indonesia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *9*(1), 687-693.

Dalton, R. J. (2020). *The good citizen: How a younger generation is reshaping american politics*. CQ Press.

Fajari, G., & Triadi, I. (2023). Pembangunan karakter generasi muda untuk memperkokoh sistem ketahanan nasional dalam aspek pancagatra. *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, *1*(1), 37-42. Diakses pada https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/139

Febrianasari, S. A. (2022). Kebebasan berpendapat dalam perspektif kedaulatan rakyat. *Sovereignty*, *1*(2), 238-246.

Fiedler, L. A. (1984). The Tyranny of the Normal. The Hastings Center Report, 14(2), 40–42. https://doi.org/10.2307/3561884

Graaf, L. J., & Michels, A. M. B. (2009). Examining citizen participation from a citizen's perspective. *Tilburg School of Politics and Public Administration*, Tilburg University. Diakses pada https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/506fb570-27f4-40e4-a2b6-cfc716d25324

Gustina, S., Yuwinsi, D., & Wulandari, R. (2022). Upaya kelompok bermain dalam proses sosialisasi dilembaga pendidikan. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, *1*(03), 329-336.

Halim, R., & Lalongan, M. (2016). *Partisipasi politik masyarakat: Teori dan praktik (Vol. 1)*. Sah Media.

Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.

Haridito, et al. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan*. Surabaya: Unesa University Press.

Hermawan, I. C. (2013). Revitalisasi pendidikan politik dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. *ATIKAN*, *3*(1).

Hidayah, R. M. W., Abidin, E. S., Arifin, I., & Ahmad, M. R. S. (2024). Membangun kesadaran politik: Pentingnya partisipasi generasi muda di era digital. *EDUSOS: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, *1*(02), 74-77.

Hutasoit, A. (2023). *Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan perusakan atas mobil dalam aksi demonstrasi* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 982 K/Pid/2021) (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982.

Jannah, M., Kamsani, S. R., & Ariffin, N. M. (2021). Perkembangan usia dewasa: Tugas dan hambatan pada korban konflik pasca damai. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, *7*(2), 114-143.

Joseph, S. (2022). Human rights committee: General comment 29. *Human Rights Law Review*, *2*(1), 81-98. https://doi.org/10.1093/hrlr/2.1.81

Judrah, M., Arjum, A., Haeruddin, H., & Mustabsyirah, M. (2024). Peran guru pendidikan agama Islam dalam membangun karakter peserta didik upaya penguatan moral. *Journal of Instructional and Development Researches, 4*(1), 25-37.

Junaedi, I. (2019). Proses pembelajaran yang efektif. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 3*(2), 19-25.

Kantaprawira, R. (1988). *Sistem politik indonesia suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru.

Karsidi, D. R. (2005). *Sosiologi pendidikan*.

Kartono, K. (1996). *Pendidikan politik*. Bandung: Mandar Maju.

Kharisma, D. (2015). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik, 1*(7), 1144.

Kurdi, M. S. (2023). Urgensitas pendidikan Islam bagi identitas budaya (analisis kritis posisi efektif pendidikan sebagai pilar evolusi nilai, norma, dan kesadaran beragama bagi generasi muda Muslim). *Indonesian Journal of Religion Center, 1*(3), 169-189.

Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. McGraw-Hill.

Lincoln, A. (1863, November 19). *The Gettysburg Address [Speech]*. Gettysburg, Pennsylvania, United States.

Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: Makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.

Matompo, O. S. (2014). Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam prespektif keadaan darurat. *Jurnal media hukum, 21*(1), 16-16.

Maulani, G., Saptadi, N. T. S., Wolo, H. B., Purnomo, A. C., Tangko, L. A. A., Suyitno, M., ... & Perang, B. (2024). *Pendidikan kewarganegaraan*. Sada Kurnia Pustaka.

Mavrikos-Adamou, T. (2010). *Youth political participation: Emerging trends and responses in the European Union*. Brussels: European Economic and Social Committee.

Mawasdi Rauf, 1997. *Demokrasi dan demokratisasi*. Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP UI 1 November 1997 di Salemba

Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan politik dan manfaat peranannya di

masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 3*(6), 515-532.

Mulyadi, W., Umar, U., Ilham, I., & Ainunsa'biah, A. B. (2024). Pemuda berkarakter: Mendorong perubahan positif dan mengatasi kenakalan remaja di Kecamatan Wawo. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(2), 134-143.

Mulyono, N. K., Abidin, Z., & Dewi, E. K. (2002). Proses pencarian identitas diri pada remaja muallaf (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Nabillah, Y. L. (2024). *Tantangan hukum dan aspirasi demokratis: Perspektif atas perjuangan hukum dan hak asasi manusia dalam munculnya gerakan mahasiswa pro-demokrasi Thailand (2020-2021)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Nasarudin, N., Rachmawati, D. A., Mappanyompa, M., Eprillison, V., Misrahayu, Y., Halijah, H., ... & Selly, O. A. (2024). *Pengantar pendidikan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Nurhasanah, Y., Pahdulrahman, I., Sari, F. R. I., Darma, H. D., Plani, H. T., & Hudi, I. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk identitas nasional di era globalisasi generasi Z. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2*(3), 256-262.

Partanto, P. A. (2001). *Kamus ilmiah populer*. Surabaya: Arloka.

Pasaribu, P. (2017). Peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik the role of political parties in conducting political education. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 5*(1), 51-59.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)*. Majelis Umum PBB, Resolusi 217 A (III). Diakses pada https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf

Pierson, P. (1996). The new politics of the welfare state. *World Politics*, *48*(2), 143-179. https://doi.org/10.1353/wp.1996.0004

Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan politik sebagai proses belajar membentuk kesadaran politik dan peran kewarganegaraan.

EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 3(3), 427-442.

Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Purnomo, Heru, Evi Avicenna Agustin, Wiwi Kustio Priliana, Daniel Robert, Ni Ketut Citrawati, Rahmi Dwi Yanti, Hesty Hesty et al. "Bunga rampai psikologi remaja dan permasalahannya." (2024).

Putri, M. F. J. L., Sitompul, P. H. S., Th, M., Sasmita, S. K., Siallagan, J., Th, M., & Kurniati, P. (2025). *Pendidikan bela negara*. Basya Media Utama.

Qodratilah, M. T. (2011). *Kamus bahasa Indonesia untuk pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rahayu, A. A., & Alfirdaus, L., K. (2024). Peran dan dinamika informal politics dalam tata kelola transportasi: Studi kasus terminal bayangan Jembatan Gantung Jakarta Barat. *Journal of Politic and Government Studies*, *13*(3), 77-93. https://doi.org/10.14710/jpgs.v13i3.44650

Republik Indonesia. (1982). *Instruksi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses pada https://peraturan.bpk.go.id/Details/287090/inpres-no-12-tahun-1982

Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan good governance sesuai hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9*(11), 685-697.

Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., ... & Riauwati, J. (2025). *Masyarakat digital dan kebebasan berpendapat: Integrasi perspektif hukum, etika, dan literasi teknologi*. Penerbit Widina.

Rintjap, G. H., Gosal, R., & Monintja, D. (2018). Penguatan kelembagaan karang taruna dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif, 1*(1).

Riski, G. (2021). Pengaruh minat baca pemuda terhadap tingkat

perkembangan intelektual masyarakat. *Lifelong Education Journal, 1*(2), 118-126.

Rista, D., & Wiranata, I. H. (2024, August). Pendidikan kewarganegaraan: Landasan demokrasi yang inklusif melalui pemberdayaan warga negara menuju masyarakat yang demokratis. In Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran) (Vol. 7, pp. 1216-1227).

Ro'uf, M. (1997). *Demokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J.A., & Jones, W. S. (2015). *Political science: An introduction* (14th ed., Global Edition). England: Pearson.

Samuel, P. H., Joan, M. N., & Sahat, S. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2*(4), 182-194.

Satar, M., & Yusri, N. A. (2019). Pengambilan keputusan ditinjau dari manajemen diri dan kematangan emosi. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam, 10*(1), 20-41.

Savitri, A. (2019). *Bonus Demografi 2030: menjawab tantangan serta peluang edukasi 4.0 dan revolusi bisnis 4.0*. Penerbit Genesis.

Sentosa, M. F., & Widarto, B. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis pada saat demonstrasi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka. *Jurnal Lex Dirgantara, 1*(2).

Shakira, A. M., & Najicha, F. U. (2023). Sinergi teknologi informasi dan pendidikan kewarganegaraan di era digital. *Borneo Law Review, 7*(2), 206-217.

Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi dan hak asasi manusia*. Penerbit Widina.

Sukardan, J. D. B. (2020). Pengaruh politik hukum terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Education and Development*, *8*(3), 321-324.

Diakses pada https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1962

Sumanto, M. A. (2014). *Psikologi perkembangan*. Media Pressindo.

Suntian, I. A. P. (2023). Analisis deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) terhadap kelompok minoritas transgender di Kota Tasikmalaya. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 4*(2), 53-65.

Surakhmad, P. D. W. (1980). *Pengantar interaksi belajar mengajar (dasar dan tehnik metodologi pengajaran)*. Bandung: Tarsito.

Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonsia.

Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*. Guepedia.

Teorell, J., Torcal, M., & Montero, J. R. (2007). Political participation: Mapping the trerrain. Dalam J. W. Van Deth, J. R. Montero, & A. Westholm (Eds.), *Citizenship and Involment in European Democracies: A Comparative Perspective*, *17*, 334-357.

Torney-Putra, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Toron, V. B. (2024). *Sosiologi pendidikan*. CV. Ruang Tentor.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.*

Wahid, M. A. (2018). *Analisis pengaruh stabilitas politik dan faktor ekonomi*

terhadap Jakarta Islamic index (JII) [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak asasi manusia (HAM) pada kebebasan berpendapat/bereksperesi dalam negara demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi, 5*(3), 961-966.

Weber, M. (1946). *Politics as a vocation*. Dalam H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), dari Max Weber: *Essays in sociology* (pp. 77–128). Oxford University Press.

Weiss, T. G., Seyle, D. C., & Coolidge, K. (2013). *The rise of non-state actors in global governance: opportunities and limitations*. One Earth Future Foundation.

Willetts, P. (2001). Transnational actors and international organizations in global politics. Dalam J. B. Baylis & S. Smit (Eds), *The Globalisation of World Politics*, 356-393. Oxford University Press.

Winarno, W. (2015). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Zuhdi, T. (2014). Pendidikan budi pekerti (integrasi nilai moral agama dengan pendidikan budi pekerti). *Jurnal Kependidikan, 2*(1), 132-141.

Zulfa, A. N., Sari, E. P. P., & Trisiana, A. (2019). Meningkatkan kesadaran politik di kalangan anak muda. *Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, *7*(1), 1–13. https://doi.org/10.33061/JGZ.V7I1.3054

Profil Penulis

Dr. Achmad Busrotun Nufus, M.Pd adalah dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Lahir pada 26 Mei 1991 di Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan anak kedua dari pasangan Moch. Umar Yusuf dan Miftachul Khoirot.

Penulis menempuh pendidikan sarjana di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya pada tahun 2013 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Pendidikan Indonesia yang diselesaikan pada tahun 2017 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan menyelesaikan program doktor pada tahun 2025 di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Fokus keilmuan penulis meliputi Pancasila, kewarganegaraan, karakter, politik, dan pendidikan. Penulis aktif menghasilkan karya tulis, termasuk buku "Pendidikan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan" (2018, Madani Publisher), serta produktif dalam publikasi ilmiah dan penelitian di bidang pendidikan kewarganegaraan, karakter kebangsaan, dan etika politik. Untuk menghubungi penulis bisa melalui email busro@untidar.ac.id

Dr. Siti Maizul Habibah, S.Pd. M.A lahir di Lamongan Jawa Timur, pada tanggal 12 Desember tahun 1989. Penulis merupakan seorang dosen di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Prodi PPKn Universitas Negeri Surabaya dengan beasiswa PPA, Sedangkan Pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Prodi ilmu Hubungan Internasional melalui Beasiswa Unggulan Dikti. Kemudian menempuh S3 PKn di UPI melalui Beasiswa Pendidik Indonesia. Penulis bisa dihubungi melalui alamat email sitihabibah@unesa.ac.id

Frista Arisa, S.H., M.H merupakan Dosen di Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Penulis lahir di Klaten Jawa Tengah pada tanggal 16 Juni 1990. Penulis telah memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada saat ini, penulis aktif mengajar dalam bidang Ilmu Hukum. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email frista.arisa@gmail.com

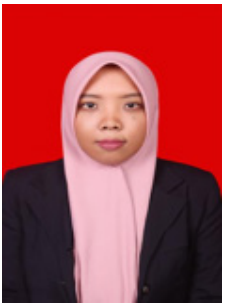

Novitasari, M.Pd lahir pada tanggal 20 Novermber 1992 di Dusun Pancursari Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Saronik dan Ibu Sri Rahayu Dewi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah di Banyuwangi.

Penulis melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi dengan mengambil Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn), Universitas Negeri Malang (UM) yang ditempuh selama empat tahun yaitu pada tahun 2010 hingga 2014. Kemudian pada tahun 2015-2017, penulis melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sekarang sebagai dosen tetap di Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Penulis bisa dihubungi melalui email bbqenak@untidar.ac.id

Ni'matu Sholikhah, M. Pd merupakan dosen bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Ketertarikan penulis terhadap dunia pendidikan dimulai pada tahun 2009 silam.

Pada jenjang kuliah Sarjana penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Negeri Yogyakarta dengan memilih Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum hingga akhirnya berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melan-

jutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi Program Pascasarjana pada Tahun 2017 di kampus yang sama. Berhasil menyelesaikan studi S2 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran dibidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Guna mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis juga aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Penulis bisa dihubungi melalui alamat email nimatusholikhah@untidar.ac.id

Khoirunnisa Ayu, lahir di Purworejo pada 18 Desember 2005, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini, Khoirunnisa adalah mahasiswi semester 5 (lima) pada Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Tidar, Magelang.

Selain aktif sebagai mahasiswi, Khoirunnisa juga menjalankan peran sebagai asisten dosen bagi Dr. Achmad Busrotun Nufus, M.Pd. Penulis bisa dihubungi melalui email khoirunnisa.ayu@students.untidar.ac.id

Buku "Gerakan Demokrasi dan Pendidikan Politik: Refleksi Atas Peran Pemuda dari Masa ke Masa" menyajikan analisis komprehensif tentang peran strategis generasi muda dalam dinamika demokrasi Indonesia, dari era pergerakan kemerdekaan hingga gelombang demonstrasi kontemporer seperti gerakan #IndonesiaGelap 2025. Melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan perspektif politik, pendidikan, sejarah, dan sosiologi, buku ini tidak hanya merefleksikan peran pemuda sebagai agen perubahan seperti dalam gerakan 1966 dan 1998 tetapi juga mengkritisi tantangan partisipasi politik kaum muda di tengah dominasi struktur politik yang masih elitis. Penulis menawarkan solusi melalui penguatan pendidikan politik, pemanfaatan teknologi digital, dan penciptaan ruang inklusif bagi pemuda untuk terlibat dalam proses kebijakan, seraya menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kesadaran, integritas, dan keberanian moral generasi mudanya

BENING PUSTAKA

Dipindai dengan CamScanner